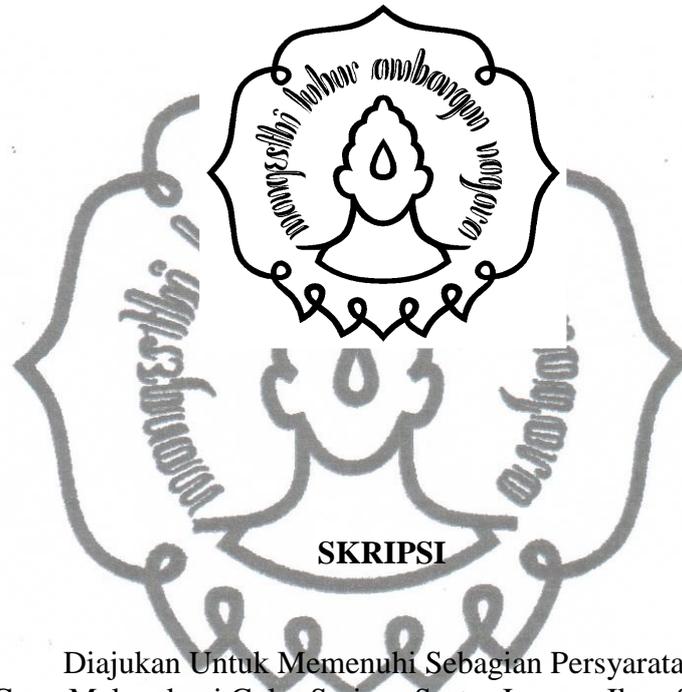


**LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT (LEKRA)  
DI SURAKARTA TAHUN 1950 - 1965**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Melengkapi Gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah  
Fakultas Sastra dan Seni Rupa  
Universitas Sebelas Maret

**Disusun Oleh :**

**ANDIKA KRISNA WIJAYA**  
C 0503010

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**  
*commit to user*  
**2011**

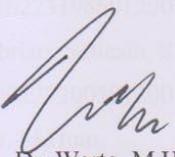
LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT (LEKRA)  
DI SURAKARTA TAHUN 1950 – 1965

Disusun Oleh :

ANDIKA KRISNA WIJAYA  
C 0503010

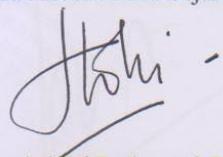
Telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Wanto, M.Hum.  
NIP. 196109251986031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

  
Dra. Sawitri Pri Prabawati, M.Pd.  
NIP. 195806011986012001

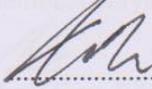
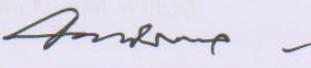
*commit to user*

LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT (LEKRÄ)  
DI SURAKARTA TAHUN 1950 – 1965

Disusun Oleh :

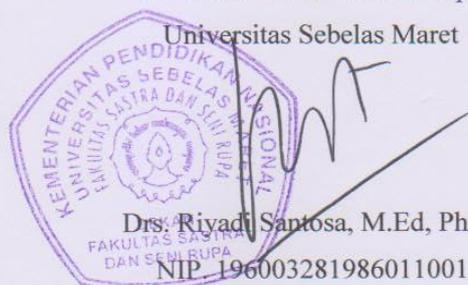
ANDIKA KRISNA WIJAYA  
C 0503010

Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret  
Pada Tanggal .....

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum. NIP. 195402231986012001	
Sekretaris	Insiwi Febriary Setiasih, S.S, M.A. NIP. 198002272005012001	
Penguji I	Dr. Wardo, M.Hum. NIP. 196109251986031001	
Penguji II	Drs. Sudarno, M.A. NIP. 195303141985061001	

Dekan

Fakultas Sastra dan Seni Rupa  
Universitas Sebelas Maret



Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph.D.  
NIP. 196003281986011001

LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT (LEKRA)  
DI SURAKARTA TAHUN 1950 – 1965

**PERNYATAAN**

Nama : Andika Krisna Wijaya

NIM : C0503010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul *Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Surakarta tahun 1950-1965* adalah betul-betul karya sendiri bukan plagiat dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda *citeas* (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, Agustus 2011

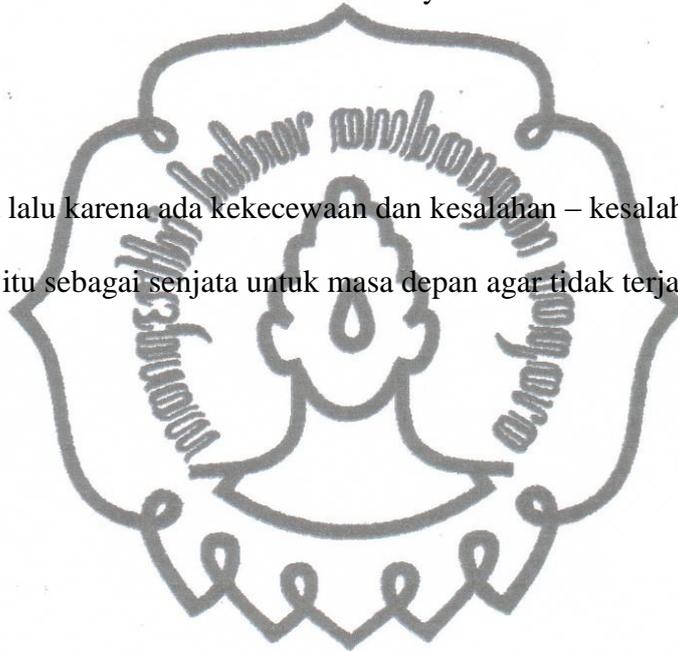
Yang membuat pernyataan,

Andika Krisna Wijaya

## MOTTO

Sejarah bukan hanya rangkaian cerita, ada banyak pelajaran, kebanggan dan harta di dalamnya.

Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.



*commit to user*



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak, Ibu dan Adik tercinta,
2. Dhewi Budiastuti.

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Kepada Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, hidayah, dan karunia sehingga dengan segala kekurangan yang ada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan tulus, saya haturkan kepada yang terhormat

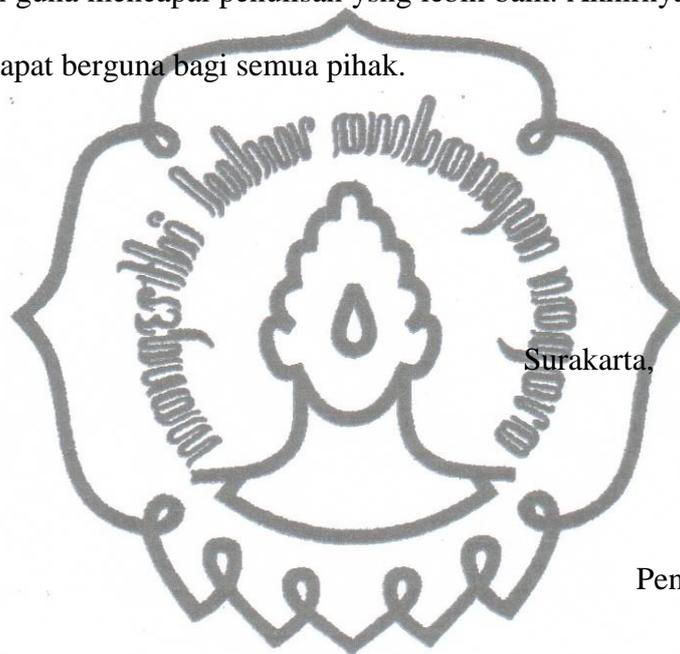
1. Bapak Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan perijinan kepada saya untuk mengadakan penelitian dan penyusunan skripsi.
2. Ibu Dra. Sawitri Pri Prabawati, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya selama ini.
3. Bapak Drs. Tundjung Wahadi S. M.Si. selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya selama ini.
4. Bapak Dr. Wardo, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang sepenuhnya telah memberikan banyak bimbingan, saran, petunjuk, serta pengarahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

*commit to user*

5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya Jurusan Ilmu sejarah yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya ini.
6. Segenap staf instansi-instansi terkait seperti UPT Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, UPT Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan instansi-instansi lain yang memberikan bantuan atas kelancaran penulisan ini.
7. Segenap staf Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional Jakarta atas data-datanya.
8. Segenap staf Perpustakaan Daerah Yogyakarta atas data-datanya.
9. Komunitas Historia Indonesia (KHI) atas berbagai informasinya.
10. Kepada para Nara Sumber Koesalah Soebagyo T, Hersri Setiawan, Martin Aleida, Supeno, Kaslan, Muljatno, Indrijatie, Nur Ardiansyah, Dominikus B P (Sadhar), M Gufron, Pakorba Solo atas kesediaanya memberikan informasi seputar penulisan ini.
11. Segenap keluarga terutama bapak, ibu dan adikku untuk doa, dukungan dan kasih sayang selama ini.
12. Dhewi Budiastuti atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama ini.
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2003, Ichsan, Topik, Davit, Sambodo, Anang, Persada, Arisa, Aldi, Adi Suko, Damas, Arip, Satrio,  
*commit to user*

Nugroho, Timur dan teman-teman semuanya yang telah membantu saya baik moral maupun material selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dan sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun guna mencapai penulisan yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.



Surakarta, Agustus 2011

Penulis

*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Kepustakaan.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. KONDISI LEKRA SURAKARTA DAN KONGRES NASIONAL	
LEKRA I 1950-1959.....	21
A. Kondisi Sosial Politik Surakarta Tahun 1950-1955.....	26
B. Kondisi Lekra Surakarta Sebelum Kongres Lekra I.....	30
C. Kongres Lekra I di Surakarta 23-31 Januari 1959.....	43

*commit to user*

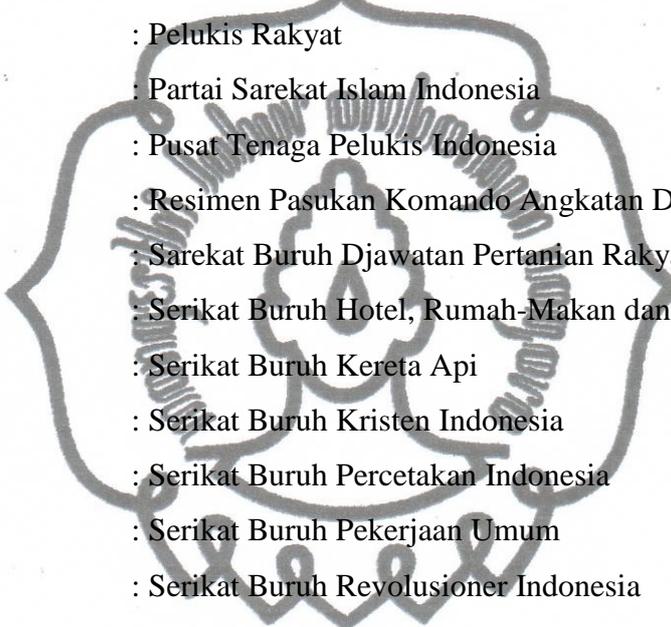
BAB III. PERKEMBANGAN DAN PERAN LEKRA SURAKARTA 1960-1964.....	61
A. Perkembangan Lekra Surakarta Setelah Kongres Nasional Lekra I. 61	
1. Konsep Turun Ke Bawah (Turba).....	63
2. Pedoman Lekra 1-5-1.....	66
B. Lekra Surakarta dan Dukungan Seniman Surakarta Terhadap Revolusi Budaya.....	71
BAB IV. KONDISI LEKRA SURAKARTA 1965-1966.....	90
A. Pemberangusan Lekra dan Karya-karyanya pasca G 30 S.....	90
B. Kondisi Lekra Surakarta Pasca Peristiwa G 30 S.....	103
BAB V. KESIMPULAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	120

**DAFTAR ISTILAH**

<i>Agent of change</i>	: Perantara atau alat yang menyebabkan suatu keadaan ke arah perubahan
<i>Gedeg</i>	: Dinding yang terbuat dari anyaman bambu
<i>Oral History</i>	: Sejarah lisan
<i>Stichting Cultureel Samenwerking</i>	: Yayasan Kerjasama Indonesia – Belanda
<i>Vivere Pericoloso</i>	: Hidup secara berbahaya
<i>Vorstenlanden</i>	: Nama yang diberikan pemerintah kolonial Belanda untuk daerah kerajaan Surakarta, Mangkunegaran serta Yogyakarta dan Paku Alaman.

## DAFTAR SINGKATAN

AMPAI	: American Motion Picture Association Indonesia
Bakoksi	: Badan Kontak Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia
BPH	: Badan Pengurus Harian
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CIA	: Central Intelligence Agency
GAPI	: Gabungan Partai Politik Indonesia
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
HBS	: Himpunan Budaya Surakarta
HIS	: Himpunan Sarjana Indonesia
HOMI	: Hirnpunan Organisasi Musik Indonesia
HR	: Harian Rakjat
IPPI	: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
ISBM	: Ikatan Seni Budaya Muhammadiyah
KMB	: Konverensi Meja Bundar
Kopem	: Komando Pemberantasan Malaria
Kopkamtib	: Komando Keamanan dan Keterliban
KSSR	: Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner
Laksmi	: Lembaga Kebudayaan Syarikat Muslimin Indonesia
Lestra	: Lembaga Sastra Indonesia
Leksi	: Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam
Lesbi	: Lembaga Seni Budaya Indonesia
Lesbumi	: Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia
Lestari	: Lembaga Senitari Indonesia
LKI	: Lembaga Kebudayaan Indonesia
LKKI	: Lembaga Kebudayaan Katolik Indonesia
LKN	: Lembaga Kebudayaan Nasional
Manikebu	: Manifesto Kebudayaan
Okra	: Organisasi Kesenian Rakyat
PABFIAS	: Panitia Aksi Boikot Film Imperialis Amerika Serikat



Pakorba	: Paguyuban Korban Orde Baru
Perbepsi	: Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia
Perdi	: Persatuan Djurnalisme Indonesia
Partindo	: Partai Indonesia
Persagi	: Persatuan Ahli Gambar Indonesia
PGTI	: Persatuan Guru Tehnik Indonesia
PI	: Pelukis Indonesia
PR	: Pelukis Rakyat
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
PTPI	: Pusat Tenaga Pelukis Indonesia
RPKAD	: Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat
SBDPR	: Sarekat Buruh Djawatan Pertanian Rakyat
SBHRT	: Serikat Buruh Hotel, Rumah-Makan dan Toko
SBKA	: Serikat Buruh Kereta Api
SBKI	: Serikat Buruh Kristen Indonesia
SBPI	: Serikat Buruh Percetakan Indonesia
SBPU	: Serikat Buruh Pekerjaan Umum
SBRI	: Serikat Buruh Revolusioner Indonesia
SBRRI	: Serikat Buruh Radio Republik Indonesia
SBTB	: Serikat Buruh Transpor Bendi
SIM	: Seniman Indonesia Muda
SOBSI	: Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
Sticusa	: <i>Stichting Cultureel Samenwerking</i>
UUPA	: Undang – Undang Pokok Agraria

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Daftar Narasumber.....	121
Lampiran 2	Antara 4 Agustus 1950 .....	122
Lampiran 3	Nasional 14 Juli 1953 .....	123
Lampiran 4	Dwi Warna 22 April 1955 .....	124
Lampiran 5	Harian Rakjat 6 Desember 1958 .....	125
Lampiran 6	Harian Rakjat 20 Desember 1958 .....	126
Lampiran 7	Harian Rakjat 28 Januari 1958 .....	127
Lampiran 8	Harian Rakjat 7 Februari 1959 .....	128
Lampiran 9	Harian Rakjat 14 Februari 1959 .....	129
Lampiran 10	Harian Rakjat 4 April 1959 .....	130
Lampiran 11	Harian Rakyat 2 Oktober 1965 .....	131
Lampiran 12	Harian Rakjat 3 Oktober 1965 .....	132
Lampiran 13	Kompas 6 Oktober 1965 .....	133
Lampiran 14	Mukaddimah Lekra .....	134

## ABSTRAK

ANDIKA KRISNA WIJAYA. C.0503010. 2011. *Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Surakarta Tahun 1950 – 1965*. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini membahas tentang perkembangan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Surakarta Tahun 1950 – 1965. Permasalahan yang dikaji meliputi perkembangan Lekra Surakarta menjelang Kongres I Lekra, peran Lekra Surakarta baik dalam kegiatan yang bersifat kebudayaan ataupun yang bermuatan politik hingga kondisi Lekra Surakarta menjelang dan sesudah peristiwa September 1965.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi dan yang terakhir adalah historiografi. Sumber digali melalui studi dokumen yaitu surat kabar sejaman seperti : *Harian Rakjat, Antara, Duta Masyarakat, Dwi Warna, Kedaulatan Rakjat, Nasional, Kompas, Berita Judha* yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional dan wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku sejarah. Selain itu dilengkapi pula sumber-sumber yang didapat dari buku-buku referensi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tema yang diambil oleh penulis. Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Surakarta ini berperan aktif dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat kebudayaan ataupun politik. Secara organisasi maupun pribadi anggotanya, Lekra seringkali mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak dengan dasar untuk mengembangkan seni budaya Indonesia yang revolusioner. Lekra pada perkembangannya memiliki kedekatan dengan PKI. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan pandangan dan pemikiran dalam hal revolusi kebudayaan Indonesia. Melalui surat kabar *Harian Rakjat*, PKI memberikan ruang kepada seniman Lekra untuk berkarya. Lekra sendiri juga ikut membantu PKI dalam merebut simpati rakyat dalam Pemilu 1955. Ada usaha dari PKI untuk membuat Lekra menjadi bagian dari tubuh PKI, tetapi hal ini ditolak oleh Lekra. Lekra tetap berdiri sendiri dan tidak memihak kepada PKI atau organisasi lainnya. Lekra Surakarta memiliki peran yang cukup banyak dalam memajukan kegiatan kebudayaan di Surakarta. Banyak kegiatan seni dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Lekra, seperti tari, musik, drama dan *drum band*. Pelatihan ini ditujukan untuk masyarakat umum tidak terbatas pada anggota Lekra saja. Setelah peristiwa G 30 S Lekra Surakarta mengalami kemunduran bahkan kehancuran tanpa adanya kesempatan regenerasi di ranah kebudayaan. Hal ini disebabkan karena Lekra dianggap sebagai bagian dari PKI.

**LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT (LEKRA)  
DI SURAKARTA TAHUN 1950 – 1965**

Andika Krisna Wijaya<sup>1</sup>  
Dr. Wartyo, M.Hum.<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

2011.. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini membahas tentang perkembangan Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Surakarta Tahun 1950 – 1965. Permasalahan yang dikaji meliputi perkembangan Lekra Surakarta menjelang Kongres I Lekra, peran Lekra Surakarta baik dalam kegiatan yang bersifat kebudayaan ataupun yang bermuatan politik hingga kondisi Lekra Surakarta menjelang dan sesudah peristiwa September 1965.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi dan yang terakhir adalah historiografi. Sumber digali melalui studi dokumen yaitu surat kabar seaman seperti : *Harian Rakjat*, *Antara*, *Duta Masyarakat*, *Dwi Warna*, *Kedaulatan Rakjat*, *Nasional*, *Kompas*, *Berita Judha* yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional dan wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku sejarah. Selain itu dilengkapi pula sumber-sumber yang didapat dari buku-buku referensi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tema yang diambil oleh penulis. Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di Surakarta ini berperan aktif dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat kebudayaan ataupun politik. Secara organisasi maupun pribadi anggotanya, Lekra seringkali

mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak dengan dasar untuk mengembangkan seni budaya Indonesia yang revolusioner. Lekra pada perkembangannya memiliki kedekatan dengan PKI. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan pandangan dan pemikiran dalam hal revolusi kebudayaan Indonesia. Melalui surat kabar *Harian Rakjat*, PKI memberikan ruang kepada seniman Lekra untuk berkarya. Lekra sendiri juga ikut membantu PKI dalam merebut simpati rakyat dalam Pemilu 1955. Ada usaha dari PKI untuk mebuat Lekra menjadi bagian dari tubuh PKI, tetapi hal ini ditolak oleh Lekra. Lekra tetap berdiri sendiri dan tidak memihak kepada PKI atau organisasi lainnya. Lekra Surakarta memiliki peran yang cukup banyak dalam memajukan kegiatan kebudayaan di Surakarta. Banyak kegiatan seni dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Lekra, seperti tari, musik, drama dan *drum band*. Pelatihan ini ditujukan untuk masyarakat umum tidak terbatas pada anggota Lekra saja. Setelah peristiwa G 30 S Lekra Surakarta mengalami kemunduran bahkan kehancuran tanpa adanya kesempatan regenerasi di ranah kebudayaan. Hal ini disebabkan karena Lekra dianggap sebagai bagian dari PKI.

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah dengan NIM C.0503010.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seni sebagai salah satu bentuk dari kebudayaan memiliki posisi tersendiri dalam perkembangan masyarakat. Tidak sekedar perwujudan ide dan cetusan pikiran saja, melainkan juga sebatas cermin untuk melihat realita sosial yang terjadi. Bentuk yang lebih terstruktur dalam mengaggas seni sebagai cermin sosial adalah organisasi seni budaya.

Dalam konteks sosial politik, seni budaya menjadi salah satu mesin propaganda kebijakan pemerintah. Pada masa Demokrasi Terpimpin, lembaga seni budaya banyak yang berafiliasi dengan partai. Apalagi setelah Soekarno mengeluarkan pernyataannya yang dikenal dengan Manipol (Manifesto Politik). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa seni budaya telah dimanfaatkan secara ekstensif sebagai alat tindakan politik. Hampir dapat dipastikan partai politik yang berbasis massa besar hingga yang terkecil memiliki lembaga seni budayanya masing-masing.

Kehadiran seniman dan karya seni diharapkan dapat mengundang massa sebanyak mungkin sehingga dengan mudah dapat dilakukan agitasi dan propaganda kepentingan sejumlah partai politik. Seniman di dalam dunia yang ditekuninya dapat menjadi *agent of change* bagi masyarakat di sekitarnya. Kesenian telah lama diyakini sebagai suatu alat untuk menyingkap tabir kebenaran, sedangkan seniman melalui daya kreativitasnya seringkali mendahului

*commit to user*

perkembangan masyarakat, dan kemudian mematangkan untuk perkembangannya itu.<sup>1</sup>

Untuk urusan seni budaya, Berdirinya Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) pada tanggal 17 Agustus 1950 merupakan wujud nyata usaha melebarkan paham realisme sosialis di kalangan seniman, budayawan serta rakyat. Lekra yang didirikan oleh A.S. Dharta, M.S. Ashar, Henk Ngantung, Joebar Ajoeb dan Nyoto dimaksudkan untuk memberi reaksi keras terhadap gejala perubahan haluan politik penguasa saat itu.<sup>2</sup> Lekra menyadari bahwa Rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan, dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat. Hal itulah yang menjadi dasar pendirian Lekra. Pendirian ini terjadi di tengah-tengah proses perkembangan kebudayaan yang sebagai hasil keseluruhan daya upaya manusia secara sadar untuk memenuhi, setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya. Sehingga bagi Lekra, seni tak hanya untuk seni, tapi seni untuk rakyat.<sup>3</sup>

Lekra pun dikenal sebagai sebuah organisasi kebudayaan Indonesia yang paling besar keanggotaannya dan yang kegiatannya merakyat, yang melakukan kegiatan untuk melaksanakan prinsip: "Kebudayaan Dari, Dan Untuk Rakyat". Tidak dapat disangsikan lagi bahwa pada akhirnya berkat kedekatan dan persamaan pandangan politik lembaga budaya (Lekra) ini, PKI (Partai Komunis

---

<sup>1</sup> Ahmad Norma, 1998, *Seni, Politik dan Pemberontakan*, Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm.67.

<sup>2</sup> Pramoedya Ananta Toer, 2003, *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia*, Jakarta: Lentera Dipantara, hlm. 92-93.

<sup>3</sup> Eka Kurniawan, 2002, *Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis*, Yogyakarta: Jendela, hlm.90-91.

Indonesia) banyak mendapat simpati dari masyarakat terutama kalangan orang-orang kecil dan buruh. Seni untuk rakyat menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan negara yang revolusioner, maka kebudayaan harus dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan semangat kerakyatan itu sendiri. Hal ini bukan berarti seni harus mengabdikan diri kepada partai politik tertentu, melainkan mengabdikan diri kepada arah revolusioner.<sup>4</sup>

Lekra bekerja khusus di lapangan kebudayaan, dan untuk masa ini terutama dilapangan kesenian dan ilmu. Lekra menghimpun tenaga dan kegiatan seniman-seniman, sarjana-sarjana, pekerja-pekerja kebudayaan lainnya. Lekra membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masyarakat. Lekra mengajak pekerja-pekerja kebudayaan untuk dengan sadar mengabdikan daya cipta, bakat serta keahlian mereka guna kemajuan Indonesia, Kemerdekaan Indonesia dan pembaruan Indonesia.

Lekra adalah salah satu organisasi seni budaya yang besar dan berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Oleh karenanya organisasi ini rentang dikaitkan dengan PKI. Hal ini dikarenakan tujuan dari garis perjuangan PKI dengan Lekra memiliki kemiripan, yaitu sama-sama untuk menentang imperialisme serta berbasis kerakyatan. Padahal Lekra memang berdiri sendiri, lepas dari rekomendasi partai apapun. Lekra juga mencoba mengetengahkan seni kedalam kehidupan masyarakat yang berarti memecah sistem feodalisme dalam tubuh seni itu sendiri. Dalam pelaksanaan kerjanya Lekra melibatkan seniman dan budayawan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanannya, roda

---

<sup>4</sup> Soedarsono, 2003, *Seni Pertunjukan dari Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 216-217.

organisasi Lekra telah mencampur adukkan antara berkesenian dan berpolitik praktis. Sulit dipisahkan garis batas yang jelas antara kerakyatan yang ingin diperjuangkan oleh seniman sejati dan kerakyatan yang ingin diperjuangkan oleh seniman aktivis, partisipan partai.

Persamaan pandangan Soekarno dan Lekra adalah persamaan pandangan yang menggambarkan kondisi nyata bahwa produk-produk kapitalis (khususnya produk Amerika), membawa dampak negatif yang harus dibendung. Sebagaimana seni dan budaya yang datang dari luar negeri, mesti disaring dan dibendung dengan seni dan budaya dalam negeri. Sehingga dalam pandangan Lekra, politik tanpa budaya tetap masih berjalan. Tetapi budaya tanpa politik tidak bisa berjalan sama sekali.<sup>5</sup> Seni budaya yang tidak berpolitik hanya akan meninabobokan karena seni tumbuh di ruang yang berbau keindahan saja dan tidak mencerdaskan. Sebaliknya seni budaya yang didukung oleh politik akan berguna bagi masa depan seni dan negara itu sendiri.

Dalam pandangan pendiri Lekra, Nyoto, Jika politik dihindari, maka kita akan digilas mati olehnya. Oleh sebab itu dalam hal apapun dan kapan saja pun, politik harus menuntun segala kegiatan Lekra. Politik dalam pandangan Lekra adalah politik revolusi yang didengungkan Soekarno. Bukan politik yang didengungkan oleh PKI.

Politik sebagai panglima diposisikan seniman-seniman Lekra sebagai parameter penilaian terhadap karya seni. Karena itu, seniman tidak menempatkan diri sebagai pengabdian melulu artistik-estetik. Kemerdekaan tidak diartikan sebagai

---

<sup>5</sup> Jeanne S Mintz, 2002, *Muhammad, Marx dan Marhaen*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm.218  
*commit to user*

keleluasan dalam lingkaran berkesenian, tanpa kesadaran peran seni sebagai media tuntunan. Seniman tidak boleh menempati peran sebagai alat penguasa, dan sebaliknya ia harus selalu berbaur dengan segenap keberagaman masyarakat.<sup>6</sup>

Hubungan erat antara partai politik dan organisasi seni budaya menyebar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali Surakarta. Kondisi Surakarta mendukung penuh pertumbuhan Partai Komunis Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan Sarekat Islam dan kemudian penyebaran kekuatan SI Merah dari Semarang ke Surakarta. Kekuatan massa “merah” yang dibangun pada masa kolonial didukung oleh banyaknya simpatisan kaum abangan maupun kelas masyarakat lain.<sup>7</sup> Pertumbuhan itu telah mengakar sejak masa kolonial sampai pecahnya pemberontakan PKI Madiun 1948. Bahkan ketika status daerah istimewa diberikan kepada Surakarta, dua hari setelah kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Raja-raja diberi kekuasaan otonom atas daerahnya, tetapi di Surakarta otonomi itu ditentang oleh rakyat. Kerusuhan melanda Surakarta. Protes rakyat Surakarta itu akhirnya diakomodasi oleh pemerintah pusat dengan penghapusan Swapraja Surakarta.<sup>8</sup> Pada Pemilu tahun 1955, PKI mendulang suara yang cukup signifikan di wilayah Surakarta. Di Jawa tengah, suara PKI, PNI, Masyumi dan NU saling berlomba. Sebagai partai yang pernah terkena stempel buruk pemberontakan 1948 di Madiun, prestasi PKI pada pemilu 1955 membuat lawan politiknya cemas. PKI masuk pada urutan keempat dalam perolehan suara,

---

<sup>6</sup> Pramoedya Ananta Toer, *loc.cit*, hlm, 98-99.

<sup>7</sup> Soe Hok Gie, 1999, *Di bawah Lentera Merah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm. 12  
*commit to user*

<sup>8</sup> Benedict Anderson. 1988. *Revolusi Pemoeda*. Sinar Harapan: Jakarta, hlm 138.

setelah PNI, Masyumi dan NU. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKI menduduki peringkat ke 3 setelah PNI dan NU.<sup>9</sup>

Hasil Pemilu tahun 1955 dapat mencerminkan kekuatan riil partai politik di Surakarta. Jika secara nasional terdapat lima (4) partai besar yang memenangkan Pemilu yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka di Surakarta tidak jauh berbeda. Dari 123.653 suara yang sah, PKI memperoleh 70.808 suara atau 57,26%. Disusul dengan PNI yang mendapatkan 37.144 suara atau sekitar 30% lebih, sedangkan Masyumi mendapatkan 13.733 suara atau sekitar 11,10% dan yang terkecil NU hanya memperoleh 1.998 suara atau 1,61%. Berdasarkan hasil itu, PKI memenangkan Pemilu di seluruh kecamatan. Kemenangan PKI terbesar diraih di Kec. Laweyan yaitu 16.935 suara atau 67,48%; disusul dengan Kec. Jebres sebesar 15.802 suara atau 65,48%; Kec. Serengan sebesar 10.084 suara atau 57,26%; Kec. Pasar Kliwon sebesar 12.143 suara atau 52,18% dan yang terendah di Kec. Banjarsari sebesar 15.856 suara atau 47,05%.<sup>10</sup>

Kemenangan PKI dalam Pemilu 1955 ini mengantarkan Oetomo Ramelan seorang kader PKI terpilih menjadi Kepala Daerah Kotapraja Surakarta pada 17 Februari 1958. Ini membawa konsekuensi bahwa Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Kotapraja Surakarta sebagian besar diisi oleh kader dan simpatisan PKI. Sehingga akses politik di tataran elit kota Surakarta dikuasai para pendukung PKI.

---

<sup>9</sup> Ricklef, 2007. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*, Jakarta: Serambi, hlm. 496-497

<sup>10</sup> “Kemenangan PKI (Surakarta dari kemerdekaan sampai awal Orde Baru 3)”. Diunduh dari <http://blog.pasarsolo.com/document/duto-sri-cahyono/415/kemenangan-pki-surakarta-dari-kemerdekaan-sampai-awal-orde-baru-3.html>. tanggal 20 Mei 2010. Pukul. 19.35 WIB

Kematangan kekuatan PKI pasca pemilu 1955 di Surakarta membuat akses aktivitas partai ini semakin naik. Karena kedekatan pemikiran organisasi antara PKI dan Lekra, Lekra hadir ke tengah masyarakat dengan cukup mudah. Faktor kemudahan dalam urusan birokrasi ini pula yang kemudian menjadi salah satu alasan diselenggarakannya Kongres Nasional I Lekra di Surakarta. Kongres yang awalnya hendak diadakan pada akhir tahun 1958, diubah menjadi awal tahun 1959. Faktor lain yang mendukung berkembangnya Lekra dan menjadikan Lekra Surakarta berbeda dengan yang lain adalah kantong-kantong Seni budaya di kota Surakarta serta semangat politik masyarakatnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu stimulan pendorong ramainya kongres I Lekra di Surakarta. Tempat-tempat seperti Gedung Wayang Orang Sriwedari, Taman Balaikambang serta Balai kota menjadi ruang ruang kampanye kegiatan Lekra selama berjalannya kongres.

Surakarta juga merupakan wilayah yang kental dengan kebudayaan Jawa. Keberadaan Kraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran melegalisasi ragam aktivitas seni dan budaya. Lekra dengan aktivitas seni seperti sastra, pertunjukkan, drumband dan kegiatan lainnya tumbuh subur di wilayah bekas *vorstenlanden* ini. Lekra Surakarta hendak mengetengahkan seni yang layak saji untuk rakyat. Seni dan budaya kraton terkesan hanya milik para bangsawan Jawa. Sedangkan seni rakyat, meskipun disajikan untuk rakyat tapi penyajiannya hanya setengah-setengah.

Kekuatan Lekra sekitar Surakarta sebenarnya juga patut diperhitungkan. Lekra Jogja misalnya penuh dengan para seniman dan budayawan yang terhitung banyak dan kaya akan karya. Tetapi garis kekuatan PKI di Jogja tidak sekuat di

Surakarta. Sama halnya dengan keberadaan Lekra Klaten dan wilayah karesidenan Surakarta lainnya. Kekuatan Lekra memang tumbuh tetapi fokus gerakan lebih kepada mobilisasi buruh dan tani. Meskipun DN Aidit tidak hadir dalam kongres, kehadiran Ir Soekarno di acara ini menegaskan dukungan Soekarno pada PKI cukup besar. Gelar acara akbar Lekra ini sekaligus menandakan unjuk kekuatan para seniman dan budayawan pendukung Lekra serta para perwakilan negara luar.

Lekra sendiri secara organisasi memang terpisah dari PKI. Meskipun demikian, Lekra seringkali mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak. Selain dengan PKI, Lekra juga menggelar kerjasama dengan lembaga-lembaga seni budaya yang lain seperti Lesbumi (Lembaga seni budaya milik NU), LKN (Lembaga seni budaya milik PNI), Okra (Organisasi Kesenian Rakyat) dan lain-lain. Bahkan Lekra pernah beberapa kali bekerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi militer di beberapa kota.

Kongres Nasional I Lekra di Surakarta ini menjadi lompatan baru bagi perjalanan Lekra. Kongres digelar dengan tujuan merapatkan kembali barisan penggema “seni untuk rakyat”. Seperti awal mula Lekra didirikan yaitu untuk menyatukan kembali para pegiat seni dan budaya yang terpecah dan kehilangan arah ditengah jalannya revolusi republik Indonesia. Dari kongres ini pula susunan pengurus Lekra kemudian berubah serta munculnya badan semi otonom di tubuh Lekra seperti lembaga film, lembaga tari dan lainnya. Dukungan terhadap kongres ini datang dari berbagai pihak, baik dari pengurus kotapraja Surakarta dan Mangkunegoro VIII selaku Ketua Kehormatan. Perkembangan Lekra di Surakarta yang muncul pada tahun 1950an, kemudian didukung pula oleh kemunculan

kelompok Ketoprak dan Ludruk, kelompok seni tari sampai kelompok yang menjunjung musik Keroncong agar lebih maju. Bidang-bidang seni ini pada perkembangannya bersama sama dengan Lekra Surakarta menggelar berbagai acara demi menghidupkan kesenian rakyat.

Pada awal tahun 1960-an, selain Lekra lembaga kebudayaan partai banyak tumbuh subur seperti, LKN (PNI), Lesbi (Partindo), Lesbumi (NU), Laksmi (PSII), Leksi, LKKI (Partai Katolik), ISBM (Muhamadiyah). Saat itu seniman tidak bisa bersikap untuk netral, karena dituntut sikap loyalitas harus berpihak hanya kepada partai. Saat itu para seniman tidak bisa bersikap netral atas keadaan perpolitikan yang berkembang. Pada 19 Agustus 1964, ketika Soekarno berpidato dengan judul, *Tahun Vivere Pericoloso*, Soekarno dengan tegas menyinggung keberadaan seniman Manikebu (Manifesto Kebudayaan) yang tidak sepaham dengan revolusi. Pada tahapan ini Lekra seakan berbelok arah sebagai alat pukul untuk menyerang seniman lain yang berarti pula Lekra melanggar apa yang dipegang dalam Mukaddimah Lekra 17 Agustus 1950. Pasca kejadian tersebut, dalam tubuh Lekra terjadi perdebatan kembali tentang keberadaan Seni budaya dalam arus revolusi.<sup>11</sup>

Persaingan kepentingan di tataran elit pemerintahan yang berujung pada peristiwa G 30 S 1965, membawa dampak besar bagi perkembangan Lekra. PKI yang didakwa sebagai dalang utama dalam chaos politik di pemerintahan menjadi target utama penangkapan dan pembunuhan. Kondisi ini banyak berpengaruh terhadap kondisi Lekra. Semenjak itulah Lekra di berbagai wilayah Indonesia

---

<sup>11</sup> Agus Dermawan T, 2004, *Bukit Bukit Perhatian; Dari Seniman Politik, Lukisan Palsu sampai Kosmologi Seni Bung Karno*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm 16-17.

termasuk Lekra Surakarta mengalami kemunduran. Terkait dengan segala perkembangan seni budaya dan politik tersebut, perkembangan dan peran Lekra Surakarta dalam menghidupkan dunia seni budaya menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memahami perkembangan Lekra di Surakarta.

### **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengungkap Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di Surakarta tahun 1950-1965. Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah Kondisi Lekra Surakarta menjelang kongres I Lekra (1950-1959) ?
2. Bagaimanakah perkembangan dan peran Lekra Surakarta (1960-1964)?
3. Bagaimanakah Kondisi Lekra Surakarta menjelang dan sesudah peristiwa September 1965 (1965-1966)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul Lembaga Kebudayaan Rakyat Surakarta Tahun 1959-1965 adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi Lekra Surakarta menjelang kongres I Lekra (1950-1959), baik kondisi politik, sosial dan budaya.

2. Untuk mengetahui perkembangan dan peran Lekra Surakarta (1960-1964) pasca kongres nasional I di Surakarta.
3. Untuk mengetahui Kondisi Lekra Surakarta menjelang dan sesudah peristiwa September 1965 (1965-1966)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Maksud manfaat atau kegunaan penelitian adalah manfaat langsung ataupun tidak langsung yang diperoleh dari penerapan penelitian. Manfaat tersebut adalah :

1. Sebagai bahan informasi mengenai perkembangan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di Surakarta 1950-1965.
2. Sebagai referensi tentang organisasi seni budaya dan partai politik.
3. Diharapkan tulisan ini dapat berguna dalam rangka memperbanyak tulisan tentang sejarah organisasi seni budaya di Indonesia.

#### **E. Kajian Kepustakaan**

Membahas perkembangan Lekra tidak sekedar membutuhkan pendekatan Ilmu Sejarah, melainkan juga dibantu dengan pendekatan ilmu politik, sosiologi dan teori keorganisasian. Hal ini dikarenakan Lekra Surakarta merupakan sebuah organisasi yang hadir dalam tiga ranah, organisasi sosial, organisasi politik dan organisasi kebudayaan. Penelitian mengenai perkembangan dan peran Lekra Surakarta ini mencoba menjawab perkembangan Lekra secara lebih objektif. Lekra bukanlah sebuah organisasi tanpa kelemahan, namun di sisi lain juga

bukanlah organisasi kebudayaan yang patut diremehkan. Peran peran ketokohan di Surakarta terhadap Lekra yang jarang ditemui di buku atau penelitian lain dapat ditemukan di penelitian ini. Begitu juga peranan para seniman surakarta dalam membesarkan kedudukan Lekra itu sendiri.

Penelitian ini juga memerlukan beberapa sumber-sumber yang berupa buku atau hasil penelitian sejarah yang sejenis, dimana isi tersebut dapat membantu penelitian penulis. Buku *Bukit Bukit Perhatian: Dari seniman politik, lukisan Palsu sampai Kosmologi Seni Bung Karno* (2004) karya Agus Dermawan T, dijelaskan mengenai perjalanan politik Indonesia yang didalamnya diramalkan pula oleh para seniman. Lebih khusus lagi seni rupa Indonesia. Bentang waktu yang disajikan dalam buku ini cukup panjang antara tahun 1940 hingga reformasi. Lekra dan seniman-seniman yang berafiliasi ke PKI juga dijelaskan pada beberapa bab. Dibawah PKI berkibarlah Lekra. Dominasi PKI dalam pemerintahan otomatis mengangkat Lekra menjadi organisasi kebudayaan yang paling menonjol. Lekra lebih tegas dan agresif dibandingkan lembaga kebudayaan lain yang juga dibawah afiliasi partai. Image PKI yang terlanjur melekat pada Lekra selalu berusaha dilunturkan oleh Lekra sendiri. Perkembangan Lekra dalam perpolitikan Indonesia hingga nasibnya setelah tragedi pada 1965 ini, dapat menjadi acuan referensi tersendiri.

Dalam buku yang berjudul *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia* Pramoedya Ananta Toer (2003) karya Lentera Dipantara Jakarta menjelaskan pertumbuhan realisme sosialis di Indonesia dari tahapan awal (masa kolonial) sampai menjelang munculnya orde baru. Buku ini merupakan pidato Pramoedya  
*commit to user*

sebagai tamu kehormatan dalam seminar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1963. Lekra merupakan salah satu organ yang banyak disebut dalam buku ini. Sebagaimana Pramoedya juga menyebutkan bahwa proses pertumbuhan sastra politik tak lepas dari kondisi politik yang ada pada waktu itu. Dalam lampirannya, Pramoedya menambahkan hasil konggres nasional pertama Lekra di Surakarta 22-28 Januari 1959. Beberapa sikap organisasi seni budaya lainnya juga dilampirkan yang melengkapi perdebatan sikap seniman mengenai seni budaya itu sendiri. Data dari buku ini dapat menambah Informasi dan wacana mengenai perkembangan Lekra dan sikapnya terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia pada saat itu.

Buku karangan Eka Kurniawan yang berjudul *Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis* (2002) terbitan Jendela Yogyakarta, menjelaskan pula kondisi realisme sosialis di Indonesia. Ditambah dengan data mengenai Pramoedya (yang juga erat kaitannya dengan Lekra), perkembangan seni dan sastra yang berafiliasi dengan politik cukup jelas. Sebagaimana ditulis oleh Albert Camus, bahwa Seni adalah pemberontakan. Dengan gamblang, buku ini menjelaskan saling dorong dan rangkul antara seni dan hegemoni kekuasaan. Seni tidak melulu mengabdikan kepada kekuasaan, tapi tak selalu anti pemerintahan. Seni perlu menemukan independensinya agar tak kehilangan kreativitas. Namun kecenderungan seni mestinya merupakan antitesis dari hegemoni kekuasaan. Lekra ditempatkan di posisi strategis dalam aktivitas berpolitikanya dalam konteks Indonesia. Sampai kemudian pengaruhnya “dihilangkan” seiring dengan ambuknya Orde lama di bawah Soekarno, digantikan dengan kekuasaan Orde

Baru oleh Soeharto. Buku ini mampu melengkapi karya Pramoedyas untuk menambah kejelasan data mengenai perkembangan Lekra di Indonesia.

Basuki Resobowo, dalam *Bercermin di Muka Kaca: Seniman, Seni dan Masyarakat* (2005), mengetengahkan hubungan seni dan politik serta marxisme dan seni di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini mencakup perkembangan seni di Indonesia dari bentukan awal (embrio) pada masa pendudukan Belanda, Jepang dan masa Republik Indonesia, dimana Lekra menjadi bahasan di tiap babnya. Perbincangan antara penulis buku, Basuki Resobowo dan rekan senimannya, Hersri Setiawan menjadi bahasan menarik tatkala menyelami sejarah awal perkembangan gerakan seni dan politik di Indonesia.

Dalam buku ini beberapa bentuk lembaga Seni budaya disebut antara lain Persagi (1938), SIM 1946 (Seniman Indonesia Muda), Lekra 1950 (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan lain lain. Dari ranah pembahasan seni lukis, Basuki Resobowo kemudian melebarkan pembahasan ke dunia seni yang lain, yaitu yang berhubungan dengan kondisi revolusi di Indonesia. Sebagai salah satu senior di Lekra dan juga turut merumuskan konsep-konsep kebudayaan untuk “mukaddimah” Lekra, Basuki Resobowo dan tuturannya dalam buku ini dapat dijadikan salah satu referensi mengenai perkembangan Lekra di Indonesia.

Buku *Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara* (2009), memberikan pembahasan lain mengenai perkembangan Lekra dan hubungannya dengan PKI. Kumpulan tulisan dari Tempo ini juga memberikan bahasan mengenai posisi Njoto sebagai salah satu pendiri Lekra. Secara psikologis Njoto pernah tingga, besar, dan beraktivitas di Surakarta. Hal ini yang secara tidak langsung dapat

menyokong moral gerakan Lekra di Surakarta, sekaligus sebagai salah satu penegas bahwa hubungan Lekra dan PKI sekedar hubungan kesamaan Ideologi, bukan hubungan hirarki partai atau organisasi. Bahkan kondisi tersebut dipertegas ketika Njoto didepak dari PKI menjelang peristiwa 1965 pecah.

Kehidupan Njoto di kota Surakarta juga menjadi referensi menarik untuk memberikan gambaran perihal kegiatan budaya Lekra di Surakarta. Hubungan ini juga merujuk pada ikatan aktivis seniman Lekra dengan beberapa tokoh ningrat Kraton. Njoto sendiri memiliki istri seorang keturunan Kraton Kasunanan. Buku ini mampu menjadi tambahan data dalam menelusuri perkembangan Lekra di Surakarta.

Film Dokumenter *Tjidurian 19: Rumah Budaya Yang Dirampas* besutan M Abduh Aziz merupakan referensi yang berisi tentang wawancara dengan beberapa tokoh Lekra yang pernah aktif di Kantor Lekra Jakarta. Tjidurian 19 tidak lain adalah masrkas utama Lekra di Jakarta seklaigus sanggar seni. Mereka antara lain Putu Oka Sunanta, Martin Aleida, S Anantaguna, Oey Hai Djoen, Jean Luyke, Amrus Natalysya, Hersri Setiawan, T Iskandar AS, dan Amarzan Loebis. Dalam dokumenter berdurasi 40 menit ini, tokoh-tokoh tersebut memaparkan kehidupan Lekra dan berbagai pahit manisnya. Termasuk kisah hidup mereka masing masing. Hubungan seni dan politik serta hubungan antara Lekra dan PKI pun juga dibahas. Film dokumenter ini dapat memberikan tambahan mengenai kehidupan Lekra dengan sisi lainnya; Seni, Politik dan Sisi manusia para tokoh Lekra.

Sepuluh Narasumber eks tapol Surakarta memberikan kesaksiannya dalam *Oral History* mengenai peristiwa 1965 di Surakarta. Buku dengan judul *Kidung untuk Korban* (2006) dikeluarkan oleh Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) Surakarta untuk menyusun penggalan sejarah Surakarta yang belum banyak diketahui banyak orang. Sepuluh narasumber tersebut antara lain Lingkar Tuter Perempuan, Sarbinatun (Lekra), Subandi (Guru SD), Sumidi (Pengusaha Batik), Paulina Sriningsih (Gerwani), Suprpto (pegawai jawatan gedung), Bibit (Penari genjer-genjer), Christina Sriharyati (Pemuda Rakyat), Sri Slamet (Guru SD), dan Supeno (guru teknik/PGTI). Buku ini dapat memberikan informasi mengenai kejadian 1965 sekaligus sebagai pelengkap data dalam lingkup lokal perkembangan politik 1965 di Surakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Studi ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan perangkat metode penelitian sejarah, yaitu :

### 1. Pengumpulan sumber (Heuristik)

Proses heuristik dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen yang berupa surat kabar maupun risalah yang ditulis orang-orang pergerakan. Arsip yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain surat kabar sejawan atau dokumen pendukung lainnya, yang dapat ditemukan salah di Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Sumber data lain yang dapat memperkuat penelitian adalah

wawancara dari beberapa narasumber langsung ataupun yang hidup sejaman dengan tema penelitian.

## 2. Verifikasi (Kritik Sumber).

Kedua adalah melakukan kritik sumber (verifikasi). Kritik ini bertujuan mencari otentisitas/keaslian yang diperoleh dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik dipergunakan untuk mencari keaslian teks dalam sumber, sedang kritik ekstern bertujuan mencari keaslian bentuk sumber. Berhubung sumber yang dipakai kebanyakan berwujud mikrofilm maka proses ini hanya dipakai untuk mencari otentisitas sumber yang masih asli. Berbagai sumber terkait dengan Lekra baik arsip maupun surat kabar sezaman dikaitkan secara faktual. Fakta fakta yang terdapat didalam sumber sumber tersebut juga ditanyakan dalam wawancara dengan beberapa narasumber. Fakta yang didapat secara lisan dari narasumber juga dipertemukan dengan fakta dari narasumber lain. Sehingga baik yang didapat dari sumber tertulis ataupun sumber lisan memiliki kekuatan data yang kuat.

## 3. Interpretasi

Proses selanjutnya adalah interpretasi. Usaha ini merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari data-data yang telah diseleksi dan dilakukan kritik sumber. Proses memegang peranan penting bagi terjalannya fakta-fakta menjadi kisah sejarah yang utuh. Metode Analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptis analitis menggambarkan sebuah fenomena dengan ciri-cirinya yang terdapat di dalam fenomena tersebut berdasarkan fakta-

fakta yang ada. Setelah itu dari bahan dokumen dan studi pustaka, tahap selanjutnya adalah diadakan analisis, diinterpretasikan dan ditafsirkan isinya apa adanya. Data-data yang telah diseleksi dari uji kebenarannya itu adalah kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### 4. Historiografi

Proses terakhir adalah historiografi. Historiografi ini merupakan klimaks dari sebuah metode sejarah.<sup>12</sup> Di sinilah pemahaman dan interpretasi atas fakta-fakta sejarah itu di tulis dalam bentuk kisah sejarah yang menarik dan masuk akal. Dalam hal ini historiografi adalah penulisan skripsi ini.

Pendekatan ilmu sosial yang dipakai dalam penulisan sejarah ini adalah pendekatan sosial politik. Mengingat Lekra memiliki hubungan dekat dengan PKI, maka aktivitas Lekra yang berbau seni dan budayapun tak luput dari langkah propaganda dari kepentingan politik partai. sehingga penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa dan bilamana peristiwa sejarah itu terjadi, melainkan juga mengidentifikasikan mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa terjadi serta pengaruhnya dari sudut sosial politik tanpa harus mengabaikan dimensi ruang dan waktu.

Empat tahapan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain.<sup>13</sup> Diharapkan metode ini membantu memecahkan gejala-gejala kejadian di masa

---

<sup>12</sup> Sartono Kartodirjo, 1982, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hal. 58.

<sup>13</sup> Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm 95.

lampau secara ilmiah, untuk menentukan spesifikasi yang berguna dalam usaha untuk memahami sebuah kenyataan sejarah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Dimana tiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang menjelaskan sejarah perkembangan Lekra Surakarta. Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari 'Latar Belakang Masalah', 'Perumusan Masalah', 'Tujuan Penelitian', 'Manfaat Penelitian', 'Kajian Kepustakaan', 'Metode Penelitian', dan 'Sistematika Penulisan'.

Bab kedua berisi tentang kondisi Lekra Surakarta dan kondisi sosial budaya di Surakarta 1950-1959. Pasca pembentukan Lekra pada 17 Agustus 1950, Lekra segera mengembangkan sayapnya ke berbagai daerah. Termasuk juga ke Surakarta dan beberapa wilayah lain yang menjadi kantong-kantong kekuatan PKI. Sebagai bentuk partisipasi Lekra dalam kebudayaan, Lekra Surakarta juga turut serta dalam berbagai bentuk kegiatan baik yang bersifat budaya maupun politik.

Bab ketiga menjelaskan seputar perkembangan dan peran Lekra Surakarta pasca kongres nasional Lekra pertama di Surakarta. Kongres ini memunculkan berbagai sikap dan pandangan aktivis Lekra terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sikap dan arah perubahan Lekra semakin spesifik dan berkiblat pada politik.

Pada Bab keempat membahas kondisi Lekra di Surakarta menjelang pecahnya gerakan September 1965 oleh PKI. Sebagaimana diketahui pasca peristiwa berdarah tersebut, baik PKI dan termasuk Lekra menerima konsekuensi politik dengan adanya pembersihan orang-orang pro revolusi atau pro Soekarno.

Bab kelima terdiri dari kesimpulan yang menjawab dari perumusan masalah dan juga terdapat analisa sejarah yang membahas penelitian ini.



## BAB II

### KONDISI LEKRA SURAKARTA DAN KONGRES NASIONAL LEKRA I 1950-1959

Periode 1945-1950 di bidang kebudayaan ditandai oleh betapa banyaknya seniman, sarjana dan pekerja-pekerja kebudayaan lainnya yang memihak dan memberikan sumbangan pada revolusi. Pekerja-pekerja kebudayaan menyatu dengan revolusi dan karena revolusi 1945 adalah suatu revolusi kerakyatan, maka hal ini berarti bahwa pekerja-pekerja kebudayaan satu dengan rakyat, tetapi partisipasi atau keikutsertaan mereka itu di dalam revolusi masih bersifat spontan. Kespontanan ini tentu tidak hanya dilahirkan oleh intuisi, tetapi juga oleh kesadaran tertentu. Dalam hal ini kespontanan tersebut baik, tetapi juga membawa segi yang lain yaitu belum teratur, belum terorganisasi. Singkatnya, belum terpimpin dan sebagai akibatnya, belum mengenai sasaran yang tepat, sehingga efek dan hasilnya belum cukup maksimal.

Perjanjian KMB pada tahun 1948, membawa dampak kemunduran dalam bidang kebudayaan. Belanda pasca penandatanganan KMB, berusaha dengan giat untuk mempertahankan gengsi dan politik kolonialnya, karena KMB merupakan awal kembalinya kolonialisme dalam bentuk baru<sup>1</sup>. Pekerja kebudayaan Indonesia kehilangan jiwa dan semangat nasionalismenya karena proses penciptaan kesenian mematok kebudayaan barat sebagai kiblat. Akibatnya, unsur emosi dan estetika yang cenderung subjektif, menjadi dominan dalam proses penciptaan seni budaya.

---

<sup>1</sup> Usaha Belanda diantaranya adalah dengan mendirikan lembaga kebudayaan bernama Sticusa (*Stichting Cultureel Samenwerking*) yang memberikan beasiswa bagi seniman Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hersi Setiawan, Ketua Lekra Jawa Tengah 1959-1960.

Lekra didirikan tanggal 17 Agustus 1950 disaat revolusi tertahan oleh rintangan hebat yang berwujud persetujuan KMB, atau Lekra berdiri ketika garis revolusi sedang menurun. Pada saat itu, orang-orang kebudayaan yang tadinya satu kepalan tangan yang tegak di pihak revolusi menjadi terkotak-kotak dalam golongannya masing-masing. Mereka yang tidak setia pada garis revolusi, akhirnya menyeberang ke arah lain. Yang lemah dan ragu-ragu seakan-akan putus asa karena tidak tahu jalan. Yang taat dan teguh meneruskan pekerjaannya dengan keyakinan bahwa kekalahan revolusi hanyalah kekalahan sementara. Lekra didirikan untuk turut mencegah kemerosotan lebih lanjut dari garis revolusi, karena tokoh-tokoh Lekra sadar bahwa garis revolusi ini bukan hanya milik kaum politisi, tetapi juga tugas pekerja-pekerja kebudayaan. Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan yang taat dan teguh mendukung perjuangan revolusi.<sup>2</sup>

Perkembangan awal Lekra tidak dapat lepas begitu saja dari tangan Njoto, salah satu dari pemimpin besar PKI pada masa itu selain DN Aidit dan Lukman. Tahun 1950, Njoto bertemu dengan para pelukis dan penulis yang beraliran kiri. Mereka mendiskusikan tentang peranan seni dalam perjuangan kelas. Njoto menganjurkan perpaduan antara tradisi besar realisme kritis dan romantisme untuk membuat kesenian yang menampilkan kenyataan sosial menuju proses perubahan revolusioner. Njoto memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi kalangan intelektual dan seniman. Affandi, Soedjojono, Rivai Apin, Pramoedya Ananta Toer, adalah beberapa dari mereka yang mengagumi Njoto.

Pada 17 Agustus 1950, beberapa sastrawan dan seniman berkumpul untuk membahas pendirian Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Termasuk Njoto, para penggagas awal yang ikut terlibat antara lain: AS Dharta, MS Ashar, dan DN Aidit, ditambah beberapa nama yang muncul belakangan seperti Herman Arjuno, Henk Ngantung, serta Joebar Ajoeb. Dalam piagam Lekra, dimana Njoto tercatat sebagai salahseorang pencetusnya, tertulis: "Lekra bekerdja khusus di lapangan kebudayaan, terutama di lapangan kesenian dan ilmu. Lekra membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masyarakat."

Meskipun tokoh-tokoh Lekra dekat dengan PKI, dan sebagian menjadi anggota maupun pengurus PKI, namun Lekra tidak bias serta merta dikaitkan dengan eksistensi partai komunis terbesar di Indonesia itu. Aidit sendiri pada awal dibentuknya Lekra, sedang menjalani masa hukuman selama 2 minggu percobaan 6 bulan bersama Lukman. Keduanya dijatuhi hukuman karena melanggar pasal 472 undang-undang hukum pidana mengenai persoalan penumpang gelap. Seperti diketahui, Aidit dan Lukman menumpang kapal dari Hongkong tanpa menggunakan tiket dan surat-surat resmi. Singapura pada saat itu sedang aktif melakukan pembersihan terhadap tokoh-tokoh kiri sehingga Aidit dan Lukman yang sedang berada disana segera kembali ke tanah air meskipun kehabisan uang. Keduanya sampai di Tanjung Periok dengan kapal Tjitjalangka pada 23 Juli 1950.<sup>3</sup>

Awalnya, di setiap pekan Lekra menerbitkan lembaran kebudayaan lewat majalah Zaman Baru yang terbit di Surabaya. Lembaran itu dikelola oleh

Njoto dengan nama pena Iramani, AS Dharta alias Klara Akustia, dan MS Ashar. Berkat lembaran kebudayaan itu, populeritas Lekra menanjak dengan cepat. Hanya setahun setelah berdiri, Lekra sudah memiliki cabang di 20 kota. Pada 1951, Njoto bersama Mula Naibaho dan Supeno, memimpin surat kabar *Harian Rakjat*. Dengan gelar andalan Iramani, Njoto rutin menulis editorial, pojok, tajuk rencana, atau kolom Catatan Seorang Publisist.

Berbeda dengan Manikebu yang menjadikan kemanusiaan dan kebebasan sebagai nilai tertinggi kesenian, kelompok Lekra menjadikan “politik sebagai panglima”. Maxim Gorki yang sering kali dikutip (diilhami pandangan Marxisme-Leninisme) menandakan bahwa sastra tak pernah berada di luar politik. Ini berangkat dari pandangan, bahwa kehidupan terbangun dari perjuangan kelas yang manifestasinya adalah politik, dan karena kehidupan dikuasai perjuangan kelas, tak seorang pun dapat mengelak dari pergulatan politik yang ada di dalamnya.

Sastrawan yang bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang didirikan tanggal 17 Agustus 1950, tegas berpihak kepada rakyat dan mengabdikan kepada rakyat, dan dengan demikian atas dasar “seni untuk rakyat” seperti dinyatakan “mukadimah Lekra” (1950) – menolak aliran “seni untuk seni” yang menurutnya dianut kelompok Manikebu.

Gambaran kritis kelahiran Lekra itu berhasil digambarkan Joebaar Ajoeb dalam "Laporan Umum"-nya di Kongres I Lekra:

Lekra didirikan tepat 5 tahun sesudah Revolusi Agustus petjah, disaat revolusi tertahan oleh rintangan hebat yang berudjud persetujuan KMB, djadi, disaat garis revolusi sedang menurun. Ketika itu perang-perang kebudayaan yang tadinja seolah-olah satu kepalan tangan yang

tegak dipihak Revolusi, mendjadi tergolong-golong. Mereka jang tidak setia, menjebrang. Jang lemah dan ragu seakan putusasa karena tak tahu djalan. Jang taat dan teguh meneruskan pekerdjaannya dengan kejakinan bahwa kekalahan revolusi hanjalah kekalahan sementara.<sup>4</sup>

Lekra muncul untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut dari garis Revolusi. Tugas ini diyakini tak boleh hanya dibebankan kepada kaum politisi, tapi juga menjadi tugas pekerja-pekerja kebudayaan. Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan yang taat dan teguh mendukung Revolusi dan kebudayaan nasional.

Sikap Lekra sudah terlihat kukuh saat arena Kongres Kebudayaan II dibuka di Bandung pada 6 Oktober 1951. Kongres yang diselenggarakan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) ini menjadi perdebatan sengit, terutama sekali antara golongan idealisme atau individualisme dan realisme atau kolektivisme. Lekra melepas para pendebatnya antara lain Djoebaar Ajoeb (pendebat ihwal Organ Kebudayaan), A.S. Dharta (pendebat perkembangan kesusasteraan), Boejoeng Saleh (pendebat kritik seni), Herman Arjuna (pendebat hak pengarang), serta Sunjata dan M Isa (pendebat sensor film).

Lekra mempertanyakan pencarian bentuk kebudayaan nasional yang mesti memberi kepuasan pada setiap orang tanpa harus mengujinya secara matang apakah pendapat dan pendirian itu benar-benar berakar dalam masyarakat dan merupakan pendapat dan pikiran Rakyat banyak (nasional). Konsep ini telah diusung Lekra setahun sebelum Kongres kebudayaan dilaksanakan. Dalam pendiriannya, Lekra berpendapat bahwa rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan karena itulah seni harus dimaksimalkan untuk rakyat.

---

*commit to user*

<sup>4</sup> *Harian Rakjat* 31 Januari 1959

Menjadari bahwa Rakjat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan, dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia-baru hanya dapat dilakukan oleh Rakyat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikanlah Lembaga Kebudayaan Rakjat, yang kemudian disingkat Lekra.<sup>5</sup>

### A. Kondisi Sosial Politik Surakarta Tahun 1950-1955

Pada tanggal 19 Agustus 1945 dua daerah khusus di Jawa diberi status swapraja oleh pemetintah Republik Indonesia. Raja-raja diberi kekuasaan otonom atas daerahnya, tetapi di Surakarta otonomi itu ditentang oleh rakyat. Protes rakyat Surakarta itu akhirnya diakomodasi oleh pemerintah pusat dengan penghapusan Swapraja Surakarta.<sup>6</sup>

Gerakan anti swpraja ini tidak hanya muncul dikalangan masyarakat saja tetapi juga tumbuh di lingkungan pegawai swapraja. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan pegawai-pegawai terhadap pembesar-pembesar pemerintahan swapraja. Gerakan ini diikuti dengan lepasnya Kabupaten Klaten pada 26 April 1946, Kabupaten Sragen pada 27 April 1946, Kabupaten Surakarta pada 18 Mei 1946, Kabupaten Boyolali pada 3 Juni 1947 dari pemerintahan Kasunanan.<sup>7</sup> Setelah penghapusan Swapraja Surakarta bentuk pemerintahan daerah tersebut telah berganti berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Surakarta, periode ini dimulai pada tanggal 16 Juni 1946 sampai berlakunya UU no. 16 tahun 1947 tentang pembentukan Hamninte Kota Surakarta tanggal 5 Juni 1947.

---

<sup>5</sup> Paragraf pertama Mukaddimah Lekra. Diunduh dari [www.lontar.ui.ac.id/file?-file=digital/128898-T%2026659...Lampiran tanggal 10 April 2010 pukul 19.48 WIB](http://www.lontar.ui.ac.id/file?-file=digital/128898-T%2026659...Lampiran tanggal 10 April 2010 pukul 19.48 WIB)

<sup>6</sup> Benedict Rob Anderson. 1988. *Revolusi Pemoeda*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm 138.

<sup>7</sup> Pemerintah Kota Surakarta. 2001. *Mosaik Otonomi Daerah Menuju Kota Surakarta yang Mandiri dan Berbudaya*. Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta. Hlm. 16.

2. Haminte Kota Surakarta, periode ini dimulai sejak berlakunya UU no 16 tahun 1947 pada tanggal 5 Juni 1947 sampai berlakunya UU no. 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah tanggal 5 Juli 1948.
3. Pemerintah Kota besar Surakarta, periode ini dimulai sejak berlakunya UU no. 22 tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948 sampai dengan berlakunya UU no. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah tanggal 18 Januari 1957.
4. Pemerintah Kota Swapraja Surakarta, periode ini dimulai sejak berlakunya UU no. 1 tahun 1957 pada tanggal 18 Januari 1957 sampai dengan berlakunya UU no. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah tanggal 1 September 1965 dan diperketat dengan ketetapan MPRS/XX/66 berlaku sampai saat ini.

Setelah pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mulai menata kembali sistem pemerintahannya. Bentuk negara Indonesia sesuai dengan kesepakatan konferensi meja bundar adalah bentuk Indonesia Serikat. Namun bentuk negara Serikat ini berlangsung lama karena 15 Agustus 1950 bentuk negara kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa *Clash II*, NICA yang menduduki Surakarta juga membentuk pemerintah swapraja bagi wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Pemerintahan tersebut dikepalai oleh Susunan Paku Buwono XII dan Mangkunegoro VIII. Pemerintah daerah bentukan NICA itu tidak berjalan efektif karena para gerilyawan pro Republik Indonesia membentuk pemerintahan daerah sebagai wujud keberadaan pemerintah Republik Indonesia.

Surakarta sering disebut sebagai barometer politik nasional. Maksud dari pernyataan itu adalah Surakarta dijadikan indikator untuk mengetahui kondisi politik masyarakat di Indonesia. suatu permasalahan yang kemudian isu nasional dimulai dari Kota Surakarta. Pihak-pihak yang bermaksud menciptakan isu nasional seringkali melemparkan isu di Surakarta terlebih dahulu untuk mengetahui pikiran reaksi masyarakat. Dinamisnya kehidupan politik masyarakat Surakarta bisa dilihat dari reaksi masyarakat atas perkembangan politik yang sedang terjadi.

Sejarah pemilihan umum di Indonesia pada awalnya dimulai pada zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilu nasional sudah diumumkan pada 5 Oktober 1945 dan pada tahun 1946 telah diadakan pemilihan umum di Kediri dan Surakarta.<sup>8</sup> Hasil pemilu di Surakarta pada tahun 1946 telah menghasilkan badan perwakilan rakyat daerah Surakarta dari berbagai elemen yaitu partai, organisasi, dan ditunjuk yang semuanya berjumlah 50 orang anggota. Adapun anggota badan perwakilan rakyat daerah Surakarta dari partai yaitu 6 orang dari Masyumi, 5 orang dari PNI, 2 orang dari Parkindo, 2 orang dari PKRI, 5 orang dari PBI, 2 orang dari Partai Rakyat, 3 orang dari PKI dan 9 orang dari partai Sosialis. Sedangkan unsur organisasi yaitu 2 orang dari organisasi wanita KOWANI, 2 orang dari GLPS dan 2 orang dari kongres pemuda. Sedangkan untuk 15 orang

---

<sup>8</sup> Subagio Reksodipuro. Pemilu 1951 dalam Herbeith Feith . *Pemilu 1955 di Indonesia*. Hlm. 2 *commit to user*

adalah yang ditunjuk. BPRD Kota Surakarta dikepalai oleh Mr. Ishak Tjokroadisoenoerjo atau Siswowedjojo dari partai Masyumi.<sup>9</sup>

Sedangkan anggota DPRD sementara Kota Besar Surakarta pada tahun 1955 berdasarkan peraturan pemerintah no 39 tahun 1950 berjumlah 33 orang anggota yang terdiri dari dua elemen yaitu partai dan organisasi. Adapun anggota DPRD Kota Besar Surakarta yaitu Parkindo, Masyumi, PNI, PKRI, PDR, Murba, PSI, PIR, Partai Rakyat Indonesia Tani, Parindra, Permai dan NU yang masing-masing partai terdapat satu orang anggota. Sedangkan dari unsur organisasi perwakilan dari PKS 1 orang, Perwari 1 orang, Muslimat 1 orang, Aisyiyah 1 orang, GPII putri 1 orang, GPII 4 orang, SBII 1 orang, STII 1 orang, Muhammadiyah 2 orang, Al Islam 1 orang, Pemuda Muslim Indonesia 1 orang, Pemuda Katolik Indonesia 1 orang, Sb Kesehatan 1 orang, Katolik Wandowo 1 orang, Sebda 1 orang dan PGR 1 orang.<sup>10</sup> Perolehan suara pemilu 1955 dapat diketahui bahwa di Jawa kekuatan partai bukan agama lebih besar dari pada partai agama bila dilihat secara keseluruhan.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kekuatan PKI terbagi di Jawa Tengah dan bagian barat Jawa Timur yang merupakan jantung kebudayaan Jawa. PKI muncul sebagai kekuatan besar di Karisidenan Semarang yang terletak di pesisir utara dan empat karisidenan di pesisir selatan yaitu Yogyakarta, Surakarta, Madiun dan Kediri. Di Kota Surakarta pemilu 1955 dari hasil perolehan suara menghasilkan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kotapraja yang berjumlah

---

<sup>9</sup> Arsip DPRD Kota Surakarta hasil pemilu 1946 berdasarkan PP pengganti UU no. 8 tahun 1946.

<sup>10</sup> Arsip DPRD Kota Surakarta tahun 1950 berdasarkan peraturan pemerintah no. 39 tahun 1950.

30 orang yang terdiri dari berbagai partai yaitu PKI 17 orang, PNI 5 orang, Katolik 1 orang, Masyumi 3 orang, Parkindo 1 orang Buruh 1 orang dan Baperki 1 orang. Sedangkan ketua DPRD Kotapraja dari PKI.<sup>11</sup>

### **B. Kondisi Lekra Surakarta Sebelum Kongres Lekra I**

Lekra kemudian menggiatkan aktivitasnya dalam semua bidang kebudayaan. Sebagai organisasi yang tidak hanya bergerak di ranah kultural, namun juga politik, Lekra kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Lekra melakukan rekrutment anggota sebanyak-banyaknya dari kalangan seniman, sastrawan, budayawan, cendekiawan. Gerakan ini terbukti berhasil dimana pada tahun 1954, Lekra tercatat telah mempunyai cabang di berbagai daerah. Lekra pusat memiliki karakter gabungan antara Lekra Lekra cabang. Ciri khas Lekra nasional tentunya adalah memiliki tokoh-tokoh budayawan/seniman yang populer. Lekra cabang memiliki karakter sesuai dengan daerah masing-masing. Lekra Jawa barat mempunyai ciri sebagai penyokong kebudayaan daerah Sunda, Lekra Klaten mempunyai ciri khas pada basis pedalangan, Lekra Surakarta memiliki kekhasan dari seni tari dan seni musik, dan begitu pula Lekra Lekra daerah lain dengan berbagai kekhasan budaya masing-masing. Karakter inilah yang kemudian tergabung dalam Lekra nasional. Sebagai bukti disetiap kongresnya, Lekra selalu melakukan pameran hasil hasil budaya dari tiap daerah dalam berbagai bentuk.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Arsip Anggota DPRD Kotapraja Surakarta berdasarkan UU no 19 tahun 1956 pemilu.  
*commit to user*

<sup>12</sup> *Harian Rakjat*, 20 Desember 1958 dan *Harian Rakjat*, 4 Februari 1959

Menurut Hersri Setiawan, mantan Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah 1959, syarat bergabung dalam Lekra cukup mudah. Mereka yang datang diminta membaca mukadimah Lekra, apabila setuju langsung masuk dan turut serta dalam Lekra. Mukaddimah Lekra ini bisa dikatakan ibarat 'syahadat' atau kesaksian dari Lekra. Lekra meskipun memiliki struktur tetapi tidak pernah mendaftarkan anggotanya. Hal ini disebabkan karena warisan 'masa represif' di waktu lalu, di jaman Belanda, Jepang dan awal Republik (peristiwa 'madiun'), dengan kata lain Lekra sedikit meneruskan prinsip ilegalitas. Menurut hal tersebut, Lekra juga tidak mengeluarkan kartu anggota atau iuran keanggotaan dan sebagainya. Hersri Setiawan bahkan ketika menjabat sebagai petinggi Lekra Jawa Tengah ketika meninjau cabang-cabang di Jawa Tengah yang berjumlah 37 cabang sesuai dengan jumlah banyaknya kabupaten, menggunakan biaya sendiri.<sup>13</sup>

Hal ini juga seperti yang dituturkan oleh Amrus Natalsya bahwa ketika berangkat ke Jakarta untuk menemui Njoto, ia sekaligus membawa lukisan-lukisannya. Njoto membantu menjualkan lukisan lukisan tersebut dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari hari pada pekerja seni di Sanggar lukis milik Amrus. Dengan kata lain, para aktivis Lekra hidup dengan kualitas diri mereka sendiri, bukan dari kas keuangan Lekra.<sup>14</sup>

Surakarta dan Yogyakarta seperti 'berlomba' sebagai daerah-daerah kegiatan kebudayaan rakyat. Surakarta bersandar pada seni tradisional (wayang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hersri Setiawan, Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah 1959, Jum'at 10 Juni 2011, jam 14.00 WIB

<sup>14</sup> Penuturan Amrus Natalsya dalam Dokumenter *Tjidurian 19: Rumah Budaya yang dirampas*.  
*commit to user*

orang dan dalang), Yogyakarta selain seni tradisional (ketoprak) juga seni sastra, drama, paduan suara. Selain itu ada juga Klaten yang terkenal dengan dalang-dalangnya. Alasan Surakarta menjadi lebih terkemuka, karena sejak jaman Belanda Surakarta lebih 'progresif' dari Yogya. Surakarta merupakan kota industri kecil, sedangkan Yogyakarta tumbuh dengan cara lebih agraris.<sup>15</sup> Kekuatan buruh sebagai poros pendukung revolusi selain petani, cendekiawan dan pelajar, terhimpun di Surakarta. Faktor kekuatan buruh ini juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari sejarah Surakarta yang sejak masa kolonial mulai menghidupkan industri di Surakarta. Pertumbuhan industri mendorong munculnya kaum buruh sebagai pelaku utama. Di lain pihak munculnya para aktivis memelopori tuntutan tuntutan mengenai kehidupan yang layak termasuk bagi kaum buruh. Hal yang demikian juga berdampak pada berkembangnya kekuatan progresif, khususnya PKI yang lebih mencolok dibanding Yogya. Itulah yang menyebabkan Surakarta dipilih sebagai tempat untuk kongres nasional Lekra yang pertama. Di luar faktor tersebut, walikota Surakarta saat itu, Utomo Ramelan merupakan budayawan sekaligus sebagai tokoh PKI.<sup>16</sup>

Beberapa tokoh seniman Lekra yang ada di Surakarta diantaranya Md Hadi (pelukis, juga wakil sekum II Lekra Jateng), Purwadi (Sekretaris umum Lekra cabang Surakarta), Karpo (Bagian Organisasi Lekra cabang Surakarta), Sk Wiryono (Esais, Pegawai kantor kebudayaan DIY; Pleno Lekra Daerah Jawa Tengah), Purwadi Hardikartono dan SK Wirjono BA (pengurus Lekra Surakarta

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hersri Setiawan, Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah 1959, Jum'at 10 Juni 2011, jam 14.00 WIB

<sup>16</sup> Dwi Warna, 22 April 1954

1963), Poncopangrawit (ahli karawitan/mantan tapol 1926), dan Rusman (Pemain wayang orang Sriwedari). Ada juga S Anantaguna, pengurus Lekra Pusat yang dulu juga tinggal dan sekolah di Surakarta, sekawan dengan Njoto. Sedangkan seniman, sastrawan dan budayawan Surakarta di luar Lekra antara lain Ws Rendra, Mansyur Samin, Hartoyo Andangjaya, Djadjak Md, Dullah (pelukis istana BK) dan lain lain.<sup>17</sup>

Secara psikologis, ada kedekatan antara tokoh tokoh Lekra dan seniman Lekra dengan Surakarta. Dari tingkat pusat, sebut saja Njoto yang merupakan salah satu pendiri Lekra, pernah tinggal di Surakarta. Ayah Njoto, Raden Sosro Hartono adalah seorang saudagar Batik dan pengusaha jamu keturunan bangsawan di Surakarta. Pada kisaran tahun 1946an, Njoto pindah dari Jember ke Surakarta, dan tinggal di kawasan Kemlayan Wetan Surakarta. Njoto bersekolah di MULO (kini SMU Kristen Mertoyudan). Di Surakarta pula Njoto pernah membentuk grup suara putri dengan salah satu penyanyi adalah Sri Windarti adik Njoto Sendiri. Grup suara ini pernah tampil di stasiun Radio Surakarta. Istri Njoto, Soetarni adalah keturunan dari Kraton Surakarta.<sup>18</sup>

Tokoh lain yaitu Mia Bustam, seorang pelukis perempuan yang tergabung dengan SIM dan Lekra. Mia Bustam merupakan keturunan dari Mangkunegaran Surakarta. Namanya dicatat sebagai anggota Lekra pada kongres I Lekra di Surakarta 1959. Selepas berpisah dengan suaminya yang juga pelukis, Sudjojono,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Hersri Setiawan, Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah 1959, Jum'at 10 Juni 2011, jam 14.00 WIB

<sup>18</sup> TEMPO. 2010. *Njoto: Peniup Saksofon di tengah prahara*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG): Jakarta. Hlm 4-8 dan 72-73

Mia Bustam semakin aktif di Lekra khususnya seni lukis. Selain kedua nama itu, masih terdapat tokoh-tokoh lain seperti walikota Surakarta Utomo Ramelan, Gesang, MD Hadi, Darsi, serta nama nama seniman lain.

Lekra cabang Surakarta pernah dipegang oleh Purwadi, kemudian digantikan oleh Sangidan, dan wakilnya Syamsuri (adik dari Sangidan). Tokoh lain yang tentu saja begitu dikenal adalah Gesang. Gesang pernah mengikuti lawatan ke RRC pada tahun 1962 bersama Hersri Setiawan dan SW Kuntjahjo. Dari kalangan Sri Wedari selain Rusman, juga ada Surono. Selain itu ada juga yang terkait secara hubungan kekeluargaan karena pernikahan seperti istri Rewang (PKI), Sri Kayati, merupakan adik ipar Md Hadi (Lekra).<sup>19</sup>

Gerakan seni budaya jauh tumbuh sebelum Lekra berdiri. Dalam dunia seni stimulus pergerakan seni dan budaya terutama terletak pada tumbuhnya sejumlah asosiasi seniman yang sangat signifikan pada masa itu, setelah Persagi dan Putera di Jakarta. Dua yang paling berpengaruh adalah Seniman Indonesia Muda (SIM) yang berdiri tahun 1946 di Madiun namun kemudian mengalihkan aktivitasnya di Jogja dan Surakarta, Pelukis Rakyat (PR) yang didirikan tahun 1947, Pelukis Indonesia (PI) tahun 1950.<sup>20</sup> SIM didirikan pada tahun 1946 atas inisiatif Sudjojono, Trisno Sumardjo, Sunindyo dan Suradji didirikanlah organisasi Seniman Indonesia Muda (SIM). SIM meliputi bidang seni rupa, sastra, drama, musik, dan tari. Bisa dikatakan ini adalah embrio dari Lekra. Haluan “seni

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hersri Setiawan, Sekretaris Umum Lekra Jawa Tengah 1959, Jum'at 10 Juni 2011, jam 14.00 WIB

<sup>20</sup> Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka: Jakarta. Hlm 294

untuk rakyat” yang tumbuh sebagai tunas di masa SIM, diintensifkan oleh Lekra supaya berkembang lebih sempurna dengan asas politik adalah panglima dan pedoman penciptaan ‘tinggi ideologi dan tinggi mutu artistik, serta tata kerja turun ke bawah (turba/zu den mansen). Pembicaraan mengenai kelangsungan SIM diadakan di Surakarta, namun belum dibentuk organisasi. Hingga kemudian baru muncul di Jogjakarta dan menempati gedung miss ribut. Hubungan sanggar dan seniman dengan dunia politik juga sudah terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya image SIM (Seniman Indonesia Muda -Sudjojono-PKI (Partai Komunis Indonesia), PTPI Pusat Tenaga Pelukis Indonesia)-Sasongko-Acoma (Angkatan Komunis Muda)/Murba (Musyawarah Rakyat Bawah) dan Pelukis Rakyat (PR)-Hendra Gunawan-PNI (Partai Nasionalis Indonesia).<sup>21</sup>

Begitu pula dengan, perhelatan akbar Lekra di Surakarta, yang bukan pertunjukan temu budayawan besar untuk pertama kalinya. Kongres Kebudayaan Nasional yang ke-3 lebih awal melakukan konferensinya di Surakarta tahun 1954. Dari pimpinan pusat Negara yang akan mewakili kongres kebudayaan nasional ke-3 di Surakarta bukanlah Presiden Soekarno melainkan akan dihadiri oleh PM Ali Sastroamidjojo. PM Ali Sastroamidjojo turun di lapangan Banteng Semarang pada 17 September 1954 yang kemudian menggunakan mobil menuju ke Surakarta. Perdana Menteri tidak hadir sendirian melainkan juga ditemani oleh wakil PM Mr. Wongsonegoro, Menteri PPK Mr. Moh Yamin dan Menteri Penerangan Dr. F Lumbun Tobing.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Basuki Resobowo. 2005. *Bercermin di Muka Kaca: Seniman Seni dan Masyarakat*. Ombak: Jogjakarta. Hlm 23 dan 119

<sup>22</sup> *Kedaulatan Rakjat*, 24 Agustus 1954

Kongres kebudayaan ini semula akan digelar pada 30 Agustus 1954 namun pelaksanaannya baru pada bulan September. Alasan pertama pengunduran adalah meningkatnya aktivitas gunung merapi yang menghambat aktivitas dan kedua dikarenakan kendala-kendala teknis dan gangguan persoalan keuangan. Persoalan keuangan ini disebutkan bahwa dana acara belum sampai kepada panitia. Kongres yang hendak dilaksanakan pada tanggal 19 September 1954 ini diajukan sehari menjadi tanggal 18 September 1954 di Taman Sriwedari.<sup>23</sup>

Dukungan dari pemerintah untuk tiap-tiap badan kesenian cukup jitu untuk memancing agar para seniman terus berkarya. Setidaknya dimulai pada tahun 1953. Tiap badan kesenian seperti seni tari, seni rupa, seni pahat, seni suara, sastra dan drama yang sudah berdiri 6 bulan dan anggota-anggotanya terdiri atas warga Negara Indonesia sebanyak 10 sampai 50 orang, akan memberi subsidi dari kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan bila dimintai bantuan. Subsidi tersebut melebihi 60% dari jumlah perongkosan yang benar-benar dikeluarkan oleh badan kesenian yang bersangkutan. Wilayah Jawa Tengah diwakili oleh kementerian P. Siagian.<sup>24</sup>

Surakarta memang seringkali menjadi langganan dalam soal konferensi. Hal ini tidaklah mengherankan karena antusiasme pemerintah kota Surakarta sendiri begitu rajin menawarkan diri dalam berbagai momen-momen besar. Walikota Surakarta, Moh. Saleh, memaparkan, bahwa pada tahun 1954 tercatat setidaknya di Surakarta terselenggara Kongres Kebudayaan Nasional, Kongres PIR, Kongres Pertunanan Seluruh Indonesia, Kongres Palang Merah Indonesia,

---

<sup>23</sup> *Kedaulatan Rakjat*, 16 September 1954

<sup>24</sup> *Nasional* 20 Agustus 1954

dan All Indonesian Congress. Moh. Saleh mengatakan bahwa hal ini tidak mengherankan karena Surakarta merupakan pusat budaya. Selain itu di Surakarta juga pernah berdiri GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) dan Perdi (Persatuan Djurnalisme Indonesia).<sup>25</sup>

Lekra Surakarta aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan acara-acara yang berkaitan dengan momen tertentu. Sebagai lembaga yang mengusung garis revolusioner, Lekra terlibat dalam panitia 1 Mei Surakarta tahun 1954, bersama dengan SOBSI, partai dan organisasi massa yang lain. Bentuk panitia 1 Mei 1954 kota besar Surakarta tersebut juga melibatkan 17 organisasi/perseorangan sebagai intinya. Kepanitiaan 1 Mei 1954 yang beralamat di Hotel Merdeka kamar No 41 dan 42 telpon no. 246 Surakarta adalah sebagai berikut :

Sekretaris Umum I	: Sangidan SBPI
Sekretaris Umum II	: Slamet SBKA
Sekretaris III	: Suwarno SOBSI
Perbendaharaan	: Suwito (pengusaha nasional) : Suparwi (pemuda rakyat)
Rapat-Aksi	: Suharto SBIM : Sunardi PERSEBSI
Penerangan	: Sridadi SBRI : Hudijanto SBRI
Kebudayaan	: Kasnosubroto SBPU : Trisnoyo LEKRA
Kesehatan	: Munandar SB Apotek : Muljatmo SB Textiel
Angkutan	: Djojopawiro SBKB

<sup>25</sup> Dwi Warna, 7 Januari 1955

Tata Tertib : Hadiwidjojo SBKI  
: Karpo SBTB  
: Sukisno (Perseorangan)<sup>26</sup>

Pekan Mei Raya Surakarta tersebut dimeriahkan dengan berbagai macam lomba diantaranya lomba bulutangkis, lomba macapat dan lomba ketangkasan becak. Khusus untuk lomba macapat, Lekra Surakarta juga diberi kepercayaan untuk menjadi juri. Selain Lekra Surakarta, juri Macapat yang lain adalah PP dan K, RRI, Kesenian Mangkunegaran, Kesenian Kraton, Konservatori Karawitan, dan Himpunan Budaya Surakarta (HBS).

Secara perseorangan tokoh-tokoh Lekra Surakarta juga aktif dalam berbagai macam kegiatan diantaranya Utomo Ramelan (kelak menjabat sebagai walikota swapradja Surakarta) yang aktif sebagai budayawan Surakarta. Atas undangan IPPI, Utomo Ramelan, sebagai golongan budayawan mengisi diskusi mengenai Demoralisasi Pelajar. Pembicara lain yaitu Salim Aidit dari golongan Agama, Sindusuwarno dari golongan pendidikan, Dr. Sukandar dari golongan Kriminal teit, Affandi dari golongan masyarakat tani dan Suparno dari golongan masyarakat buruh. IPPI memang seringkali mengadakan diskusi, dan Utomo Ramelan juga merupakan narasumber langganan. Hal ini membuktikan, bahwa baik dari segi perorangan maupun organisasi, Lekra Surakarta memiliki tanggungjawab moral dalam menjawab masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Karnaval atau pementasan karya seni panggung bagi Lekra merupakan semacam garis disiplin organisasi. Lekra dengan prinsip-prinsip yang

ditanamkannya secara sadar, menjadikan panggung sebagai pesta sekaligus medan perang kebudayaan melawan musuh-musuh kongkrit dalam kehidupan. Fokus pementasan tidak lain adalah rakyat secara keseluruhan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari Rapat Umum PKI menjelang Pemilu 1955 di Surakarta. Pada 27 Februari 1955, rapat umum digelar di Alun-alun Utara dan diramaikan oleh kelompok kesenian binaan Lekra yang membantu PKI dalam memenangkan pemilu dan melawan seteru politiknya. Konsep yang disajikan tidak sekedar hiburan saja melainkan juga secara akurat ditata dari tata panggung, dekorasi, publikasi sampai hiburan. Panggung untuk rapat umum PKI itu panjangnya cuma 17 meter, tinggi-nya 21/2 meter, lebar 3 meter, dan berdekorasi gambar lambang Palu Arit seluas 51/2 x 5 meter. Panggung ini *stelbar*, mudah dipasang dan dibongkar, juga boleh dipinjam siapa pun.<sup>27</sup>

Dekorasi panggung diserahkan kepada Syamsjuri beserta kru dan bekerja sama dengan para anggota pengurus Lekra Surakarta. Tukang gambar lambang Palu Arit adalah Md. Hadi, pelukis terkenal dari Lekra Surakarta yang juga aktif dalam HBS (Himpunan Budaya Surakarta). Md. Hadi sendiri menunjukkan kekagumannya pada karyanya tersebut dengan mengatakan bahwa Baru pertama kalinya ia melukis lukisan yang paling sederhana (dengan konsep hitam diatas putih) tetapi terlihat paling megah dan beperbawal.

Rapat Umum PKI tersebut dikemas dalam seni pertunjukan berupa rapat akbar yang penuh dengan pertunjukan tarian dan nyayian. HBS yang menjadi pusat seni tari yang juga pusat seni dari kraton Surakarta tidak mengambil bagian

dalam pentas ini. Semua tarian dipersembahkan dari kelompok yang berafiliasi kepada PKI dan ditunjuk untuk menggelar pertunjukan seperti Lekra, Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Beberapa tarian yang dipertunjukkan adalah tari buruh dan tani. Penonton puas dengan sajian tarian ini ketimbang tari Srimpi maupun tari Gatutkatja Gandrung.

Selain pertunjukan tari, persembahan musik Rakyat juga digelar untuk meramaikan ajang kampanye PKI tersebut. Lagu-lagu yang dibawakan antara lain Sinom, Dandanggula, Bangbang Wetan Wus Raina, dan Pangkur Paluarit. Perpaduan lagu-lagu patriotik dengan tradisi musik yang baik dan mengembangkan revolusioner akan mendapatkan tempat di hati rakyat walaupun penyanyinya bukan dari bintang-bintang radio ternama.

Sekarang njanjianinja. Penjanji-penjanjinja bukan bintang radio Surakarta matjam Hadi, Gesang, Samsidi, Suprapti, Sajketi, Srimulat dll. Dan bukan pula Samsaimun maupun Bing Cros by ataupun Doris Day. Tjuma Djoni dan Rachmat dkk dari Djogja dengan arkodion dan gitarnja; Pak Brotowinarso beserta anak gadisnja Sofiah dari desa beras Delanggu, Nj. Surono dari Kampung Timuran Surakarta. Djoni-Racmat dkk menjanjikan lagu "Bangbang Wetan Wus Raina, Jonjo milih Paluarit". Pak Broto, Sofiah dan Nj. Surono menjanjikan Sinom, Dandanggula dan Pangkur Paluarit. Bagi penjanji ini terdengar suara anaki muda: Suara Djoni dkk seperti suara Bing Crosby. Dan orang-orang kota berkata: Suara Pak Broto tak kalah dengan suara Samsidi. Suara Sofiah tak kalah dengan suara Wara Podang. Dan orang-orang desa berkata: Suara Pak Broto seperti suara burung perkutut jang sudah "kung": membikin gandrung. Kawan djika ditengah kota disana-sini kita mendengar suara radio jang tjampur aduk tetapi menurut keterangan dari desa, bahwa disana diantara bunji katak, jangkrik dan walang terdengar merdu lagu Dandanggula-Sinom-Pangkur Paluarit. Inilah Daja Seni Suara!<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Harian Rakjat* 26 Maret 1955 *commit to user*

Panggung rapat umum ini pun menjadi lebih ramai dan atraktif. Konsep yang disuguhkan oleh panitia dari PKI dan tersebut cukup efektif dalam memobilisasi kesenian Rakyat. Di panggung inilah seni tari kolektif berbakti menari, seni suara kolektif berbakti menyanyi, seni lukis kolektif berbakti melukis, seni bangunan kolektif berbakti dekorasi. Dengan kata lain, itulah seni kolektif yang dikerjakan Rakyat dan dibaktikan untuk sejuta Rakyat.<sup>29</sup>

Keaktifan Lekra Surakarta tidak hanya selalu dekat dengan PKI. Pada tanggal 25 Maret sampai dengan 2 April 1955, di Surakarta diadakan Kongres Sarekat Buruh Djawatan Pertanian Rakyat (SBDPR) seluruh Indonesia. Organisasi buruh ini juga melibatkan Lekra Surakarta dalam kepanitiaan bersama organisasi wanita dan pemuda yang pro kerakyatan lainnya.<sup>30</sup>

Masih pada tahun yang sama, guna memperingati hari Buruh 1 Mei 1955, diadakanlah berbagai acara, baik dari diskusi, rapat akbar, longmarch, lomba dan pameran-pameran. Lekra Surakarta tetap terlibat sebagai panitia divisi kebudayaan. Salah satu program yang dilaksanakan Lekra Surakarta bersama seniman lainnya adalah pameran lukisan di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Tepatnya di Ngapeman sepanjang tembok CTN dengan panjang 40 meter. Pameran lukisan ini mendapat dukungan penuh dari Lekra Surakarta.<sup>31</sup>

Acara tersebut mendapat dukungan dari para seniman rakyat dan pelukis rakyat dari yang terkenal sampai yang paling muda (taraf belajar). Diantaranya Muriyoso (HBS), Sumitro (Guru SMA), Md Hadi (Lekra), Sajid dan 18 Kader

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Dwi Warna*, 29 Maret 1955

<sup>31</sup> *Dwi Warna*, 22 April 1955

Lekra lainnya. Sebagian lukisan tersebut merupakan hasil belajar para kader Lekra Surakarta selama 3 bulan. Jumlah lukisan seluruhnya sebanyak 68 buah. Seluruh lapisan masyarakat di kota Surakarta menaruh perhatian yang besar dan menikmati keindahan dan ketinggian mutu seni dari pelukis-pelukis rakyat yang terkenal dalam dunia seni lukis.<sup>32</sup>

Dalam sejarah pameran lukisan di Surakarta, baru pertama kalinya pameran seni dapat dikunjungi secara luas oleh masyarakat, dan pameran ini mulai dibuka pada tanggal 30 April dan ditutup pada tanggal 5 Mei 1955. Pameran lukisan ini memang diadakan Lekra agar masyarakat Surakarta mampu menikmati seni dari rakyat untuk rakyat.

Aliansi dan kedekatan Lekra dengan beberapa organisasi berbasis kerakyatan memang cukup beragam. Konferensi yang biasanya dilaksanakan dan melibatkan Lekra didalamnya diwarnai dengan pentas kesenian. Pada tanggal 14-16 Mei 1955, Persatuan Guru Tehnik Indonesia (PGTI) Jawa Tengah melangsungkan konferensi daerahnya yang juga dikunjungi oleh cabang-cabang di wilayah Jawa Tengah.<sup>33</sup>

Pelaksanaan tersebut dibantu oleh panitia dari cabang-cabang PGTI Surakarta dan organisasi-organisasi massa lainnya antara lain: Sarekat Buruh Kereta Api, Sarekat Buruh Kesehatan, Sarekat Buruh Aphotek, Sarekat Pekerjaan Umum, Pemuda Rakyat, Lekra, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, Rukun Wanita Surakarta dan Keluarga Wanita Sekolah Teknik Surakarta. Konferensi diwarnai

---

<sup>32</sup> Dwi Warna, 5 Mei 1955

<sup>33</sup> Dwi Warna, 12 mei 1955

juga dengan hiburan-hiburan seni kerakyatan. Selain itu seniman-seniman Lekra tampil pula dalam acara maleman Sriwedari pada tanggal 10-24 Mei 1955.<sup>34</sup>

Dalam periode 1955-1958, Lekra bekerja sangat giat di Masyarakat. Para pengurusnya kreatif dan agresif sekali dalam menyedot minat anak-anak muda. Mereka menggelar banyak sekali acara-acara seni dan budaya. Lekra menawarkan jalan yang terbuka ke arah pelatihan dan perlombaan drama, deklamasi, dan nyanyi. Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ini, yang pertama 1955 adalah tahun perebutan suara antara partai politik, dan 1957 adalah tahun dimana jargon politik adalah panglima mulai membumi.

### C. Kongres Lekra I di Surakarta 23-31 Januari 1959

Menanggapi segala bentuk perkembangan kebudayaan yang ada, maka Lekra memutuskan menggelar Kongres kebudayaannya sendiri. Menjelang kongres nasional Lekra I di Surakarta, diadakanlah konferensi regional Lekra di Jogjakarta. Konferensi kerja regional Lekra daerah Jogja dan Surakarta diikuti oleh cabang-cabang Jogjakarta, Sleman, Gunung Kidul, Bantul dan Cabang Surakarta, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten. Acara pokok adalah realisasi hasil-hasil sidang aktivis kebudayaan pada tanggal 2-3 Agustus 1954 di Surakarta serta pelaksanaan penyelenggaraan training centre masing-masing kesenian serta membicarakan masalah-masalah menghadapi

---

<sup>34</sup> ibid

kongres dan festival Nasional Lekra se-Indonesia pada November-Desember yang akan datang.<sup>35</sup>

Kongres Lekra I awalnya akan diselenggarakan pada akhir Desember 1958 ditunda dan diundur menjadi tanggal 23-29 Januari 1959. Begitu juga dengan pekan kebudayaan yang dipersiapkan bersamaan dengan Kongres I Lekra di Surakarta. Perubahan jadwal ini dipublikasikan setelah sekretariat Pusat Lekra mengkaji dan mempelajari kembali semua persiapan dan syarat bagi penyelenggaraan kongres Nasional I Lekra. Sehingga agar lebih mematangkan jalannya acara, maka dipertimbangkan jadwal acara dilaksanakan pada awal tahun 1959.<sup>36</sup>

Parade hiburan seringkali mewarnai acara Lekra di berbagai tempat. Pertunjukan-pertunjukan itu diadakan untuk menyambut kongres dan Musyawarah Lekra. Pentas di Surakarta misalnya, diadakan dalam rangka menyambut Kongres Nasional ke I Lekra.

Kongres Nasional ke-I Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang akan dilangsungkan pada akhir bulan Desember jad. di Surakarta, akan diramaikan dengan berbagai matjam pertunjukan kesenian, festival film dalam dan luar negeri, pertunjukan kesenian, dan pameran hasil kesenian dan kerajinan. Untuk penyelenggaraan itu semua, seluruh gedung pertunjukan di Taman Sriwedari akan diborong oleh Panitia Kongres selama seminggu. Di gedung-gedung pertunjukan di Taman Sriwedari nantinya akan diadakan pertunjukan Wayang Orang, Ketoprak, Ludruk Marhean dan atraksi-atraksi lain seperti rejog, doger, djatilan, dsb. sedang di gedung bioskop Sriwedari akan diselenggarakan Festival Film baik mengenai film-film dalam maupun luar negeri. Disamping pertunjukan, tetap itu akan dipergelarkan a.l. berbagai matjam tari-tarian, dan senidrama. Oleh Lekra telah diundang Paul Roberca seorang penjanji kenamaan dari Amerika Serikat, Raj Kapur dari

---

<sup>35</sup> *Kedaulatan Rakjat*, 2 September 1958

<sup>36</sup> *Harian Rakjat*, 20 Desember 1958

India, dan Ketua Persatuan Sastrawan Tiongkok dan rombongan penari ballet dari Sovjet Uni, yang diharapkan akan memenuhinja.<sup>37</sup>

Persiapan Kongres Nasional ke I Lekra ini berlangsung di berbagai tempat, tidak hanya Surakarta tapi juga di Nias, Kalimantan Selatan, Bali, Jakarta, dan daerah lain.

Bagi delegasi daerah yang ikut ke Surakarta mesti melalui tahap seleksi dulu di antara mereka yang akan mementaskan cerita sandiwara, tari-tarian dan pertunjukan-pertunjukan maupun hiburan umum kabaret. Semua daerah mengalami kesibukan dalam menyarnbut sebuah perhelatan kebudayaan yang luar biasa besar untuk masanya. Tidak ada garis pemisah yang tegas antara kreasi tangan kasar Rakyat jelata dan olah pikir cendekia-cendekia kebudayaan yang terpelajar Sekretariat Pusat mengatur sedemikian penyatuan itu dalam selembur silabus yang menjadi rujukan apa saja yang dipentaskan di Kongres Lekra selain sidang-sidang dalam ruangan untuk merumuskan gerak bersama Lekra ke depan.<sup>38</sup>

Tiap delegasi yang berangkat mengumpulkan dana secara mandiri baik dari iuran perorangan, kas organisasi maupun dari pendapatan setelah mengadakan pertunjukkan seperti yang dilakukan oleh Lekra pimpinan Bakri Siregar dari Sumatra. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lekra daerah yang lain. Khusus untuk Lekra Jakarta bahkan mengadakan pemanasan dengan menyelenggarakan gelar pentas seni selama 9 hari. Sedangkan Lekra Surakarta, untuk menyongsong Kongres Lekra sekaligus sebagai tuan rumah, menggelar drama revolusi dengan judul “Gerbong” karya Agam Wispi pada tanggal 15

---

<sup>37</sup> *Harian Rakjat* 20 Oktober 1958

<sup>38</sup> *Harian Rakjat* 20 Desember 1958

Desember 1958 di gedung Sin Min Surakarta. Gelar acara ini didukung oleh IPDS (Ikatan Pemuda Drama Surakarta) asuhan Lekra Surakarta. Para pemainnya adalah Guru-guru, Pemuda pemudi dan pelajar dibawah asuhan seniman Lekra yaitu Md Hadi dan Sjamsuri. Pertunjukan drama ini khusus dipersembahkan kepada pekan kebudayaan Kongres Nasional Lekra I.<sup>39</sup>

Menurut Md Hadi, Ketua Kongres umum Lekra sekaligus penata rias dari drama tersebut, “Gerbong” terbilang sukses, dan pantas untuk dipentaskan kembali di Pekan Kebudayaan dalam Kongres nanti dengan polesan di kanan-kiri. Tolak ukur dari kesuksesan ini adalah membanjirnya jumlah penonton yang hadir. Lekra Surakarta dan IPDS menjual 500 tiket dan terjual habis. Penonton pun turut aktif dengan memberikan kritik berupa kurang maksimalnya tata suara dan dekor. Selain pementasan “gerbong” terdapat tambahan suguhan pertunjukan Dagelan Mataram dari Sarpin-djadi dan rekan-rekannya. Tambahan pertunjukan ini membuat suasana penonton meriah dan penuh tawa.<sup>40</sup>

Ketua Lekra Surakarta, Sangidan, mengatakan bahwa Lekra lain di Jawa Tengah dapat menggelar pertunjukkan yang sama demi mendukung Kongres Nasional Lekra I Januari 1959. Sangidan mengatakan:

Kepada Lekra tjabang Djawa Tengah bila akan berusaha keuangan guna Kongres Lekra, boleh memanggil drama “gerbong” Surakarta ini, biaja murah sadja. Silahkan!<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Harian Rakjat*, 6 Desember 1958 (Lihat lampiran 4)

<sup>40</sup> *Harian Rakjat*, 20 Desember 1958

<sup>41</sup> *Ibid*

Pertunjukan ini juga dihadiri oleh Wakil Kementerian PP dan K seksi Sastra Drama perwakilan Jogjakarta. Perwakilan tersebut merasa puas dengan pertunjukkan, namun sayangnya tidak membawa dana untuk memberi bantuan kesenian demi terselenggaranya pertunjukan yang lain.<sup>42</sup>

Kepanitiaan Kongres Lekra ini sudah jauh hari dibentuk. Lekra juga mengikutsertakan elemen-elemen kemasyarakatan untuk bertanggung jawab serta ikut serta dalam pesta kebudayaan ini. Hal itu ditunjukkan dalam susunan kepanitiaan yang melibatkan banyak sekali unsur di luar Lekra, seperti Kepala Daerah Kotapraja Surakarta, pengusaha, Kepala Sriwedari, anggota DPRD Kotapraja Surakarta, SBHRT, SOBSI, Perbepsi, Seros, Pemuda Rakjat, dan sebagainya. Bahkan Mangkunegoro VIII juga mendukung jalannya acara sehingga dijadikan dewan kehormatan. Berikut adalah susunan kepanitiaan kongres Lekra I :

**PANITIA KONGRES LEKRA I SURAKARTA**

**23-30 Januari 1959**

**Ketua Kehormatan:**

Utomo Ramelan (Kepala Daerah Kotapradja Surakarta)

**Ketua Kehormatan:**

Mangkunegoro VIII

**Ketua Umum:**

Basuki Resobowo (Lekra Pusat)

**Ketua I:**

M.D. Hadi (Lekra Djawa Tengah)

---

<sup>42</sup> Mengomentari habisnya dana kesenian dari kementerian di tahun 1958, muncul celetukan pasca pementasan "Gerbang": "Sajang tahunnja belum habis, uangnja telah dihabiskan. Suatu gedjala ketidakbidjaksanaan".

**Ketua II:** Sangidan (Lekra Surakarta)

**Ketua III:** Wukirlan (Lekra Surakarta)

**Anggota:**

Suwarno (Lekra Djawa Tengah)

Sjamsuri (Lekra Surakarta) Batara Lubis (Lekra Djogjakarta)

Puspomartono (Lekra) Suparwi (Pengusaha nasional)

Sumantri (Lekra Surakarta)

Djoni Trisno (Lekra Djawa tengah)

Sutarto (Kepala Sriwedari)

Martian S. (Lekra Djogjakarta)

Sapardal (Lekra Djogjakarta)

Sumardi (Anggota DPRD Kopra Surakarta)

Sudijono (SBHRT)

Daliman (SOBSI)

Bambang Warsito (Perbepsi)

Munandar (SBROS) Sutarto (Pemuda Rakjat)<sup>43</sup>

Pekan Kebudayaan dibuka pada 23 Januari 1959, dan kemudian menyusul Kongres Lekra I pada 24 Januari 1959. Sepekan sebelumnya, 16 Januari, Pameran Senilukis dibuka Sekjend Kementerian PP&K Hutasoit dan panitia pameran diwakili seniman Henk Ngantung. Hadir dalam pembukaan itu adalah Dutabesar RRT, atase kebudayaan USSR, perwakilan RDI), sekjen PKI D.N. Aidit, dan sejumlah tokoh-tokoh politik nasional lainnya.

Pembukaan Kongres Nasional Lekra dan Pekan Kebudayaan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1959 di Gedung Wayang Orang Sriwedari pukul 16.00 oleh Wakil Ketua Panitia Kongres, Md Hadi dengan upacara singkat. Sekretaris

umum Lekra, Joebar Ajoeb dan Kepala Daerah Kotapradja Surakarta, Oetomo Ramelan mengucapkan pidato sambutan dengan singkat. Selain itu, Ny. Oetomo Ramelan membuka Pekan Kebudayaan dengan menggunting pita yang terbentang dipura Sriwedari. Dekorasi-dekorasi dikerjakan dengan indah oleh para pelukis Lekra.<sup>44</sup>

Kemeriahan pesta rakyat tidak hanya terasa di Sriwedari tetapi juga di seluruh kota Surakarta terpancang poster-poster, plakat-plakat dan spanduk-spanduk yang antara lain berbunyi “Selamat datang seniman-seniman rakjat”, “Seni dan Ilmu kita untuk rakjat” dan lain-lain. Kongres ini diikuti oleh utusan-utusan dari Nusa Tenggara, Maluku-Irian Barat, Sumatera, Jawa dan Pulau-pulau lain. Acara ini juga dihadiri oleh organisasi massa revolusioner seperti SOBSI, BTI, Gerwani, Pemuda Rakjat, Sarbufis, Universitas Rakyat dan PGRI.<sup>45</sup>

Ada sekira ribuan pengunjung hadir di malam pembukaan dan di malam kedua lebih semarak lagi, yakni 17.400 pengunjung. Rata-rata pengunjung yang hadir berkisar antara 9 ribu sampai 15 ribu setiap malamnya. Tiga panggung utama di Sriwedari diisi dengan Ludruk Marhaen, Ketoprak "Kridomardi", Wayang Orang, Dagelan Mataram, Sandiwara, Reog Jawa Barat, Reog Ponorogo, Gamelan Banyumas, tetarian dan nyenyanyian, pemutaran film seperti "Tjorak Dunia" (Bachtiar Siagian/Medan) dan "Sembahjang Tahun Baru" (RRT).

Dalam sejarah pagelaran kesenian di kota Surakarta, belum ada yang menyamai kemeriahan ini. Suasana lebih dimeriahkan lagi dengan mempercantik

---

<sup>44</sup> *Harian Rakjat*, 27 Januari 1959

<sup>45</sup> Ibid

Gapura-gapura Sriwedari. Gapura-gapura tersebut didekorasi oleh pelukis-pelukis Lekra dan jalan-jalan dipagari bendera Merah Putih dan umbul-umbul.

Pada kongres Lekra, tiap-tiap cabang seni melakukan prasaran dan laporan. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh Lekra saja melainkan juga ahli seni yang mumpuni di bidangnya. Prasaran yang diberikan antara lain:

1. Prasaran tentang film oleh Efendi
2. Prasaran tentang Seni Drama oleh Rivai Apin dan Basuki Resobowo
3. Prasaran mengenai musik oleh Sudarnolo
4. Prasaran mengenai seni tari oleh Bambang Sukawati Dewantara
5. Prasaran tentang Kesusastraan oleh Rivai Apin
6. Prasaran ilmu oleh Drs. J B Eva
7. Prasaran pendidikan oleh Ir. Suroto
8. Prasaran kesenian daerah oleh Basuki Resobowo<sup>46</sup>

Yang termasuk dalam kesenian daerah antara lain adalah Reog, Sandur, Ludrug, Ketoprak, Ronggeng, Djatilan dan lain-lain. Kongres akan diadakan di beberapa tempat antara lain pembukaan di Gedung Sriwedari, Kongres di Prangwedanan Mangkunegaran, Pekan Kebudayaan di Sriwedari dan Balaikota, dan resepsi penutupan di Pendopo Agung Mangkunegaran.

Di dalam ruangan "Wajang Orang", Kongres dibuka sesuai rencana: 24 Januari 1954. Para peserta Kongres diikuti oleh utusan-utusan dari Nusa Tenggara, Maluku-Irian Barat, Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Selain itu Kongres juga dihadiri utusan-utusan dari luarnegeri, yaitu utusan Himpunan

---

<sup>46</sup> Nasional 3 Januari 1959

Komponis Jerman, Himpunan Pengarang Tiongkok, Badan Hubungan Kebudayaan Luarnegeri USSR, Himpunan Pengarang Korea.

Inilah kesan dan ucapan dukungan dari seniman-seniman dunia dari pelbagai organisasi sekawan Lekra di luar negeri. Berikut ini adalah beberapa ucapan dukungan terhadap Kongres Lekra I di Surakarta:

Raj Kapoor: "Atas undangan saudara saudara jang baik itu saja sangat berterimakasih,tetapi dengan sungguh menjesalkan ketidakbisaan saja untuk menjertai sdr2 sekalian.... Mengharap bagi Kongres segala sukses."

LPIK, Pyongyang: "Lembaga Persahabatan Indonesia-Korea menjampaikan salam jang ichlas kepada Kongres jang bersedjarah dari lembaga kawani. Kami mengharapkan suksesz jang lebih tjemerlang dalam pekerdjaan kawaru dan mengharap hubungan timbale balik kita akan lebih diperkuat lagi."

Erwin Kohn, Hedda Zinner: " Atasnama Himpunan Pengarang Republik Demokrasi Jerman kami memberi selamat kepada pentjipta kebudajaan jang sedang berkumpul di Kongres Lekra. Dengan penuh simpati kami mengikuti perdjuaan sdra serta usaha sdr1 untuk perkembangan lebih landjut daripada kebudajaan nasional sdr2. Kami merasa terikat dengan saudara saudara dalam tudjuan jang sama, jaitu membela perdamaian dunia dan maka itu mengharapkan hubungan-hubungan jang erat

dan jang langsung antara pengarang-pengarang kedua negeri kita...."

Tju Tu-nan: "Lembaga Rakjat Tiongkok Untuk Hubungan Luar Negeri gembira mendengar bahwa Kongfes Nasional I Lekra dilangsungkan. Saja menjampaikan salam jang hangat. Mengharap jang sebaikznja bagi Kongres kawan untuk mentjapai sukses1 jang lebih besar dalam memadjukan kebudajaan negeri kawan sendiri dan dalam memadjukan hubungan kebudajaan dengan negeri-negeri lain."<sup>47</sup>

Konsepsi Kebudayaan Nasional memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada setiap pandangan hidup dan keyakinan seni dengan syarat mendahulukari kepentingan nasional. kepentingan Rakyat banyak. Bagi Lekra, Pandangan hidup dan keyakinan seni jang menuntut kebebasan sepenuhnya dalam

artian juga untuk bebas berbuat atau menghasilkan ciptaan kesenian yang tidak memperhatikan atau bertentangan dengan kepentingan Rakyat banyak adalah pandangan hidup dan keyakinan seni yang nasionalis.

Aktivis Lekra sering menggambarkan kebudayaan Indonesia itu sebagai pohon yang memiliki akar-akar tunjang yang kokoh. Musuh utama pohon itu adalah gulma yang merupakan symbol dari imperialisme dan feodalisme yang mematikan, memotong, menggundulinya, tetapi sia-sia, karena batang, akar, dan bumi tempat tumbuh pohon itu terlalu kuat.

Buminja adalah Rakjat sendiri. Akar-akarinja adalah seluruh djumlah kesenian Rakjat jang sudah hidup dari abad keabad, disemua pulau dan daerah, dikalangan segenap sukubangsa. Sedang batangnja adalah tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Abdulkadir Munsji, Ronggowarsito, Raden Saleh dan pendiri-pendiri lain, peletakz batu pertama jang lain dari kebudajaan modern kita. Pokok ini kemudian bertjabang-tjabang, dengan aliran jang bematjamragam, dengan gaja beranekawarna. Di lapangan kesusasteraan, salahsatu tjabangnja dimulai oleh Mas Marco, pengarang jang revdlusioner itu. Dilapangan musik, Supratman. Dilapangan film, suami-istri Kartolo dan Rukiah. Dan masing-masing lapangan ditjabangi oleh nama-nama jang kuat. Kemudian tjabang-tjabang itupun melahirkan dahan-dahannja. Cornel Simandjuntak, jang tegasi membelakangi "nina bobok", Chairil Anwar, jang sekalipun anarchisme, telah memberikan djawabnja terhadap fasisme, dan banjak segi lainnja.<sup>48</sup>

Pada Mukaddimah yang direvisi pada 1959, tugas dan kedudukan Rakyat dipertegas, *"bahwa Rakjat adalah satu-satunja pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia-baru hanja dapat dilakukan oleh Rakjat... Lekra berpendapat bahwa setjara tegas berpihak pada Rakjat, adalah satu-satunja djalan bagi senimam, sardjanaz maupun pekerdja kebudajaan lainnja, untuk mentjapai hasil-hasil Jang tahan udji dan tahan waktu"*.

---

*commit to user*

<sup>48</sup> *Harian Rakjat* 20 Oktober 1951

Usaha Lekra pertama dan sedjak semula ditudjukan untuk memadukan kebudajaan dengan gerakan Rakjat, gerakan Rakjat dengan kebudajaan. Dengan menghimpun senimam dan pekerdjaz kebudajaan lain jang revolusioner, dan dengan mendirikan organisasinja di mana-mana, Lekra menjebarkan dan membela azas Seni untuk Rakjat dan Ilmu untuk Rakjat.

Pemaduan kebudajaan dengan gerakan Rakjat berartilah, bagi pekerdja-pekerdja kebudajaan, dipakukannja kesetiaan dan pengabdianja kepada Rakjat dan gerakannja, sedang bagi aktivis-aktivis gerakan Rakjat dilapangan-lapangan lain, diterimanja kebudajaan bukan sebagai sesuatu jang asing lagi, tetapi sebagai dari hidup dan perjuangannja sendiri"<sup>49</sup>

Dengan sikap dan lapisan itulah Lekra mengembangkan daya jangkanya ke masyarakat luas. Sebagaimana terpotret di arena Kongres Nasional I Lekra di Surakarta, nyaris tak ada pagar antara "Rakyat terbawah" dan "Rakyat terpelajar". Tak ada "Rakyat kawula" dan "Rakyat elite". Semuanya mengambil peran. Organ-organ tani dan buruh pun seperti SOBSI dan BTI diberikan tempat untuk memberikan aspirasi dan apresiasi kebudayaannya yang tak mungkin kita bisa saksikan di acara-acara yang dilakukan para seniman berkonsep "*kami adalah ahli waris jang sah dari kebudajaan dunia dan kebudajaan ini kami teruskan dengan tjara kami sendiri. Kami labir darikalangan orang-banjak dan pengertian Rakjat bagi kami adalah kumpulan tjampur-baur darimana dunia-dunia baru jang sehat dapat dilahirkan*".<sup>50</sup>

Lekra memang bukan organ eksklusif dan tertutup. Ia menghormati peninggalan-peninggalan nenek-moyang dengan kritis dan sekaligus membantu secara aktif untuk memenangkan setiap yang baru dan maju, bersikap pada setiap kenyataan dan kebenaran. Dengan sikap kritis, tegas, dan keberpihakan pada

---

<sup>49</sup> *Harian Rakjat* 31 Januari 1959

<sup>50</sup> Surat kepertjayaan Gelanggang paragraf 6

Rakyat, Lekra mengambil sikap : *"mendorong keberanian kreatif,dan Lekra menjetudjui setiap aliran bentuk dan gaya, selama ia setia pada kebenaran, keadilan, dan kemajuan jang selama ia mengusahakan keindahan artistic jang setinggi2nja"* sekaligus *"mengulurkan tangan kepada organisasi kebudayaan jang lain dari aliran atau kejakinan apapun untuk bekerdjasama dalam pengabdian ini"*.

Berbeda dengan kongres kebudayaan nasional ke-3 Surakarta, Kongres Lekra dan Pekan Kebudayaan Rakyat ini dihadiri oleh Presiden Soekarno bersama Menteri PPK Prof. Prijono dan Menteri Sosial Muljadi Djojomartono. Dalam kunjungannya ke taman Sriwedari guna menyaksikan pameran lukisan Lekra serta pameran adat Indonesia, kedatangan presiden disambut oleh para pelukis serta para pemain wayang orang Sriwedari yang berpakaian "dinas" yaitu mengenakan pakaian wayang seperti para ksatria dari pandawa, raja-raja raksasa, kera Hanuman serta tiga serangkai Semar-Gareng-Petruk.<sup>51</sup>

Selama menikmati pameran, presiden senantiasa ditemani para ksatria Pandawa yang mengawal disampingnya dan panglima Kera harja Hanuman Andjaniputera dibelakangnya. Pelukis Basuki Resobowo memberikan tanda mata kepada presiden berupa lukisan patung dan wayang golek. Demi mempererat tali kebersamaan dan revolusi, presiden Soekarno bahkan mengajak para pandu, pemuda-pemudi, pelukis, penari-penari, sastrawan untuk menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Presiden Soekarno juga mengajak salah seorang pemuda untuk menari. Maka para pemuda dan seniman membuat lingkaran dan mengiringi

tarian presiden dengan irama lagu-lagu daerah seperti si patokaan, sayang manise, rayuan pulau kelapa dan sebagainya. Menteri Prijono dan wakil dari kedutaan Polandia serta wartawan Pravada pun turut ambil bagian dalam pesta tari yang digelar presiden Soekarno selama kurang lebih 30 menit tersebut.<sup>52</sup>

Kongres I Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) akhirnya mengesahkan Mukadimah dan Peraturan Dasar Lekra pada 27 Januari 1959 pukul 20.00 di Surakarta. Kongres ini menjadi kongres terpenting dari keseluruhan perjalanan organisasi yang didirikan pada 17 Agustus 1950 ini. Bukan saja karena pada kongres ini Lekra telah berusia sewindu lebih beberapa bulan tapi juga pada kongres yang diadakan penuh semangat revolusi yang meluap-luap itu perubahan dan sikap kebudayaan paling radikal ditetapkan sebagai tolak ukur ke depan. Dari kongres ini ditetapkan pula anggota Pimpinan Pusat Lekra sebagai berikut:

#### **Anggota Pimpinan Pusat Lekra**

**(Hasil Kongres Nasional 24-29 Januari 1959, Surakarta, Jawa tengah)<sup>53</sup>**

Affandi

Agam Wispi

Bachtiar Siagian

Bakri Siregar

Basuki Effendi

Basuki Resobowo

Boejoeng Saleh

Chrismanuputty

Dhalia

Hadi S

---

<sup>52</sup> *Nasional*, 3 Februari 1959

<sup>53</sup> *Harian Rakjat* 4 April 1959

Haznam Rachman  
Hendra Gunawan  
Henk Ngantung  
H.R. Bandaharo  
Joebaar Ajob  
Kotot Sukardi  
Kurnia  
K Iramanto  
Martean Sagara  
M.D. Hadi  
M.S. Ashar  
Njoto  
Nurbakti  
Pramoedya Ananta T  
Rivai Apin  
Rumambi  
Samandjaja  
Sudharnoto  
Sudjadi  
Sugiarti Siswadi  
Suhardjo  
Sunardi  
Sunito  
S. Anantaguna  
S. Rukiah Kertapati  
Sutomo  
Tan Sing Hwat  
Tjak Bowo  
Utama Ramelan  
Z Trisno  
Wakil dari Kalimantan

## Wakil dari Sulawesi

Dari beberapa nama tersebut, beberapa diantaranya adalah tokoh-tokoh Surakarta. Dalam konferensi dibentuk pula Susunan pengurus Sekretariat Pusat Lekra sebagai hasil dari sidang pleno I tanggal 28 Januari 1959 di Surakarta, sebagai berikut:

Sekretaris Umum:

Joebaar Ajoeb

Wakil Sekretaris Umum I:

Henk Ngantung

Wakil Sekretaris Umum II:

Sudharnoto

Anggota Sekretariat:

Njoto

Basuki Resobowo

Rivai Apin

M.S. Ashar

Samandjaja

Basuki Effendi

Bakri Siregar

S. Anantaguna.<sup>54</sup>

Inilah kongres yang dilaksanakan ketika organ kebudayaan ini melewati tahapan-tahapan dan peristiwa-peristiwa politik penting yang berlangsung di Indonesia. Gagalnya "kudeta" Angkatan Darat Nasution 17 Oktober 1952, kekacauan-kekacauan di beberapa daerah karena ketakpuasan politik seperti makar PRRI/Permesta, DI/TII, konsolidasi. Kondisi yang tidak kalah penting

*commit to user*

---

<sup>54</sup> Ibid

adalah bangkitnya PKI sepanjang 1954-1955 yang berakhir dengan kembalinya PKI dalam poros utama politik Indonesia dengan menempati urutan keempat Pemilu 1955 setelah kejatuhannya pasca peristiwa Madiun 1948.

Kongres Lekra I ini begitu penting, bukan hanya karena Mukadimah Lekra direvisi, tapi juga langkah-langkah dan visi serta arah berkesenian dan berkebudayaan disusun. Jika sebelumnya lekra memakai konsep *desentralisasi* maka sejak kongres di Surakarta, Lekra lebih *sentralistik* dalam mengurus seksi-seksi<sup>55</sup>.

Sebulan sebelum perhelatan Kongres di Surakarta, diumumkan apa yang mesti dibawa peserta dari daerah dan cabang-cabang Lekra di seluruh Indonesia untuk mengisi 9 pameran besar. Diantaranya Alat Musik (Suling, angklung, rinding, genggong, rebab, gendang, tifa, sasando, gambang, dan banyak lagi lainnya. Alat-alat ini mendapat tempat yang terhormat dalam pameran-pameran di Pekan Kebudayaan). Mainan kanak-kanak; Bukan mainan hasil pabrik, tapi permainan yang sederhana saja yang terbuat dari bambu, dail ijuk, dari daun kelapa, dari kayu, dan sebagainya.

Mainan ini mencerminkan kekayaan ide setiap suku bangsa dan setiap daerah, tapi selama ini tak pernah ada inisiatif untuk mengumpulkannya. Terkait Kerajinan Tangan; bukan hanya Bali, Jepara, Jogja, Surakarta, Kendari yang punya kerajinan tangan yang bernilai, tapi semua suku bangsa, sernua daerah. Ada yang terbuat dari kayu, tulang, kulit penyu, perak, daun pandan. Dalam kerajinan

---

<sup>55</sup> Lekra mempunyai beberapa seksi di bawahnya yaitu; Seni Lukis, Seni Musik, Seni Drama, Seni Tari, Film, Ilmu. Dengan restrukturisasi organisasi, seksi langsung berada di bawah kendali Lekra Pusat. Lihat, JJ Kusni, 2005, *Di Tengah Pergolakan: Turba Lekra Di Klaten*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, halaman xvii.

tangan tampak keterampilan bangsa yang kaya, Tenun. Sedangkan untuk pakaian daerah di antara semua yang sudah disebut dari atas hingga ke bagian ini, barangkali pakaian daerah inilah yang paling mahal harganya jika diukur dengan uang. Utusan-utusan kongres diharapkan bisa membawa jenis-jenis pakaian daerah.

Di setiap daerah dan suku bangsa ada cerita-cerita, dongeng, fabel, juga sajak-sajak Rakyat. Di antaranya ada yang sudah dituliskan, tetapi lebih banyak lagi masih merupakan kesusasteraan lisan. Sastrawan Lekra hendak mencatat cerita-cerita itu sehingga Kongres Lekra ke-I sekaligus akan mempunyai hasil konkret dalam pencatatan cerita, dongeng, fabel, sajak-sajak Rakyat, Lagu-lagu; Pekerja-pekerja Lekra di lapangan musik hendaknya mengusahakan pencatatannya dan berangkat ke Kongres nanti setidaknya dengan catatan satu dua lagu Rakyat, sebagai permulaan usaha Lekra yang besar untuk membuat direktori musik daerah secara keseluruhan. Semua bahan dan alat-alat itu akan memenuhi sembilan jenis pameran kerakyatan:

- a. Pertunjukan musik dan tari-menari (dipanggung terbuka dan tertutup)
- b. Pertunjukan senidrama (dipanggung tertutup dan terbuka)
- c. Pameran senilukis
- d. Pameran patung
- e. Pameran poster
- f. Pameran penerbitan
- g. Pameran pakaian suku-suku bangsa Indonesia
- h. Pameran alat-alat musik nasional
- i. Pameran umum, yang menggambarkan tingkat kecerdasan dan kemampuan kreatif bangsa, seperti hasil-hasil pemberantasan buta huruf,

grafik situasi pelajar dan mahasiswa di lapangan pendidikan dan pengajaran, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Kongres Nasional Lekra I serta pentas kebudayaan nasional inilah yang kemudian mengubah arah gerak Lekra ke arah yang lebih revolusioner.



### **BAB III**

#### **PERKEMBANGAN DAN PERAN LEKRA SURAKARTA 1960-1964**

Sebagai sebuah organisasi kebudayaan yang muncul pada tahun 1950an, Lekra memiliki kekuatan tersendiri di belantara kebudayaan sekaligus dunia politik Indonesia. Konsep yang diusung sejak awal untuk tidak lupa pada permasalahan politik membuat Lekra berbeda dengan organisasi kebudayaan lainnya yang hanya sekedar hidup dalam ranah kebudayaan. Sikap Lekra yang demikian tersebut menjadi berkah tersendiri. Secara umum tindakan-tindakan yang diambil Lekra minim bersinggungan dengan sikap pemerintah, khususnya sikap Presiden Soekarno.

Persoalan kebudayaan sendiri oleh Lekra ditanggapi dengan penuh daya kritis. Lingkup kebudayaan dari tingkat lokal (budaya daerah) dengan berbagai macam bentuk, sampai dengan nasional dimana film-film asing terdapat didalamnya, merupakan target sasaran Lekra. Hal ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan Lekra, yaitu membangun sebuah budaya Indonesia yang revolusioner.<sup>1</sup>

#### **A. Perkembangan Lekra Surakarta Setelah Kongres Nasional Lekra I**

Pasca acara akbar Lekra di Surakarta, bagian bagian seni dan budaya dalam tubuh Lekra banyak yang diperbaiki. Pada Kongres Nasional I 1959 di Surakarta struktur organisasi dirombak. Seksi sastra, seni musik, tari, drama, film,

---

<sup>1</sup> Basuki Resobowo, 2005, *Bercermin Di Muka Kaca: Seniman, Seni Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Ombak, Hlm 48

dan ilmu dialihkan menjadi tanggung jawab pimpinan pusat. Kongres juga memilih 41 anggota Pimpinan Pusat. Selain itu keanggotaan juga bertambah, serta disusul dengan kongres kongres Seni budaya lainnya.<sup>2</sup>

Azas "Politik Sebagai Panglima" yang muncul pertama kali dalam kongres, kemudian dibicarakan secara khusus dalam Konfernas Lekra Agustus 1960. Politik yang dimaksud adalah politik yang maju, kerakyatan dan revolusioner, untuk membedakan dengan politik yang kolot, anti kerakyatan dan reaksioner. Lebih jauh lagi prinsip ini menuntut komitmen politik para anggota Lekra dalam setiap aktivitasnya secara kongkrit. Dengan disampaikannya pertama kali pada kongres, maka komitmen ini tidak hanya dituntut dari individu anggota Lekra pada setiap kerja kreatifnya, tapi juga dituntut dari Lekra sebagai organisasi.

Dalam pemahaman Lekra, gerakan politik harus didukung dengan gerakan kebudayaan. Dari sini Lekra memiliki strategi hendak mengembalikan kebudayaan ke tangan rakyat lagi. Maka bukanlah hal yang aneh apabila panggung-panggung pertunjukan rakyat menjadi prioritas perhatian. Di Jawa Timur ada Ludruk dan di Jawa Tengah ada Ketoprak, Tari dan Wayang. Klaten itu wilayah yang memiliki Dalang yang sangat banyak, ada yang mengikuti Lekra ada juga yang tidak ikut, tetapi tidak antipati terhadap Lekra.<sup>3</sup>

Kegiatan riil yang dilakukan Lekra sebagai contoh adalah pementasan di kalangan rakyat. Isu yang diambil adalah isu yang sedang terjadi di tubuh rakyat

---

<sup>2</sup> *Harian Rakjat* 15 Februari 1959

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hersri Setiawan, Sekretaris Umum Lekra 1959 10 April 2011 pukul 15.00 WIB

pada waktu itu. Sehingga tidak perlu teori yang jauh-jauh. Dengan demikian, isu dan pertunjukan tersebut lebih terasa di hadapan penontonnya. Problem yang dirasakan masyarakat dipertunjukkan kepada rakyat itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah, pedoman yang diangkat oleh Lekra adalah realisme kritik. Sampai pada tahapan ini, masyarakat sudah paham apa yang dimaksud dengan pertunjukan Lekra.<sup>4</sup>

Memasuki tahun 1960-an, Lekra menjadi organisasi yang lebih mapan. Anggota Lekra sudah berjumlah lebih dari seratus ribu orang. Klaim ini mungkin saja berlebihan mengingat Lekra tidak pernah menjalankan sistem keanggotaan resmi. Saat Kongres Kebudayaan ke-II yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) di Bandung, Lekra menempatkan rakyat sebagai akar kebudayaan. Dengan begitu, tidak ada lagi pagar antara rakyat terbawah dan rakyat terpelajar ataupun rakyat kawula dan rakyat elite.<sup>5</sup>

### **1. Konsep Turun Ke Bawah (Turba)**

Sejak tahun 1960 Lekra menetapkan Turba secara tersurat sebagai metode kerja, dan bahkan menegaskan secara nyata sebagai gerakan. Itu berarti "turba" tidak dilakukan secara individual dan spontan, melainkan secara berencana dan sebagai urusan bersama. "Turba" lalu mendapat bobot baru dan nuansa makna yang lebih bersegi banyak. "Turba" bukan lagi merupakan metode kerja penciptaan saja, tapi juga metode kerja pengembangan dan kegiatan organisasi, metode kerja pengenalan secara kongkret kehidupan seni dan budaya

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Surat Budaya 3, Sekali Lagi Tentang Turba - Gerakan Turun Ke Bawah oleh Hersri Setiawan. [http://www.facebook.com/note.php?note\\_id=231155710232574](http://www.facebook.com/note.php?note_id=231155710232574). Diunduh pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 23.12 WIB.

di "bawah", dan metode kerja pendidikan dan penyadaran diri serta pendewasaan diri sebagai pekerja kebudayaan rakyat.<sup>6</sup>

Seperti yang lazim dimaksud ketika itu, seniman dan sastrawan pada umumnya lahir dari tengah-tengah masyarakat menengah, dan malahan bisa lebih dipertegas lagi dari masyarakat terpelajar di kota. Mereka, ketika itu, masih memandang kesenian rakyat semacam wayang, ketoprak, lenong, ludruk, dagelan, keroncong, penembang macapat atau babad (yang dulu biasa dilakukan selama "selapan" malam usai kelahiran atau setidaknya selama belum "puput puser" (tanggal tali pusar), dan semacamnya), bukanlah kesenian melainkan tontonan atau hiburan atau "sekedar" tradisi rakyat.<sup>7</sup>

Para pelaku kesenian rakyat dan pendukung tradisi tutur itu tidak dipandang sebagai seniman dan sastrawan, melainkan, sebagai juru "pelipur lara". Di bawah Lekra semua kaum seniman dan sastrawan itu, baik yang "terpelajar" maupun yang "tidak makan sekolahan", disebut dalam cakupan satu istilah: pekerja kebudayaan rakyat.

"Turba" menjadi asas pedoman kerja Lekra. Maka juga bagi kaum pekerja kebudayaan rakyat yang memang berasal dari lapisan rakyat pun misalnya dalang, pemain wayang-wong di desa, pemain jathilan dan reog, penari ledhek dan penembang macapatan dan lain-lain, "turba" tetap berlaku sama seperti bagi para pekerja kebudayaan yang "terpelajar". Sebab, menjadi "wong cilik" belum

---

<sup>6</sup> Mengenai Gerakan Turun Kebawah terdapat dua macam pola turba yaitu turba dengan Tiga Sama (sama makan, sama diskusi, sama bekerja), dan turba Penunggang Kuda. Lihat dalam JJ Kusni, *op.cit.*, halaman 99.

<sup>7</sup> *Ibid*

sekaligus berarti sadar dengan sendirinya tentang keadaan dan kedudukan sendiri sebagai "wong cilik".<sup>8</sup>

Memang itulah akronim yang ketika itu lazim digunakan, baik dalam tulisan maupun dalam pembicaraan. Bagi sementara pihak yang kurang "sreg" atau sejatinya tidak menyetujuinya, dengan maksud menyindir terkadang suka memperpanjang akronim "turba" sebagai "turu bareng" alias "tidur bersama". Sedang pihak lawan-lawan PKI dan ormas-ormas pendukung serta simpatisannya, memperpanjang akronim baru itu dengan istilah yang jorok.

Tidak terlalu keliru, karena pihak yang bersangkutan yaitu pelaksana "turba" itu sendiri pun menjabarkan metode kerja "turun ke bawah" ini, demi mudah mencamkannya pelaksanaannya, sebagai praktik "tiga sama". Tiga Sama dengan urutan praktik pelaksanaan yang tidak boleh keliru, yaitu: pertama, "bekerja bersama"; kedua, "makan bersama"; dan ketiga, "tidur bersama".

Jadi pertama-tama bekerja dulu, baru kemudian makan, dan akhirnya tidur. Kerja sama itu pun tidak seperti kerja samanya kusir dan kuda, atau kuli dan majikan. Tapi sama jenis pekerjaan yang dikerjakan. Makan bersama bukan hanya urusan makan bersama-sama di satu meja yang sama, tapi yang satu makan nasi dan yang lain makan thiwul. Satu meja atau tidak, bukan soal. Tapi yang penting kesamaan jenis makanan yang disantap. Satu makan thiwul semua makan thiwul, satu makan nasi jagung semua makan nasi jagung, dan seterusnya. Juga perihal tidur bersama. Bukan perkara tidur di satu ruang yang sama, tapi yang satu berkasur dan yang lain tikar pun tidak. Juga bukan harus berarti bersama tidur di

tempat tidur yang satu dan sama seperti pengantin baru. Tapi yang diutamakan ialah, si aktivis atau si seniman tidur di atas tempat tidur dan dengan adat tidur yang sama seperti si pemilik rumah yang diturun-bawahi.<sup>9</sup>

## 2. Pedoman Lekra 1-5-1

Pedoman yang kerap kali dilekatkan dengan Lekra adalah Pedoman Politik sebagai panglima. Padahal diluar itu ada asas yang lebih penting dalam Lekra yaitu Asas 1-5-1 (Satu-Lima-Satu), yang pada masanya menjadi asas kerja para pekerja kebudayaan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).

Asas 1-5-1 adalah sebagai berikut : Satu yang pertama ialah: Politik sebagai Panglima.. Sedangkan Lima berikutnya, yang biasa disebut sebagai “Lima Kombinasi”, yaitu:

1. kombinasi antara kegiatan meluas dengan kegiatan meninggi;
2. kombinasi antara tinggi mutu ideologi dengan tinggi mutu artistik;
3. kombinasi antara tradisi baik atau tradisi positif dengan kekinian revolusioner;
4. kombinasi antara kreativitas individu dengan kearifan massa;
5. kombinasi antara realisme sosial dengan romantik revolusioner.

Satu yang kemudian ialah: Metode kerja Turun Ke Bawah, sebagai syarat untuk tercapainya lima kombinasi itu dengan baik.<sup>10</sup>

Kombinasi-kombinasi yang lima itu, dengan metode pencapaiannya melalui jalan “turba” dalam bentuk “tiga sama”, ini pun telah menjadi masalah

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Surat Budaya 1, Turba - 1-5-1, Bohemianisme – Gelandanganisme oleh Hersri Setiawan. [http://www.facebook.com/note.php?note\\_id=229916683689810](http://www.facebook.com/note.php?note_id=229916683689810). Diunduh pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 23.37 WIB

yang tidak sederhana dan kabur. Penyederhanaan dan pengaburan itu akan semakin menjadi sempurna, menurut anggapanku, jika tanggapan terhadap masalah ini dikemukakan dengan menempuh jalan pintas: 1-5-1 adalah reproduksi acak dari konsep pemikiran luar negeri. Khususnya konsep pemikiran Mao Zedong tentang sastra dan seni, seperti tertuang dalam pidatonya di depan “Pidato di Sidang Yen-an tentang Sastra dan Seni”.<sup>11</sup>

“Turun ke bawah” Lekra bersumber pada konsep hasil pemikiran Mao Zedong. Pendapat demikian sama sekali tidak salah. Tapi, walaupun begitu, juga tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Jika memperhatikan lima butir kombinasi itu, dan kemudian membaca kembali pidato Mao di Yen-an, ada kesamaan masalah-masalah yang diangkat dan diberi penekanan.

Pidato Yen-an memang sudah diucapkan Mao pada 2 Mei 1942. Adapun Lekra baru lahir pada 17 Agustus 1950. Tapi selama tahun-tahun itu seluruh dunia sedang dilanda amuk Perang Dunia II yang segera pula disusul oleh perang-perang kemerdekaan dan pembebasan di negeri-negeri bekas jajahan. Juga di seluruh dunia, Indonesia dan Tiongkok tak terkecuali. Barangkali perlu dicatat juga dalam hubungan ini, bahwa delegasi resmi PKI yang pertama ke luar negeri baru dikirim tahun 1950. Yaitu delegasi sembilan orang, di bawah pimpinan Njono dan tanpa tokoh kebudayaan (Lekra) di dalamnya, menuju Beijing. Selain untuk menghadiri perayaan satu tahun umur Republik Rakyat Tiongkok, juga untuk menghadiri Kongres Gerakan Buruh Sedunia Kawasan Oseania-Pasifik.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

Dengan mengingat hal tersebut di atas, lima kombinasi asas kerja para pekerja kebudayaan Lekra itu, pertama-tama pada sumber-sumber mereka sendiri. Yaitu sumber-sumber yang berupa dokumen tertulis, dan sumber-sumber sejarahnya yang tak tertulis. Sumber tertulis tersebut ada dua; pertama, yaitu Manifesto Lekra tahun 1955, yang kemudian disahkan sebagai Mukadimah Lekra oleh Kongres Nasional I di Surakarta tahun 1959; dan kedua, pada Manifesto Lekra yang diikrarkan di Jakarta tahun 1950 pada tempat dan tahun berdirinya organisasi ini.

Keanggotaan Lekra terbuka untuk siapapun tanpa ada syarat-syarat yang merumitkan. Salah satu garis yang menghubungkan keanggotaan adalah kecintaan pada seni dan budaya, serta kecintaan pada rakyat itu sendiri. Meskipun demikian gerak Lekra yang mengusung seni adalah politik memiliki tidak berpengaruh besar terhadap anggotanya. Kebanyakan anggota Lekra bergabung karena kecintaan mereka terhadap seni seni budaya. Bagi mereka yang menyukai tari, maka dapat bergabung dengan tari. Bagi mereka yang menyukai keroncong (musik) bisa bergabung dengan keroncong. Keanggotaan ini tidak memiliki kartu identitas. Sehingga klaim anggota Lekra berjumlah banyak bukanlah isapan jempol. Masyarakat umum, dari berbagai ras, suku, kebangsaan dan agama dapat bergabung dengan Lekra. Asalkan mereka memiliki visi misi yang sejalan dengan organisasi budaya ini.<sup>13</sup>

Akhirnya, pada Konfernas Lekra 1962, ditetapkan perumusan pedoman gerak Lekra, yang terkenal dengan nama prinsip 1-5-1. Dengan Berlandaskan azas

politik sebagai panglima, menjalankan 5 kombinasi, yaitu meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, memadukan tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner, memadukan kreativitet individuil dan kearifan massa, dan memadukan Realisme Sosialis dan romantik revolusioner, melalui cara kerja turun ke bawah.

Seniman memang tidak bisa diatur ataupun disetir oleh kepentingan kepentingan politik tertentu. Politik yang diyakini Lekra adalah semangat dalam revolusi kebudayaan untuk terus menyokong revolusi 1945, sedangkan tekanan ataupun ajakan untuk berpolitik praktis bagi Lekra bukanlah sebuah kewajiban. Seniman memerlukan independensinya agar dapat menghasilkan karya yang matang. Prinsip yang demikianlah yang juga dianut oleh seniman Lekra.<sup>14</sup> Kepentingan partai juga harus dibedakan dengan kepentingan Lekra (khusus untuk anggota Lekra yang bergabung dengan PKI). Bahkan seniman Lekra yang satu memiliki pandangan pemikiran yang berbeda dengan seniman Lekra yang lain. Pemahaman ini juga berlaku pada perbedaan pemahaman pandangan mengenai karya seni antara seniman Lekra sebagai individu dengan Lekra secara organisasi. Seniman Lekra tidak menganggap adanya teori satu bebek, artinya apa yang diperintahkan dari atas, akan selalu diamini oleh mereka yang ada di bawah.

---

<sup>14</sup> Pernyataan Oey Hay Djoen, pengurus pusat Lekra dan anggota PKI, dalam dokumenter Tjidurian 19. Oey Hay Djoen awalnya tinggal di Semarang, lalu berpindah ke Jakarta. Di Jakarta inilah rumahnya di Jalan Tjidurian 19 kemudian menjadi studio seni Lekra. Lihat Film Dokumenter *Tjidurian 19: Rumah Budaya Yang Dirampas*.

Dalam *frame* (bingkai) berpikir Lekra, masing masing seniman memiliki hak untuk bebas menentukan arah karyanya atau pemahaman pemikirannya.<sup>15</sup>

Pada tahun 1963, PKI mengadakan kegiatan dan agenda besar-besaran untuk ‘memerahkan’ para seniman, pemuda dan aktivitas wanita. Hal ini ditujukan untuk mencapai cita cita revolusi yang dapat didukung oleh rakyat kebanyakan. Dari golongan seni, Lekra juga tidak luput untuk dijadikan target pemerahan PKI ini. Bahkan para seniman yang tergabung di Lekra sekaligus merupakan anggota PKI, didesak dan didorong untuk memproklamirkan diri bahwa Lekra adalah bagian dari PKI. Desakan dan dorongan ini ditentang oleh para seniman Lekra dan bahkan memunculkan konflik antara PKI dan Lekra.<sup>16</sup> Meskipun ada juga seniman dari Lekra yang menuntut untuk bergabung sesuai konsekuensi dari seni untuk politik atau seni revolusioner. Tetapi sampai dengan kurun waktu 1965, Lekra tidak memproklamirkan diri sebagai bagian dari PKI.

Pada tahun 1964, Lekra menolak menjadi bagian dari salah satu organisasi PKI, karena tujuan Lekra bukan semata mata untuk tujuan PKI. Para seniman Lekra berpendapat bahwa secara tegas berpihak kepada rakyat dan mengabdikan kepada rakyat adalah satu satunya jalan bagi seniman seniman, sarjana-sarjana, maupun pekerja-pekerja kebudayaan lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal yakni hasil yang tahan uji dan tahan waktu. Kegagalan dalam memerahkan Lekra

---

<sup>15</sup> Pernyataan Amrus Natalsya, Seniman Lekra, pendiri Sanggar Bumi Tarung Jogjakarta, dalam Dokumenter *Tjudirian 19 Rumah Budaya yang dirampas.*

<sup>16</sup> *Ibid*

ini akhirnya membuat PKI mengadakan KSSR (Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner).<sup>17</sup>

Lekra Surakarta juga tampil dalam berbagai pelatihan yang kerap diadakan di berbagai tempat, seperti balaikota, gedung Sin Min (Mesen) dan kampung-kampung. Pelatihan ini diperuntukkan bagi seluruh kalangan. Siapapun yang tertarik, boleh mengikuti pelatihan. Bentuk pelatihannya pun macam-macam di antaranya pelatihan tari, yang biasanya mendatangkan guru dari Sekolah Seni ataupun dari pihak Mangkunegaran/ Kraton, dan pelatihan *Drum Band* (pasukan musik) yang biasanya dilatih oleh pihak militer dari Magelang. *Drum Band* ini dikenal dengan sebutan *Drum Band Kota* yang kerap berkumpul di balaikota Surakarta. Kualitas grup drum band ini tergolong bagus karena merupakan juara satu pada acara drum band se-Jawa Tengah. Anggotanya tidak hanya pemuda dan pemudi melainkan juga mereka yang mau berlatih alat musik. Seperti senar drum, *bass*, *hit hat*, *saxophone* dan lain lain. Pelatihan *drum band* pernah diadakan di Banyu Anyar selama seminggu yang diikuti sekitar seratusan orang.<sup>18</sup>

## **B. Lekra Surakarta dan Dukungan Seniman Surakarta Terhadap Revolusi Budaya.**

Selain Seni tari dan drum band, Lekra Surakarta juga menghidupkan kegiatan ketoprak, wayang, seni musik, paduan suara dan beberapa jenis aktivitas budaya lainnya. Untuk seni tari, Lekra Surakarta memang memiliki banyak

---

<sup>17</sup> Pernyataan Oey Hay Djoen, pengurus pusat Lekra dan anggota PKI, dalam Film Dokumenter *Tjidurian 19: Rumah Budaya Yang Dirampas*.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sularto, seniman Lekra Surakarta (Penari dan pemain Drum Band Kota).

pengikut, karena di Surakarta sendiri kantong-kantong seni tari cukup banyak. Seniman tari baik dari sekolah seni Surakarta maupun Sriwedari seringkali mendapat banyak undangan dari Lekra. Bahkan konferensi tari nasional juga diadakan di Surakarta.<sup>19</sup>

Konfernas ke-I Lembaga Tari Indonesia (LEKRA) dibuka tanggal 31 Maret. 1964 di Sriwedari, sebagai taman pusat kebudayaan dikota Surakarta. Semua utusan PD (Pimpinan Daerah) Lembaga Tari dari seluruh Indonesia hadir dalam Konfernas tersebut. Dalam acara tersebut, Ketua Lembaga Tari I Indonesia, Drs. Sunardi, menyampaikan laporan umum, meliputi pekerjaan Lembaga Tari sejak terbentuknya divisi Seni tari lekra dalam situasi senitari dari Kongres Nasional ke-I Lekra, juga di Sriwedari Surakarta, Januari 1959 sampai tahun 1964<sup>20</sup>

Pimpinan Pusat Lekra juga datang ke Surakarta diantaranya Banda Harahap dan Njoto, juga Prof. Bakri Siregar dan S. Anantaguna. Konfernas berlangsung hingga tanggal 4 April dan pada malam itu akan dilakukan resepsi penutupan di Balai Kota Surakarta. Dalam Konfernas tersebut diadakan festival tari kreasi baru (gabungan dari beberapa tari daerah) yang diikuti sedikitnya 4 daerah, yaitu dari perwakilan Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan mungkin Sumatera Barat serta Maluku.

Sedemikian pentingnya dunia tari bagi keberlangsungan kebudayaan Indonesia sampai-sampai Pengurus Pusat Lekra turut mengeluarkan himbauan agar delegasi-delegasi daerah sudah ada di Surakarta pada 23 Maret 1964 dan

---

<sup>19</sup> Wawancara Ibu Sugiyati, mantan seniman Lekra Surakarta (penari)

<sup>20</sup> *Harian Rakjat* 23 Maret 1964

sudah bersiap sebaik-baiknya untuk menyukseskan Konferensi ini. Diharapkan kepada semua daerah agar melakukan kegiatan-kegiatan dalam menyambut konfernas Tari tersebut, misalnya dengan pementasan-pementasan tari di daerah masing-masing, pemasangan spanduk dan lain-lain.<sup>21</sup>

Konferensi ini dibuat semeriah mungkin dan jauh dari membosankan. Rapat-rapat serius memang menjadi pemandangan umum, tapi di luar rapat tersebut digelar festival-festival tari dan sekaligus panggung evaluasi sudah seberapa jauh hasil kerja pembaharuan yang dilakukan Lekra selama ini atas dunia tari Indonesia. Festival tari diselenggarakan tiap pagi dan malam di Sriwedari yang diikuti rombongan dari 10 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Secara individual, para maestro tari dari pelbagai daerah juga unjuk kebolehan, termasuk seniman-seniman wayang orang Sriwedari seperti Rusman, Surono, Darsi Martoyo dan kawan-kawannya. Pentas ini cukup meriah karena rombongan dari Bali saja sampai mengirimkan 28 orang untuk mengisi slot pertunjukan. Di antara yang sudah dipertunjukkan terdapat antara lain "Gatotkatja Kroda" ciptaan Sunardi dan Rusman serta Surono. Ada juga tari "Sakera" dan "Romo Tani" dari Jember, "Blondjo Wurung", "Sudjud", tari "Bagi Hasil" Sudarno, "Humor Olahraga" Suprpto, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Konfernas dibuka dengan mendengar dan mendiskusikan Laporan umum Pengurus Pusat Lembaga Tari Indonesia berjudul "Kembangkan Tari Nasional dengan Mengobarkan Kebangkitan Kaum Tani" yang disampaikan Sunardi.

---

<sup>21</sup> *Harian Rakjat* 23 Maret 1964

<sup>22</sup> *Harian Rakjat* 23 Maret 1964

Makalah Sunardi itu didampingi pidato Pimpinan Pusat Lekra yang diwakili Prof. Bakri Siregar selaku Ketua Lembaga Sastra Indonesia (Lestra/ Lekra) yang menekankan tentang ikhtiar yang tiada henti mengganyang tari imperialisme dan revisionis. Pramoedya Ananta Toer juga mendapatkan waktu untuk berpidato. Begitu pula Basuki Resobowo dari Lesrupa, Banda Harahap, Njoto, dan juga sambutan-sambutan dari beberapa utusan daerah.<sup>23</sup>

Konfernas I Lestari ini menghasilkan beberapa resolusi antara lain mengembangkan tari nasional dengan mengobarkan kebangkitan kaum tani dalam menghadapi dominasi imperialisme Amerika Serikat sebagai musuh politik, ekonomi, maupun musuh kebudayaan yang mengarah pada hujatan atas kesenian Rakyat dan dimerosotkannya kesenian sekadar barang dagangan, Konfernas dengan suara bulat dan mutlak menyatakan Perlawanan itu yang dirumuskan dalam 3 tugas pokok yang harus dikerjakan, yaitu: menjebol, membangun, dan integrasi.

Membangun tari nasional tidak akan mungkin tanpa mendjebol kebudayaan imperialis. Bitjara tentang pembangunan jang nasional adalah penghianatan, djika tidak melakukan pendjebolan lebih dulu terhadap semua pengaruh imperialisme jang langsung maupun jang didukung oleh penghisap-penghisap besar dikota dan didesa, jaitu kaum kapitalis birokrat dan tuan tanah djahat, serta kaum Amerikanis, jaitu kaum intelektual kanan jang mendjadi tengkulak teori dan konseptor eksplorasi imperialisme Amerika Serikat.

Membangun tari nasional harus berdjalan dengan dua kaki, jaitu mengembangkan tari daerah melalui penggalian, dan pengolahan dan mentjiptakan kreasi-kreasi baru jang memiliki kepribadian nasional, jaitu jang mentjerminkan semangat dan djiwa penjelesaian tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai akarnja. Membitjarakan penjelesaian tuntutan Revolusi Agustus 45 adalah omong kosong tanpa membitjarakan perdjungan kaum tani untuk membebaskan diri dari penghisapan feodal didesa. Sikap jang tepat dalam mentjiptakan kreasi

baru, ialah berani, bersungguhan dan rendah hati serta memegang teguh dua setia, jaitu setia kepada Rakjat dan setia pada kesenian.<sup>24</sup>

Hubungan Lekra dengan badan budaya lain juga tidak selalu berseberangan, bahkan lebih banyak saling mendukung. Salah satunya dicontohkan dengan kerjasama dengan Bakoksi (Badan Kontak Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia) yang dibentuk jauh sebelum Lekra didirikan yakni tahun 1937. Hubungan keduanya terjalin dikarenakan sama-sama menjadi kantong seni dan budaya sekaligus melanjutkan cita-cita revolusi Indonesia 1945. Kedekatan Bakoksi dengan Lekra ini yang akhirnya mendekatkan Bakoksi dengan PKI. Diantara ketiganya terjalin hubungan saling melengkapi. Kerjasama itu, misalnya, terlihat bagaimana Harian Rakjat mendukung Festival dan Kongres Ketoprak I di Jogjakarta pada 1957 di Jogjakarta. Bagi Bakoksi, dukungan koran politik nasional dari partai bermassa 6 juta dengan oplah terbesar di Indonesia itu adalah sebuah anugerah. Dengan demikian, perkembangan dunia ketoprak bisa terbaca dan diapresiasi publik dan bukan hanya dinikmati oleh kalangan ketoprak sendiri.<sup>25</sup>

Kerjasama Lekra dan Bakoksi makin menguat dan erat ketika musim Festival Kongres Ketoprak II dilaksanakan di Gedung Kesenian Sriwedari pada 1964. Di Kongres II ini, sikap politik kebudayaan Bakoksi tidak lagi dibedakan dengan politik kebudayaan yang diusung Lekra. Keduanya menerima dan mendukung sepenuhnya Manipol dan berbaris dengan kekuatan-kekuatan

---

<sup>24</sup> *Harian Rakjat* 12 April 1964

<sup>25</sup> *Harian Rakjat* 24 Juli 1964

revolusioner di Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno. Di Kongres ini pula kehadiran Lekra dan organisasi lainnya membaur.<sup>26</sup>

Kongres Nasional Ketoprak II dibuka Ketua Bakoksi Pusat dan sekaligus anggota pimpinan Pusat Lekra Sudjadi. Menurut Sudjadi, Kongres II dimaksudkan untuk membicarakan pembaruan ketoprak sesuai dengan yang digariskan Manipol. Dengan demikian bisa lebih baik lagi pengabdian kepada Revolusi dan Rakyat. Sidang Kongres yang dimulai pada 26 Juli ini dihadiri utusan dari pelbagai daerah Indonesia. Selama sidang-sidang diadakan beberapa acara dan dibacakan sambutan tertulis dari Ketua CC PKI DN. Aidit mengatakan:

Hendaknja para seniman ketoprak menjadari sedalamnja mengenai perjuangan jang amat penting dalam membangkitkan dan mengembangkan kekuatan revolusioner Rakjat Indonesia. Saja menjambut dengan gembira para mahasiswa djuga sudah mulai aktif dalam mengembangkan kebudajaan. Dilihat dari segi kelahirannja dan perkembangannja, ketoprak adalah kesenian Rakjat dan mempunyai tradisi revolusioner. Ia dilahirkan dari dan berkembang dikalangan kaum tani dan berintegrasi dengan gerakan revolusioner rakjat Indonesia. Karena ketoprak sudah sedjak lahirnja mendjadi djurus umum tani dan Rakjat pekerdja, kaum kolonialis dan feodal sangat takut. Mulanja mereka mengedjek kesenian Rakjat ini supaya kesenian mendapat pasaran, tetapi setelah ini tidak berhasil maka ada suatu misi mereka melarang pertunjukan ketoprak.

Seni Ketoprak tidak boleh ketinggalan dalam mendorong madju poros gerakan tani kita, jaitu gerakan "6 Baik", gerakan untuk: (1) naik upah buruh tani, (2) naik taraf kebudajaan kaum tani, (3) naik taraf kesadaran politik kaum tani, (4) naik produksi pertanian, (5) turun bunga uang pinjaman, dan (6) turun sewa tanah. Gerakan Kebudajaan Baru dan Gerakan 6 Baik merupakan dua sendjata ampuh kaum tani dalam perdjungan mengganjang "7 setan desa" terutama mengganjang tuan tanah jahat dalam rangka mengkonsekuwenkan pelaksanaan, membongkar pelanggaran dan menghukum pembangkang-pembangkang terhadap Undang undang Pokok Agraria dan Undang undang Perdjangjian Bagi Hasil."<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Harian Rakjat* 24 Juli 1964

<sup>27</sup> *Harian Rakjat* 24 Juli 1964

Selain Aidit, pada kongres ini hadir juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, Pimpinan Pusat Himpunan Sarjana Indonesia (HIS), dan Dewan pimpinan Pusat Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) turut memberikan sambutan. Yang juga tampil menyampaikan usul-usul adalah Dewan Nasional SOBSI, Djadi Wirosubroto dari Dewan Pimpinan Pusat Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Sanitari Indonesia (Lestari/ Lekra), dan Lembaga sastra Indonesia (Lestra/ Lekra).

Wakil Walikota Surakarta Sutarno dalam sambutannya menyatakan bahwa ketoprak yang semula milik Rakyat, kemudian dirampas oleh kaum feodal, harus dipegang kembali dan dijadikan senjata di tangan Rakyat untuk menyelesaikan revolusi Indonesia. Sunardi atas nama Pimpinan Pusat Lekra. Dalam sambutannya menandakan bahwa ketoprak dalam situasi pengganyangan kebudayaan imperialis AS dan kebudayaan feodal, harus benar-benar dijadikan potensi kebudayaan nasional yang kuat, terutama dalam membangun kaum tani dan gerakan kebudayaan baru di desa.<sup>28</sup>

Kongres Ketoprak II ini menetapkan pengurus baru Pimpinan Pusat Bakoksi. Akronim Bakoksi pun diubah menjadi "Badan Kesatuan Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia". Kongres memilih 60 orang anggota pleno Dewan Pimpinan Pusat, di antaranya 15 orang yang duduk dalam Kesekretariatan dengan Sudjadi sebagai ketua, Rukinah dan Sumartodjo sebagai wakil, Rukiman dan Badawi sebagai sekretaris, Kadariyah sebagai bendahara. Sedangkan anggota

adalah Sasmito, Supardi, Sapardal, Kuslan, Budiman, Sismadi, Sujatin, Sudibjo, Ei Giok-gwang, dan Susanto.<sup>29</sup>

Festival dan Kongres Ketoprak yang berakhir pada 31 Juli ini juga ditutup dengan pengumuman pemenang lomba panggung ketoprak. Juri yang diketuai Rukiman dan Sunardi memutuskan bahwa juara pertama adalah Bakoksi Besuki Djember dengan cerita "Pak Sarekah". Juara kedua Ketoprak Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan cerita "Geger Gunung Sewu". Juara ketiga jatuh ke Bakoksi Jogja dengan cerita "Pahlawan Sagrib". Sementara, Bakoksi Baperki Magelang menjadi juara keempat dengan cerita "Sampek Engtay".<sup>30</sup>

Dunia seni musik Surakarta memiliki peran tersendiri terkait perkembangan Lekra. Lekra sendiri pernah mendukung Gesang dan melakukan protes ketika lagu ciptaan Gesang dengan judul "sapu tangan" diserobot oleh Malaysia. Peran seniman musik Surakarta terhadap kegiatan Lekra juga cukup besar, bahkan maestro keroncong Gesang dan Waljinah disebut pernah turut serta dalam kegiatan kegiatan budaya Lekra. Di Surakarta juga muncul reinkarnasi musik serta terbentuknya organisasi musik Indonesia. Surakarta yang juga merupakan tempat lahirnya biduan-biduan atau bintang-bintang radio dan komponis-komponis turut meramaikan revolusi di bidang kebudayaan. Muncullah organisasi musik bernama HOMI (Himpunan Organisasi Musik Indonesia). Organisasi ini didirikan atas inisiatif 5 perkumpulan Orkes di kota Surakarta.

Pembentukan diselenggarakan di kelurahan Sudiroprajan pada 20 Februari 1964 yang dihadiri sebanyak 23 organisasi musik dan keroncong. Dalam

---

<sup>29</sup> *Harian Rakjat* 24 Juli 1964

<sup>30</sup> *Harian Rakjat* 23 Agustus 1964

kumpulan Orkes itu mereka bercita-cita untuk meningkatkan mutu musik Indonesia baik isi maupun seninya yang sehaluan dengan garis negara; manipol. Caranya, mereka menggali dan mengumpulkan lagu-lagu lama ataupun baru, mendorong terciptanya lagu-lagu kreasi baru dan secara rutin mengusahakan penyebarannya. Kegiatan lainnya yang cukup bagus adalah menyelenggarakan aktivitas untuk kesejahteraan sosial bagi para seniman di bidang musik.

Lahirnya HOMI adalah pelopor bagi kemajuan seni musik di Indonesia. HOMI berdiri, dan berhasil menghimpun 2,5 organisasi musik baik organisasi yang berupa Orkes, Kroncong Orkes, Band, maupun Paduan Suara. Semua organisasi tersebut praktis menjadi pembantu siaran RRI. Jadi, semua biduan atau bintang-bintang radio menjadi anggota HOMI tanpa terkecuali.

Sifat keanggotaan HOMI terbuka. Siapa pun bisa bergabung di dalamnya. Selain organisasi juga perorangan yang memiliki keahlian musik, dan anggota-anggota kehormatan yang berjasa bagi organisasi musik. Pekerja-pekerja seni dan para selebritas di bidang tarik suara banyak bergabung dengan HOMI, seperti Gesang pencipta lagu "Bengawan Surakarta" yang duduk di bagian Penerangan. Sedangkan ketua Mohamad Islam dan Sjamsuri.

Walikota Surakarta, Utomo Ramelan yang sekaligus seorang seniman duduk sebagai pelindung HOMI, Ketua oleh Mochamad Abdullah Islam dari Orkes Bunga Mawar, dan wakilnya Sjamsuri seorang veteran Bintang Radio dan Komponis. Sekretaris Pandusadjono dan Suwondo, Bendahara Supomo dan Suharni (Bintang Radio), Bagian Penerangan adalah Gesang (komponis Kenamaan), Pendidikan Sunarjo dan Jap Thian Jong, Kegiatan dan Organisasi

Wirosudjito dkk, Kesejahteraan Suhardiman S. Bakti dan Lim Gun San dan kawan-kawan.<sup>31</sup>

Aktivitas-aktivitas untuk kesejahteraan sosial bagi seniman-seniman musik terus dikembangkan HOMI. Diadakan pula usaha-usaha pendidikan musik, latihan-latihan, diskusi-diskusi, seminar-seminar, simposium-simposium, kritik seni, penerangan, penyiaran, pementasan, dan perlombaan-perlombaan. Juga sekaligus memperjuangkan perbaikan-perbaikan sosial bagi seniman-seniman musik.

Salah satu kegiatan yang dilakukan HOMI adalah pentas untuk memberi penghormatan kepada komponis W.R. Supratman yang oleh Lekra dianggap sebagai peletak tonggak musik kebangsaan. Pentas ini digelar HOMI pada 31 Oktober 1964 di Balaikota Surakarta bersamaan dengan peringatan acara Sumpah Pemuda.

Sesuai dengan namanya "Malam Simfoni Nasakom", di samping berhasil dengan sukses besar, acara ini pun berhasil menggalang persatuan poros Nasakom. Praktis seluruh organisasi musik dan biduan/biduanita, seniman/seniwati, musisi, komponis-komponis yang ada di Surakarta turut ambil bagian. Selain itu tampil pula bintang-bintang RRI daerah maupun nasional. Di antaranya juga tampil komponis Gesang yang membawakan lagu ciptaannya sendiri "Bengawan Surakarta", Waldjinah Karnijatun, Ismanto, Walujo, Nur Laila, H. Kamdi, dan Lian Nio, serta belasan biduan bintang radio lainnya yang menyemarakkan malam simfoni tersebut. Berbagai macam lagu dihadirkan;

dari lagu-lagu kroncong asli, hiburan, lagu-lagu band populer, seriosa, lagu-lagu orkes Hawaian Maluku, hingga lagu-lagu Revolusioner yang diisi kelompok paduan suara yang diikuti 300 orang pemuda-pemudi dari Paduan suara "Gita Para", "Permusyawaratan Pemuda Indonesia", "Perkumpulan Musik Koor Surakarta" (Katholik), dan "Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah Surakarta". Orkes musik dalam acara tersebut diikuti 30 biola lengkap. Dalam kesempatan ini dikeluarkan pernyataan seniman/seniwati Surakarta, yang menyadari peranan penting seni musik sebagai latihan revolusi, menyambut komando Bung Karno untuk menciptakan dan membawakan lagu-lagu dan musik yang berkepribadian nasional. Kemunculan Gesang dan kawan-kawannya pada acara HOMI ini berfungsi sebagai gebrakan untuk mengangkat musik keroncong pada tempatnya sebagai musik perjuangan.<sup>32</sup>

Peperangan antara budaya luar (barat/Amerika) dan budaya Indonesia selalu menjadi isu utama dalam Lekra. Adanya konflik antara mereka yang mendukung film film luar (Amerika) dengan pendukung perfilman nasional juga merembet ke Lekra. Hal ini merupakan kepanjangan seteru antara PABFIAS (Panitia Aksi Boikot Film Imperialis Amerika Serikat) dengan AMPAI. PKI sendiri mengambil sikap lewat organ budayanya KSSR. Sedangkan Lekra juga mengambil sikap sendiri mengenai film nekolim tersebut. Konflik di kawasan seni pertunjukan tersebut kemudian memunculkan aksi boikot terhadap film-film Amerika. Karena, ada anggapan bahwa Amerika melalui AMPAI berusaha

melakukan legalisasi agresi kebudayaan atas Indonesia. Pengurus Pusat Lekra juga menyerukan agar pemboikotan film dilanjutkan ke pemboikotan musik:

"Rakyat Asia Tenggara bukan hanya akan meneruskan perlawanan, tetapi pasti juga akan mengusir AS. Lekra atas nama 500ribu anggotanya mendesak kepada Pemerintah RI agar Paviliun Indonesia di New York Fair ditutup dan agar aksi boikot film-film AS diluaskan juga ke music ngak-ngik-ngok. Perkuat persatuan revolusioner, kalahkanlah kebiadaban"<sup>33</sup>

Pada Konferensi Nasional Lekra II bulan Agustus di Jakarta tahun 1964, Soekarno menyerukan pemberantasan segala kebudayaan asing yang gila-gilaan; dan, bahwa yang mesti dibangun adalah kebudayaan sendiri dan kepribadian sendiri. Lekra, di bidang film, lalu menyokong pemboikotan terhadap film-film asing, seperti Amerika dan juga India yang dianggap mewakili citra imperialis. Selanjutnya, membangun gerakan revolusioner anti film imperialis, Panitia Aksi Boikot Film Imperialis Amerika Serikat (PABFIAS), dan menyerukan pengusiran sindikat film Amerika di Indonesia, yaitu AMPAI.

Film *Ten Commandments* pada 15 September 1964 yang akan diputar kembali di bioskop UP Surakarta berhasil digagalkan. menurut Ketua Panitia Aksi Pemboikotan Film AS Jateng, Muljanto, menerangkan bahwa setelah melihat ada gelagat diputarnya film AS itu, Rakyat Surakarta langsung bergerak menggagalkannya. Sementara itu Pantjatunggal Surakarta, lewat Kikda, memerintahkan pembatalan pemutaran tersebut. Anjuran juga disampaikan kepada bioskop-bioskop yang lain agar jangan coba-coba memutar kembali film

AS sebab hanya akan meningkatkan aksi Rakyat anti imperialis dan tentu saja demi keamanan kota.<sup>34</sup>

Dalam dunia wayang dan pedalangan pun Lekra memberikan kebebasan berekspresi kepada anggotanya. Setiap dalang, anggota Lekra atau bukan, berhak membuat fragmen lakon yang hendak dipergelarkan, begitu juga berhak menciptakan lakon gubahan sendiri; mempergelarkan fragmen pakem yang sudah lazim, atau lakon yang digubah oleh dalang lain.

Dalam melakukan perbuatannya yang demikian, dalang yang bersangkutan tidak perlu minta persetujuan dari dalang si “pencipta” lakon carangan — yang memang tidak lagi diketahui, entah siapa. Sesuatu lakon carangan, setelah dipergelarkan, ia telah menjadi lakon milik umum. Setiap dalang boleh mempergelarkan ulang, seperti adanya atau pun bahkan diubah sana-sini menurut kehendaknya. Juga seseorang dalang tidak perlu minta ijin pergelaran dari polisi atau tentara. Perijinan untuk pergelaran lakon hanya dikenal dalam sejarah Orde Baru, dan terutama tentu saja sejarah tapol di Pulau Buru. Singkat kata di sepanjang sejarahnya, Lekra tidak pernah menciptakan pakem pedalangannya sendiri; begitu juga Lekra tidak pernah menciptakan anak wayangnya sendiri. Bahkan organisasi “dalang Lekra” juga tidak pernah dibentuk atau didirikan. Pedalangan atau cara mempergelarkan lakon “ala Lekra” barangkali ada, dan memang bisa disebut demikian, tapi ini merupakan pernyataan dari pelaksanaan

“politik pedalangan” Lekra. Hal ini bukan saja berlaku pada bidang pedalangan saja, melainkan juga berbagai bidang kebudayaan yang dihidupkan oleh Lekra.<sup>35</sup>

Pertunjukkan seni yang revolusioner di dalam pandangan Lekra tidak selalu ditampilkan dengan tema politik, karena revolusioner juga diartikan sebagai pembaruan zaman serta semangat perubahan. Lekra memiliki serangkaian kegiatan kebudayaan di lapangan secara kongkrit dan luas. Seperti turut mengembangkan wayang, ketoprak, ludruk dan kesenian-kesenian rakyat di berbagai daerah, mendorong perkembangan sastra suku bangsa, termasuk sastra dan seni dari etnik Tionghoa, dan masih banyak lagi. Dalam dunia seni musik, lagu “Genjer genjer” popularitasnya sangat digemari karena lagu ini melambangkan semangat kesederhanaan dalam hidup dan bertani. Wilayah drama juga tidak luput dari perubahan revolusi itu sendiri.<sup>1</sup>

Aktivis Lekra memiliki sejumlah karya sastra dan drama yang bagus diantaranya "Gerbong" Agam Wispi, "Siti Jamilah" karya Joebaar Ayub "Lagu Subuh" Zubir AA, "Batu Merah Lembah Merapi" Bachtiar Siagian, "Si Kabayan" Utuy Tatang Sontani, "Siti Jamilah" Yoebaar Ayub, "Buih dan Kasih" Bachtiar Siagian, "Si Nandang" Emha, "Awal dan Mira" Utuy Tatang Sontani, "Orang-orang baru dari Banten" Pramoedya Ananta Toer, drama-drama saduran seperti "Wanita Berambut Putih" dari pengarang Tiongkok, "Dosa dan Hukuman" ("Krome and Punishment" karya Dostoyesvky), "Saijah dan Adinda" Multatuli, dan lain lain. Drama Gerbong yang pernah dipentaskan oleh Lekra Solo di gedung Sin Min. Drama ini mengisahkan kehidupan sosial para pemuda dalam

---

<sup>35</sup> <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/10/01/0015.html>. Diunduh pada tanggal 11 April 2011 Pukul 20.27 WIB.

menghadapi zaman.<sup>36</sup> Pertunjukan Kongres Ketoprak II di Solo, Kelompok Ketoprak Mahasiswa menampilkan lakon “Pak Sakerah”. Lakon “Pak Sakerah” meskipun tidak mewakili kehidupan petani, tetapi mengangkat tema sosial dan pembaruan pada zamannya. Pementasan ini dianggap kreatif lantaran seni tari, musik dan gerakannya tidak ketinggalan zaman.<sup>37</sup>

Bentuk revolusi seni dalam Lekra juga dapat dilihat dari kritik terhadap sistem feodalisme. Kisah “Candi Prambanan” dimana Bandung Bondowoso membangun seribu candi dengan menggunakan bantuan jin. Sisi takhayul ini dikikis oleh Lekra dan Bakoksi dengan cara mengubah isi cerita dimana Candi Prambanan tidaklah dibangun oleh jin melainkan kekuatan rakyat yang tidak terkira jika dikumpulkan. Masih dalam cerita yang hampir sama adalah kisah “Rara Mendut”. Dalam pementasan Lekra dan Bakoksi, Rara Mendut dihadirkan sebagai sebuah kisah protes kesewenang-wenangan feodalisme terhadap kaum perempuan. Perempuan memiliki hak penuh untuk mendapatkan hak mereka.

Kisah lain yaitu drama “Mangsa Pacengklik di Trenggalek” karangan Pangsa Dat mengenai semangat peratni dalam menghadapi himpitan ekonomi serta masa paceklik bagi hasil panennya. Kisah yang diangkat tidak selalu dari khazanah lokal, ada juga kisah “Pahlawan Sakrib” dari Turki mengenai perjuangan Sakrib dalam membela kepentingan petani yang diserobot oleh seorang jenderal. Sang jenderal akhirnya dihukum mati oleh massa. Pementasan ini melibatkan penonton ikut bermain sebagai massa. Ludruk Tujuh Setan juga menjadi sebuah pertunjukan di daerah Jawa Timur yang populer. Ludruk ini

---

<sup>36</sup> *Harian Rakjat*, 6 Desember 1958

<sup>37</sup> *Harian Rakjat*, 14 Februari 1965

menceritakan tentang 7 setan kota dalam pandangan PKI yang harus dimusuhi. Pada akhirnya para petani berhasil mengalahkan 7 setan kota.

Dunia pewayangan juga tidak luput dari pembaharuan. Pertunjukan wayang revolusioner banyak menghilangkan istilah-istilah feodal dan banyak memasukan jargon-jargon revolusi. Metode ini justru banyak dihadiri oleh penonton ketimbang wayang yang biasa. Kisah Ramayana dan Mahabarata misalnya tetap digunakan namun dengan memasukkan istilah 'revolusi', 'kritik sosial', 'goro-goro', 'kekuatan rakyat' dan sebagainya. Pada tahun 1963, RRI pusat pernah menyiarkan wayang dengan judul "Kalimantara" karya Ki Dalang Muljadi Muljosabdo. Tema wayang ini seputar peristiwa ganyang Malaysia yang sedang hangat dibicarakan pada waktu itu.<sup>38</sup>

Hubungan konsep kebudayaan yang secara umum diusung Lekra tentu saja berbenturan dengan konsep kebudayaan lain. Polemik tentang "*l'art pour l'art*" ("seni untuk seni") dan "*l'art pour l'engagée*" ("seni bertendens", "memihak") telah terjadi di zaman Poejangga Baroe, dengan sosok-sosok tokohnya seperti Sutan Takdir Alisyahbana, Ki Hadjar Dewantara dan Sanusi Pane. Kemudian polemik segera sesudah zaman kemerdekaan, terutama sekali antara pembawa gagasan "humanisme universal" dengan "seni untuk rakyat". Sebagai kelanjutan saja dari perdebatan soal yang jadi persoalan antara "seni untuk seni" dengan "seni bertendens". Yang kemudian muncul dimunculkan polemik sekitar Manikebu dan Pramoedya/Lekra dengan "Lentera"nya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-mediastudies/-1808017polemik/#ixzz1POeC-T11N>. Diunduh pada tanggal 11 April 2011 Pukul 20.48WIB.

Polemik Lekra versus Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada tahun 1963 juga berdampak di Surakarta. Konsep "Manifesto Kebudayaan" disusun oleh Wiratmo Soekito pada tanggal 17 Agustus 1963 yang akhirnya didiskusikan dengan beberapa penulis, pelukis, pengarang dan seniman, di antaranya: H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasuhut, Goenawan Moehammad, Bur Rasuanto, A. Bastari Asnin, Soe Hok Djinn (Arif Budiman), Ras Siregar, D.S. Moeljanto, Sjahwil, dan Djufri Tanissan, dalam sebuah pertemuan di Jl. Raden Saleh 19, pada tanggal 23-24 Agustus pada tahun yang sama. Lekra tidak mengenal kompromi dan melakukan *fait a compli* terhadap lembaga kebudayaan yang tidak berpihak kepada perjuangan kebudayaan rakyat. Akibat adanya sikap tersebut kemudian terjadi friksi di kalangan lembaga kebudayaan, sehingga cita-cita untuk membuat front perjuangan kebudayaan tidak terwujud.

Secara umum, di Surakarta, kalangan seniman terbagi menjadi dua bagian, seniman sosialis dan seniman kapitalis. Seniman sosialis adalah para seniman yang kebanyakan berkecimpung di PKI dan PNI, sedangkan seniman kapitalis adalah para seniman yang sepenuhnya mengabdikan diri pada seni untuk seni. Hal ini merupakan buntut dari seni dalam dunia manifesto politik, bahwa seni untuk politik. Slogan seni untuk rakyat Lekra membias menjadi seni untuk politik. Kalangan seniman di Surakarta dalam partisipasi aktifnya di kancah kebudayaan dibedakan menjadi 2, mereka yang aktif di LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) milik PNI dan mereka yang tergabung dalam Lekra, yang dianggap berafiliasi dengan PKI.

Perbedaan-perbedaan pandangan mengenai seni dan sastra yang berpangkal pada perbedaan-perbedaan pendirian politik, sudah sejak lama kelihatan dalam dunia sastra Indonesia. Pada awal tahun lima puluhan terjadi polemik yang seru juga antara orang-orang yang membela hak hidup Angkatan 45 dengan orang-orang yang mengatakan “Angkatan 45 sudah mampus” yang berpangkal pada suatu sikap politik. Pihak yang berpaham realisme-sosialis, paham yang menjadi filsafat-seni kaum komunis aktif mengadakan polemik. Penganut paham realisme-sosialis yang paling keras teriakannya ialah AS Dharta yang menjadi pokok soal bahan polemik-polemik ialah paham “seni untuk seni” dan “seni untuk rakyat”. Orang-orang yang menganut paham realisme sosialis berpaham “seni untuk rakyat” sambil mengutuk orang-orang yang berpaham “seni untuk seni” sebagai penganut “humanisme universal” yang dicapnya sebagai filsafat kaum borjuis kapitalis yang bobrok. Karangan-karangan yang ditulis oleh pengarang bukan anggota Lekra, asalkan menguntungkan bagi pihak Lekra, maka karangan tersebut diterbitkan juga. Misalnya kumpulan sajak Sitor Situmorang yang berjudul “Zaman Baru” tahun 1962 diterbitkan oleh organ penerbitan Lekra.

Karena adu kekuatan politik yang kuat di kalangan elit, biasanya juga sampai kepada kedua organisasi ini. Namun dalam kancah seni dan budaya, meskipun ada persaingan, akan tetapi tidak secara keseluruhan mengkotak-kotakkan para seniman Surakarta. Saling mengundang dalam acara dan hajatan dalam berbagai tingkatan merupakan bukti bahwa kerja mereka sebagai seniman adalah nyata. Tanpa adanya embel-embel politik dan sebagainya. Sehingga, ketika ada seorang seniman Lekra yang diundang untuk mengisi acara kaum PNI dan

sebaliknya, maka si seniman akan datang untuk mengisi. Meskipun tidak semuanya memiliki pola pikir yang demikian.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sularto, *commit to user* mantan seniman Lekra Surakarta, Selasa, 10 Mei 2011 pukul 13.00 WIB

## **BAB IV**

### **KONDISI LEKRA SURAKARTA 1965-1966**

Benturan pemahaman dan gerakan budaya tidak menjadi monopoli tunggal dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Perbedaan yang terjadi antara kelompok Manikebu (Manifesto Kebudayaan) dan Lekra berakhir pada diberangusnya kelompok Manikebu oleh presiden Soekarno pada tanggal 8 Mei 1964. Langkah tersebut diambil sebagai tindakan defensif karena Manikebu dianggap telah membuat manifesto baru di luar manifesto politik (Soekarno) yang ada.<sup>1</sup>

Keberadaan Lekra setelah itu hampir dikatakan tidak memiliki lawan organisasi kebudayaan yang kuat, namun bukan berarti Lekra bebas dari benturan isu-isu politik yang ada. Sebaliknya, menjelang kurun waktu 1965 atau setelah 15 tahun Lekra hadir di kancah kebudayaan Indonesia, kondisi Lekra semakin terbawa arus kuat perpolitikan Indonesia. Isu-isu yang semakin digeluti Lekra dalam persoalan politik dan budaya tidak lain adalah persoalan perlawanan terhadap kebudayaan asing/barat.

#### **A. Pemberangusan Lekra dan Karya-karyanya Pasca G 30 S**

Konstelasi politik menjelang peristiwa 1965 semakin menunjukkan perang ideologi di Indonesia. Beberapa isu yang banyak muncul seperti Ganyang Malaysia, *New Emergenzing Force* (Nefo) dan *Old Established Force* (Oldefo),

---

<sup>1</sup> Alif Danya Muni. 2003. *9 Dari 10 Kata Bahasa Indonesia Adalah Asing*. Jakarta: Kelompok Penerbit Gramedia (KPG). Hlm 65

perang Manikebu versus Lekra, isu Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan wacana wacana sebagai akibat semakin menajamnya perang di dua kubu dunia (kapitalis dan komunis) sekaligus sebagai hasil dari kepemimpinan demokrasi dipimpin Presiden Soekarno.

Sejak tahun 1963, Lekra mulai mendekat pada isu-isu politik, terlebih lagi pada persoalan perang budaya dengan negara-negara yang disebut sebagai antek Nekolim (Neo Kolonialisme). Pada masa konfrontasi melawan Malaysia, Lekra dalam laporan umumnya yang dibacakan Joebaar Ajoeb pada Januari 1963, menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan pengaruh buruk kebudayaan asing.

Djadi, apa jang ditetapkan MPRS, jaitu "menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing", menolak invasi kebudayaan imperialis, melaksanakan apa jang pernah diserukan Bung Karno untuk membasmi "rokenrol-rokenrolan dikalangan pemuda dan mahasiswa terutama", membendung peng[er]ajangan neo-kolonialisme dilapangan ilmu dan kebudayaan dan mentjegah "Twist-twist society" dari kaum kapitalis birokrat, hal-hal itulah djustru juga kurang diperhatikan dan dilawan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Pada tahun 1964, informasi tentang pelaksanaan UUPA mulai menyebar sampai di tingkat desa. Selanjutnya upaya penerapan UUPA semakin gencar dilakukan. Pesta demokrasi pemilihan kepala desa pun semakin memarakan penerapannya. Garis politik yang disokong PKI ini juga dicermati oleh Lekra sebagai bantuan kepada rakyat. Bagi Lekra, implementasi dari pelaksanaan *Land Reform* adalah turba atau turun ke bawah. Para seniman Lekra turun ke desa-desa dan membaaur dengan kehidupan masyarakat di desa, lalu menuangkannya dalam hasil karya mereka. Hasil sidang pleno Lekra mengukuhkan dukungan terhadap

---

<sup>2</sup> *Harian Rakjat*, 19 Januari 1963.

macetnya pelaksanaan *Land Reform* tersebut. Bahwa Lekra benar-benar mengintegrasikan diri dengan kaum tani dan terutama sekali kaum tani miskin dan kaum tani tak bertanah, dengan jalan turun ke bawah dan menjalankan tiga sama." Dari sini Lekra juga terposisikan terlibat benih konflik antara kelompok yang pro dan yang kontra dengan UUPA. Akumulasi dari perebutan politik dari itu semua adalah munculnya gerakan 30 September (G 30 S). Gerakan 30 September atau kerap disingkat G30S, memang merupakan puncak perseteruan antara Soekarno bersama dengan PKI, dengan Angkatan Darat. *Harian Rakjat* dalam edisinya di awal Oktober menyebutnya sebagai konflik Internal angkatan darat, dan bagaimanapun tetap mendukung revolusi apapun demi kepentingan rakyat<sup>3</sup>.

Kegiatan budaya pada masa masa menjelang pecahnya revolusi 1965 tidak berhenti begitu saja. Lekra bahkan menggelar Konferensi Nasionalnya yang ke 15. PKI dan Konferensi Sastra dan Seni Rupa Revolusioner (KSSR)-nya juga mengadakan acara yang hampir sama. Pada tanggal 27 September 1965, PKI menggelar kunjungan budaya ke Cina bersama sekitar 500 orang anggota rombongan delegasi Indonesia lainnya. Selain utusan resmi pemerintah dan wakil organisasi-organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), rombongan ini sebagian besar diisi oleh delegasi PKI dan ormas-ormas kiri lainnya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan LEKRA. Anggota delegasi LEKRA,

---

<sup>3</sup> *Harian Rakjat*, 2 Oktober 1965

berkunjung ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) selama kurang lebih sebulan untuk studi budaya.

Setelah peristiwa G 30 S yang menyebabkan terbunuhnya 7 perwira angkatan darat di Jakarta. Simpang siur berita dan saling tuduh menyebar ke pelosok Indonesia. Setidaknya ada dua gerakan yang saling berebut pengaruh yaitu antara Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal.<sup>4</sup> Dewan revolusi dalam frame *Harian Rakjat* berfungsi untuk menyelamatkan presiden Soekarno dari kudeta dewan jenderal yang diboncengi Amerika Serikat dan CIA. Sedangkan pada harian Kompas, tuduhan dewan revolusi tersebut disebut sebuah kebohongan. Pelaku yang dituduh menggerakkan peristiwa tersebut adalah PKI. Tidak hanya PKI saja, tetapi organisasi massa baik yang underbouw dan yang dekat dengan PKI ikut terkena getah. Tidak terkecuali para seniman Lekra juga terkena imbas.

Lekra ternyata tidak pernah jadi bagian struktural ataupun lahir dari PKI, walaupun pada Sekretariat Pusatnya terdapat petinggi Politbiro seperti Aidit dan Njoto. Ide untuk melahirkan sebuah organisasi kerja kebudayaan tersebut tidak datang dari Njoto, Aidit, melainkan AS Dharta, MS Ashar, yang merupakan orang-orang dari Gelanggang Merdeka. Keberadaan orang-orang PKI/komunis dalam Lekra (beberapa diantaranya Oey Hay Djoen, Njoto, Aidit, dan lain lain) memang dibenarkan, tetapi tidak berarti semua yang dikatakan PKI itu selalu diterima dalam Lekra. Konsep budaya dan politik bagi Lekra sebenarnya juga terpisah tegas. Politik yang dimaksud Lekra adalah kondisi dimana budayawan atau seniman harus kritis terhadap politik agar tidak ditekan atau disetir oleh

---

<sup>4</sup> *Harian Rakjat*, 2 Oktober 1965 dan *Kompas*, 6 Oktober 1965. Surat kabar Kompas tidak terbit dari tanggal 3 – 5 Oktober 1965 sebagai tindakan yang diambil sesuai himbauan pemerintah.

kalangan politisi. Hal inilah yang menegaskan bahwa budayawan mau tidak mau harus terjun ke basis politik.

Usaha pemerahan PKI terhadap Lekra pernah dilakukan mula-mula lewat jalur organisasi, tetapi akhirnya gagal. Banyak orang Lekra non-partai komunis menolak. Pada 1964 muncul pemikiran untuk mem-PKI-kan Lekra. Apabila disetujui, maka akan diumumkan secara formal. Lekra menolak strategi tersebut karena mereka adalah organisasi kebudayaan yang merdeka dan tujuan-tujuannya telah termaktub dalam Mukaddimah. Bahkan anggota Sekretariat Pusat Lekra yang notabene wakil ketua II CC PKI, Njoto, menolak tegas gagasan memerahkan Lekra.

Lekra bukanlah alat politik PKI, melainkan sealiran (politik) dengan PKI. Penggambaran Lekra sebagai “alat” PKI terlalu dibuat-buat karena seakan-akan ada jalur komando langsung dari Moskow dan Peking melalui Politbiro PKI, lalu ke pimpinan pusat Lekra sampai ke basis keseniannya. Gambaran semacam ini tidak mungkin terjadi dalam organ sukarela seperti Lekra yang tidak memiliki keanggotaan terikat, misalnya dengan kartu anggota, atau iuran wajib. Fungsi Lekra di sini lebih pada jaring penghubung antara organ budaya satu dengan yang lainnya dan sekaligus mesin independen politik revolusioner. Hubungan keduanya mungkin lebih tepat diistilahkan sebagai “keluarga komunis” Istilah itu menggambarkan hubungan-hubungan lentur daripada hubungan organisatoris dalam menunjukkan relasi PKI dengan organ-organ diluarnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Anggapan tersebut muncul dari Keith Foulcher dalam risetnya *Social Commitment in Literature and Arts* sedangkan istilah keluarga komunis adalah kalimat dari Saskia E Wirengga peneliti gerakan perempuan di Indonesia. [Http://sayamenulis.blogspot.com/2006/01/turba-dan-55-tahun-mukaddimah-lekra.html](http://sayamenulis.blogspot.com/2006/01/turba-dan-55-tahun-mukaddimah-lekra.html) diunduh pada 18 Agustus jam 12.00 WIB

Lekra memang tidak dapat dikatakan bersih dari PKI. Tetapi, juga bukan berarti berinduk pada PKI. Kesepahaman ideologi antara Lekra dan PKI menempatkan Lekra dalam posisi yang terfasilitasi. Contohnya saja, karya tulisan seniman Lekra kerap dimuat di surat kabar *Harian Rakjat* milik PKI. Gantinya, Lekra memberikan dukungan pada acara-acara kebudayaan PKI. seperti pawai massa dan kongres.

Beberapa orang yang masuk Lekra, mendaftar dengan bekal maksimal. Artinya seniman tersebut sudah tumbuh dengan nama yang besar mendahului Lekra. Di tataran nasional, Orang seperti Pramoedya Ananta Toer dan Utuy Tatang Sontani ketika bergabung dengan LEKRA sudah menjadi macan sastra Indonesia. Sedangkan di tataran daerah, sebut saja Surakarta misalnya Gesang, Md Hadi memiliki kapasitas seni yang juga maksimal. Dalam hal ini Lekra tidak bisa mengarah-arahkan lagi. LEKRA hanya menawarkan kemungkinan tema-tema baru, sedangkan soal gaya, pendekatan dan lain-lainnya itu, tidak bisa dicampuri.

Hubungan Lekra dan PKI dalam hal sosialisasi lewat media juga tidak selalu bersamaan. Selain ruangan kebudayaan dalam surat kabar partai *Harian Rakyat* yang dipimpin oleh NR. Bandaharo, Lekra mempunyai majalah *Zaman Baru* yang dipimpin oleh Rivai Apin, S. Anantaguna dan lain-lain. Beberapa bulan menjelang G30S, Lekra menerbitkan harian *Kebudayaan Baru* yang dipimpin oleh S. Antaguna, yang dalam penerbitannya selalu dimuat sajak-sajak, cerpen-cerpen, esai-esai dan karangan-karangan lain baik asli maupun terjemahan karya para anggota Lekra atau bukan.

---

Secara garis besar, seniman Lekra juga dapat dibagi menjadi dua. Pertama, mereka yang aktif secara seni dan organisasi di Lekra dan yang kedua mereka yang bergabung dengan Lekra secara seni saja. Keduanya hampir secara keseluruhan mengalami proses penangkapan, pembuangan sampai pembunuhan. Secara pragmatis, Lekra dan PKI saling membutuhkan. Namun setelah PKI membentuk KSSR, PKI memiliki garis komando sendiri terhadap kesenian dan kesastraan revolusioner. Pada Agustus 1965 KSSR mengadakan berbagai macam perlombaan seni budaya pada ulang tahunnya yang pertama.<sup>6</sup> Beberapa seniman Lekra terdapat juga yang akhirnya bergabung bersama KSSR seperti Ajip Rosidi, Pramoedya Ananta Toer, MR Dajoh, AS Dharta, dan seniman Jakarta lainnya mendukung konsepsi Presiden Sukarno, terlibat dalam Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR). Beberapa diantaranya juga menjadi anggota PKI. Aidit berpendapat bahwa kalau politik adalah otaknya partai, maka seni adalah hatinya partai.

KSSR diselenggarakan sebagai akibat penolakan LEKRA atas tawaran Aidit untuk secara resmi menjadi anak organisasi PKI. Orang yang paling keras menolak tawaran ini adalah Njoto, sekretaris II Pimpinan Pusat LEKRA dan anggota Politbiro PKI. Argumentasi orang seperti Njoto pada waktu itu adalah organisasi kebudayaan mempunyai dinamika dan langgam yang berbeda dengan organisasi politik, apalagi dengan partai seketat PKI.<sup>7</sup> Ketidaktahuan Lekra

---

<sup>6</sup> *Harian Rakjat*, 29 September 1965

<sup>7</sup> Para tokoh Lekra juga kerap mengalami perbedaan pandangan terhadap kasus kasus budaya. Apalagi yang bersentuhan dengan dunia politik. Kalimat “Lekra tidak satu bebek” memang terbukti banyak kebenarannya. Apa yang dikatakan Joebaar Ajob sebagai Sekretaris Umum LEKRA, bisa lain dengan yang diinterpretasikan Kusni Sulang sebagai ketua LEKRA

terhadap peristiwa politik di akhir 1965 tersebut, salah satunya terlihat pada saat menjelang peristiwa G 30 S, Njoto selaku aktivis elit Lekra dikeluarkan dari konseptor PKI bersama triumviratnya, DN Aidit dan Sjam<sup>8</sup>.

Para anggota Lekra kemudian ditangkap setelah peristiwa 30 September 1965. Walau Lekra mati-matian menyangkal bahwa mereka bukanlah ormas bentukan PKI. Tidak semua anggota Lekra adalah anggota PKI, dan bahkan komunis. Namun bantahan tersebut hanya tinggal pembelaan semata. Para anggota Lekra tetap ditangkap, diperiksa, disiksa, dan banyak dari mereka dibuang ke Pulau Buru untuk kurun waktu yang tak tentu. Sisanya menjalani kehidupan dengan predikat komunis serta mendapatkan Kartu Tanda Penduduk plus cap ET yang merupakan singkatan dari Eks-Tahanan Politik. Ruang gerak politik dan intelektual pun dibatasi.

Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha sebagai dua harian yang diperbolehkan terbit setelah pembunuhan 7 perwira angkatan darat pada 1965, adalah dua media yang menyebutkan keterlibatan Lekra pada peristiwa G30S. Dua harian ini memang tidak banyak menyebut nama Lekra sebagai dalang utama, namun, mereka menyebut Lekra memberi dukungan pada G30S. Contohnya, pada artikel harian Angkatan Bersenjata 9 November 1965 menyebutkan, Kantor Lekra di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, digunakan untuk

---

Yogyakarta. Begitu juga dengan, saran Njoto atas ketidakbijaksanaan "menghancurkan" Harnka dalam kasus *Tenggelamnya Kapan van der Wijk*, bisa saja dianggap angin oleh Pramoedya Ananta Toer. Hal-hal inilah yang tidak mungkin terjadi pada PKI dalam konteks fungsi seorang pimpinan. Sifat Lekra yang fleksibel ala seniman adalah tidak adanya ikatan yang terlalu membelenggu. Sebagai contoh adalah ketika Utuy Tatang Sontani terlibat dengan KSSR, LEKRA pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat Film Dokumenter *Tjidurian 19: Rumah Budaya yang Terampas*.

<sup>8</sup> TEMPO. 2010. *Njoto: Peniup Saksofon di tengah prahara*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG): Jakarta. Hlm 76

mengatur strategi G30S. Sebelumnya, harian Berita Yudha tanggal 22 Oktober 1965, menerbitkan tulisan yang isinya mengatakan, telah ditemukan dokumen penting di markas Lekra di Jalan Cidurian, Jakarta Pusat, yang diduga juga berkaitan dengan masalah ini.<sup>9</sup>

Anggota Lekra yang lain, seperti pelukis dan komposer tidak luput dari tekanan akibat stigma ini. Perupa Amrus misalnya. Sebagai pelukis, ia memang tidak mendapat larangan untuk melukis, namun ia sulit menjual hasil karyanya. Tidak ada orang yang mau membeli, karena takut dicurigai sebagai pemberi donor bagi gerakan komunis. Amrus baru ditangkap oleh Operasi Kalong setelah 3 tahun pemberangusan kelompok kiri terjadi.<sup>10</sup> Sudharnoto, pencipta lagu Garuda Pancasila yang juga anggota Lekra, mengalami hal yang sama. Karirnya sebagai komponis berakhir begitu saja. Ujung-ujungnya, ia bekerja sebagai pemusik di cafe-cafe atau hotel, tentu saja dengan mati-matian menyembunyikan identitasnya. Jasa Sudharnoto sebagai pencipta lagu Garuda Pancasila, dilupakan begitu saja, meski karyanya terus digunakan hingga saat ini. Begitu pula dengan Henk Ngantung, karyanya yang sampai sekarang digunakan (Patung Selamat Datang di Jakarta) tetap digunakan, tetapi ketokohan Henk Ngantung dinegatifkan.

Hasil karya para seniman Lekra kerap dikait-kaitkan dengan peristiwa G30S. Misalnya saja lagu Genjer-genjer dari Jawa Timur dituduh menjadi lagu

---

<sup>9</sup> *Berita Yudha*, 22 Oktober 1965

<sup>10</sup> Pendiri Sanggar Tarung Jogjakarta ini ditangkap pada tahun 1967. Sedangkan para aktivis Lekra di Tjidurian 19 Jakarta juga ditangkap di persembunyian mereka. Sebagian di buang ke Pulau Buru, sebagian yang lain selamat. Lihat Film Dokumenter Tjidurian 19: *Rumah Budaya yang Dirampas*.

pengiring ketika pembunuhan terhadap para jenderal di Lubang Buaya. Syairnya seperti "esuk-esuk paling keleler" yang dilanjutkan dengan "neng kedhokan paling keleler" yang berarti "berhamparan" dijadikan bukti penguat bahwa peristiwa G30S yang mengakibatkan pembantaian terhadap para jenderal telah direncanakan jauh-jauh hari.<sup>11</sup>

Lagu Genjer-genjer diciptakan oleh Muhammad Arief, komponis yang tergabung dalam Lekra, yang berasal dari Banyuwangi pada tahun 1960-an. Arief membuat lagu itu berdasarkan penderitaan rakyat yang dijajah Jepang pada masa itu. Kebanyakan kaum laki-laki diambil pergi, sedangkan hasil bumi Banyuwangi yang limpah ruah dirampas oleh Jepang. Akhirnya rakyat demi memenuhi asupan pangan, mengambil dan memunguti tanaman genjer dan sawah untuk dikonsumsi. Padahal tanaman genjer yang banyak tumbuh di sawah itu sebelumnya dianggap sebagai tanaman pengganggu. Tahun 1962, Njoto, seniman Lekra yang juga anggota PKI ini datang ke Banyuwangi dan senang ketika mendengar lagu ini. Oleh Njoto lagu ini dibawa ke ibukota untuk disebarluaskan di TVRI. Lilis Suryani dan Bing Slamet adalah artis terkenal yang kemudian menyanyikannya. Lagu ini kemudian menjadi hits dan dianggap sebagai lagu nasional, karena menunjukkan potret rakyat yang menderita, namun tetap bersemangat hidup.

Selain lagu, puisi gubahan Mawie atau Ananta Joni bisa dijadikan contoh. Mawie melahirkan puisi berjudul *Kunanti Bumi Memerah Darah* yang lalu dimuat di harian Bintang Timoer pada tanggal 21 Maret 1965. Puisi ini menceritakan penderitaan seorang perempuan miskin yang tinggal di pinggir sungai Ciliwung.

---

<sup>11</sup> Rhoma Dwi Yulianti, 2008, *Lekra Tak Membakar Buku*, Merakesumba: Yogyakarta, hlm 414.

Dari judulnya, puisi ini diartikan seorang perempuan malang yang tinggal di tepi sungai Ciliwung, dan melahirkan jabang bayi tanpa bantuan bidan. Walau begitu, puisi ini digugat sebagai rencana peristiwa berdarah G30S. Kala "memerah darah". Padahal tidak ada kaitan antara puisi tersebut dengan peristiwa 1965.

Pemerintah Orde Baru (1966-1998) melalui kuasa Komando Keamanan dan Keterliban (Kopkamtib), dengan segala cara, memang berusaha menanamkan alur peristiwa G30S. Salah satunya melalui hegemoni media massa. Caranya: *Pertama*, membatasi kebebasan media massa. *Kedua*, mengatur tataran pemberitaan. Dengan begitu, penguasa Orde Baru berusaha menanamkan kebencian terhadap PKI dan ormas-ormasnya yang semuanya mengarah kepada pembasmian komunisme. Hal ini dilakukan mengingat Angkatan Darat memiliki potensi konflik kepentingan politik dengan PKI yang berbenderakan komunisme.<sup>12</sup>

Stigmatisasi politik adalah hal yang kerap terjadi ketika kelompok dominan secara politik, yaitu penguasa, hendak menyingkirkan kelompok yang dianggap berbahaya bagi dirinya. Akibatnya bisa berujung pada pengeksklusian hak-hak politik, sosial, dan ekonomi dari para anggota kelompok tersebut. Hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Peristiwa politik ini tidak hanya berhenti pada saat itu, tapi terus berlanjut dengan perpindahan bentuk yang makin lama makin halus. Bahkan tak tampak. Ketika tampuk pemerintahan dikuasai oleh pemerintah Orde Baru, tindak

---

<sup>12</sup> Rosihan Anwar. 2007. *Soekarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara 1961-1965*. Yayasan Obor: Jakarta, hlm. 343.

penghancuran dan pembunuhan karakter menimpa mereka yang dianggap musuh Orba.

Penguasa membangun stabilitas politik dengan penciptaan musuh bersama, yaitu stigmatisasi terhadap Lekra sebagai salah satunya. Sejak itulah fobia akan segala sesuatu yang berbau komunis melanda. Wacana-wacana anti komunis pun bermunculan di berbagai media cetak maupun elektronik. Sejarah tentang komunis pun tak lagi terdengar. Simpati bagi mereka yang menjadi korban dan pemberian stigma PKI pun tertahan, takut dianggap antek komunis. Aktivitas Lekra sebagai lembaga kebudayaan yang kerap menggaungkan penderitaan rakyat kecil pun lenyap.

Pada kasus Lekra, pandangan bahwa Lekra adalah ormas di bawah PKI yang turut serta dalam G30S seakan membuat semua pernyataan yang ada merupakan sebuah kebenaran. Ungkapan itu diperkuat dengan artikel yang muncul di Harian Angkatan Bersenjata pada tanggal 9 November 1965 yang bertajuk "CS PKI dan Lekra Tebet Pusat Kegiatan Gestapu". Artikel tersebut seolah-olah melegitimasi bahwa Lekra terlibat dalam G30S. Keterlibatan Lekra juga termasuk dalam penyediaan tempat dan persiapan gerakan tersebut. Kedekatan ideologi yang mereka miliki dengan PKI dan kerjasama di berbagai acara kebudayaan, cukup menuding bahwa Lekra merupakan antek PKI dan pelaku G30S.

Artinya, ideologi merubah subyek-subyek yang berada di antara individu menjadi subyek-subyek yang aktif. Dalam kasus Lekra, penempatan Lekra sebagai ormas dari PKI dalam pemberitaan menempatkan Lekra sendiri sebagai

subyek yang dimaksud. Oleh sebab itu, ketika media menghembuskan berita mengenai PKI dan ormas-ormasnya atau bahkan cukup dengan menyebut kata "PKI" sudah membuat Lekra merasa turut disebutkan dalam pemberitaan tersebut.

Nama Lekra dalam pemberitaan memang tidak banyak disebut. Walau begitu, pemberitaan bahwa Lekra sebagai antek PKI, dan terlibat dalam G30S pernah disebutkan beberapa kali. Misalnya saja pada Berita Yudha pada tanggal 22 Oktober 1965 yang memuat berita pembersihan yang dilakukan oleh TNI berhasil menemukan dokumen-dokumen penting di gudang Lekra yang berada di jalan Cidurian, Jakarta Pusat.<sup>13</sup>

Pernyataan-pernyataan ini jelas menyudutkan Lekra. walaupun namanya tidak kerap disebut, namun berita yang menyatakan penemuan dokumen di gudang Lekra sudah jelas mengarahkan opini bahwa Lekra adalah antek PKI yang terlibat G30S. Disini media menempatkan posisi Lekra sebagai oknum jahat dan membahayakan masyarakat.

Dalam kasus Lekra, stigmatisasi terhadap Lekra bukanlah upaya pengenyahan Lekra sebagai sebuah kontingen, melainkan kualitas dari Lekra itu sendiri. Militer melihat Lekra yang memiliki kesamaan ideologis dengan PKI adalah lawan, dan menganggap Lekra sebagai saingan politis. Militer memandang bahwa sekalipun ormas-ormas atau pribadi tertentu hanya dekat atau pernah terlibat dalam kegiatan PKI, maka yang bersangkutan merupakan bagian dari PKI. Kekhawatiran militer tersebut ini nampak dari artikel yang dimuat di harian Berita Yudha, tanggal 6 Januari 1966 pada halaman pertama:

---

<sup>13</sup> *Berita Yudha*, 22 Oktober 1965

G30S, dikuatirkan akan timbul lagi pemberontakan PKI yang ketiga di masa-masa mendatang. Maka itu, demi keselamatan generasi bangsa Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali: Tumpas habis PKI/G30S sampai keakar-akarnya, hingga hantu-hantunya pun tak bisa nongol lagi<sup>14</sup>

Dalam artikel di media massa pasca peristiwa 1965, terlihat bahwa para seniman yang terlibat dalam G30S bukanlah loyal terhadap revolusi bangsa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa para seniman yang giat melakukan aktivitas kebudayaan bersama PKI juga turut bersalah dalam peristiwa G30S. Artikel-artikel tersebut mempertegas aksi penyebaran kebencian terhadap PKI dan mereka yang dianggap PKI.

Tidak sedikit seniman Lekra yang berkecimpung di dunia tulis menulis terkena imbasnya. Sebut saja, Pramoedya Ananta Toer. Utuy Tatang Sontani, Hersri Setiawan, Putu Oka Sukanta, dan Martin Aleida. Namun penyebaran rasa benci terhadap PKI yang melibatkan Lekra membuat para seniman Lekra sulit kembali ke bidangnya.

### **B. Kondisi Lekra Surakarta Pasca Peristiwa G 30 S**

Kondisi di Surakarta juga ikut memanas beberapa hari setelah peristiwa 1965 terjadi. Rumus yang berlaku pada waktu itu adalah 3B: Buang, Bui, atau Bunuh. Hal ini dikarenakan, Surakarta merupakan salah satu kantong kekuatan politik PKI, beserta beberapa organisasi masyarakat yang secara resmi ada di bawah PKI ataupun yang secara pemikiran saja dekat dengan PKI. Bahkan para seniman yang seringkali ikut dalam kegiatan kesenian Lekra atau PKI juga

---

<sup>14</sup> *Berita Yudha*, 6 Januari 1966

terkena pemberangusan. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada para seniman Lekra, tetapi juga kepada aktivis organisasi lain yang dianggap sebagai undebouwnya PKI seperti PGTI dan Gerwani.<sup>15</sup>

Awalnya para seniman ini diwajibkan melapor ke kelurahan atau kantor kodim setempat. Diberikan beberapa macam pertanyaan terkait dengan peristiwa 1965. Salah satunya, seperti yang dituturkan oleh Muryadi, bahwa dirinya melapor ke selatan gading, diberikan pertanyaan berupa apa saja kegiatan di Lekra, dimintai keterangan tentang kartu keanggotaan, kemudian dimana senjata untuk kudeta disembunyikan. Pertanyaan ini dianggap bukan sebagai pertanyaan tetapi tuduhan. Muryadi yang aktif sebagai penari tersebut memberikan jawaban bahwa dirinya hanya tahu soal menari, dan tidak pernah memegang senjata. Soal politik tidak diketahuinya sama sekali, dan hanya fokus pada ketertarikan budaya. Pengetahuannya juga hanya selintas seperti mendengar nama Njoto, Rewang, Karno Gejig dan lainnya, tetapi sebatas mengetahui dan tidak pernah bertemu. Selain itu, bagaimana mungkin dirinya menari sambil memegang senjata. Ia juga tidak memiliki kartu anggota Lekra. Beberapa seniman yang dituduh juga ada yang diperintahkan masuk ke sungai untuk mencari senjata, karena ada gosip bahwa senjata-senjata dibuang di sungai. Setiap pemeriksaan rutin Muryadi selalu didampingi saudaranya yang sudah bekerja di balaikota dan juga seorang veteran. Keponakannya yang aktif di angkatan darat juga ikut membantunya agar tidak di

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Supeno, Pengurus Pakorba Surakarta, 19 Februari 2011, jam 17.00 WIB

bon. Muryadi meskipun tidak mendapatkan siksaan, tetapi harus hidup ditengah masyarakat dengan image miring sebagai komunis.<sup>16</sup>

Seniman lain yang juga terkena imbas adalah Rusman dan Darsi dari wayang orang Sriwedari, Martinah dari Sekolah Seni (pengajar Tari), dan beberapa seniman lainnya. Ada juga seorang rekan dari Muryadi yang pernah ikut drumband kota. Padahal ia hanya sebentar mengikuti drumband kota, kemudian masuk ke Angkatan Darat, tetapi tetap ditangkap atas tuduhan ikut kegiatan Lekra.<sup>17</sup> Beberapa seniman wayang Sriwedari memang banyak yang tertangkap karena ada kelompok bernama Sriwedari yang selain bisa menampilkan tarian, juga dapat menampilkan pertunjukkan wayang.<sup>18</sup>

Selain Muryadi, ada juga Sarbinatun yang mengalami penangkapan, penahanan dan penyiksaan. Sarbinatun menjadi anggota Lekra karena kegemarannya dalam menari. Dia juga kerap mendapatkan undangan untuk mengisi pada beberapa acara baik yang berkaitan dengan PKI ataupun partai lain. Tarian yang dapat ditampilkan Sarbinatun antara lain Tari Nasional, Tari Minang, Tari Genjer Genjer, Tari Tani, Tari Nandur Jagung dan lain lain sehingga ia dikenal dari panggung ke panggung sebagai anggota Lekra. Diluar aktivitas kebudayaan dan seni tersebut, Sarbinatun juga aktif dalam bidang social di wilayahnya dengan tidak memandang dari apa mereka berasal (PKI, NU, Masyumi, dan lain-lain). Karena kegiatannya inilah, Sarbinatun kemudian ditangkap dan meski berpindah-pindah dari penjara ke penjara. Pada interogasinya

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muryadi, Penari Lekra, 10 April 2011, jam 18.30 WIB

<sup>17</sup> Idem

<sup>18</sup> *Harian Rakjat*, 26 Mei 1964

Sarbinatun juga dipaksa mengakui hubungannya dengan PKI. Pada tahun 1979, Sarbinatun bebas dan dalam surat tersebut ia ditahan karena kegiatannya di Gerwani, meskipun ia tidak bergabung dengan Gerwani.<sup>19</sup>

Beberapa tempat yang dipergunakan untuk menahan dan menginterogasi para tahanan 1965 di Surakarta diantaranya Balaikota, Penjara Gladag, Bekas markas tentara (kini PGS), Gereja St Antonius, Sasono Mulyo Kraton, kemudian pesangrahan Mangkunegaran di Karanganyar dan beberapa tempat lainnya.

Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran ikut andil dalam memberikan ruang sebagai dukungan kepada kebijakan pusat dalam memberantas kaum revolusioner kiri. Karena memang tempat penahanan yang ada di Surakarta tidak cukup untuk menampung tapol yang jumlahnya ribuan. Hal ini merupakan langkah untuk memperbaiki citra karena juga mendukung kegiatan-kegiatan kiri. Apalagi Mangkunegaran yang pendoponya seringkali dipergunakan untuk acara Lekra. Setidaknya baik pihak Kasunanan atau Mangkunegaran tidak mau dituding sebagai pihak netral atau anti pemerintah. Alasan lain yang juga mendorong dukungan tersebut adalah adanya orang kraton dan Mangkunegaran yang terlibat atau setidaknya dekat dengan anasir kiri. Beberapa nama yang bisa disebutkan yaitu istri Njoto dan Mia Bustam.

Di Surakarta, tempat penahanan tapol tapol PKI ataupun yang dituduh sebagai PKI kurang lebih berjumlah 15 tempat. Tempat tempat tersebut dipergunakan untuk penahanan, bon, interogasi, penyiksaan sampai pembunuhan. Sedangkan tempat yang dipergunakan untuk pembunuhan diantaranya adalah

---

<sup>19</sup> Hersri Setiawan, 2006, *Kidung Untuk Korban*, Pustaka Pelajar: Surakarta, hlm 45-63

Jembatan/Sungai Bacem dan Sungai Bengawan Surakarta. Lokasi tersebut antara lain :

1. Seksi I Baron
2. Seksi II Banjarsari
3. Pool Bus Eva dan Sendiko
4. Kandang Menjangan
5. Markas AURI Panasan
6. Loji Gandrung
7. DPKN
8. Balaikota dan Gedung DPRD Surakarta
9. Gedung Perkantoran Pemkot Surakarta
10. CPM Surakarta
11. Wangkung (Pamardi Karya)
12. LP Surakarta
13. Sasono Mulyo
14. Kantor Polisi Serengan
15. Kantor Kopem (Komando Pemberantasan Malaria)
16. Kecamatan Pasar Kliwon
17. Kecamatan Jebres
18. Kecamatan Serengan
19. Kecamatan Laweyan
20. Kecamatan Banjarsari<sup>20</sup>

Metode penangkapan pada mereka yang ditargetkan sebagai PKI yakni dari atasan dulu, kemudian pada mereka yang menjabat di bawahnya, sampai yang terakhir adalah kalangan paling bawah (grassroot). Begitu pula dengan yang

---

<sup>20</sup> [http://sejarahsosial.org/kamp\\_Surakarta/htm/08.htm](http://sejarahsosial.org/kamp_Surakarta/htm/08.htm). diunduh pada 10 April 2011. Jam 12.46

terjadi di Surakarta. Dari pucuk teratas (pejabat) sampai simpatisan atau mereka yang dekat dengan kegiatan PKI mengalami hal yang nyaris sama.

Tanggal 22 Oktober 1965, RPKAD menduduki gedung Balaikota Surakarta dan mengubahnya menjadi markas. Walikota Surakarta, Oetomo Ramelan, ditangkap dan ditahan di Markas AURI Panasan; tiga anggota Badan Pengurus Harian (BPH) Pemkot Surakarta dipecat dan tidak diketahui nasibnya sampai sekarang; dan 50% pegawai Pemkot Surakarta ditangkap, diberhentikan secara tidak hormat, dinon-aktifkan, atau pensiunnya dipercepat. Keesokan harinya, Menteri Dalam Negeri mengangkat Letkol. Th. J. Soemantha (Nrp. 15439) sebagai pemangku jabatan walikota. Program utama Soemantha adalah 'pembersihan terhadap orang-orang PKI/Ormas-ormasnya serta para simpatisannya. Setidaknya sampai 1 Desember 1965, fungsi-fungsi pemerintahan sipil tidak berjalan. Balaikota lebih tepat disebut sebagai kamp tahanan pusat di mana tapol dalam jumlah besar ditahan, diinterogasi, disiksa, diseleksi, dan dikirimkan ke kamp-kamp tahanan lain.<sup>21</sup>

Penguasa militer menggunakan ruang sekretariat Pemkot serta *pendopo* untuk menahan para tapol. Sementara ruang belakang gedung difungsikan sebagai ruang interogasi dan penyiksaan. Penguasa militer mempertontonkan penyiksaan terhadap sejumlah tapol laki-laki kepada publik halaman depan Balaikota, di mana berdiri sebuah tiang bendera. Jumlah tapol yang ditahan terus bertambah hingga ruangan Balaikota penuh sesak. Penguasa militer memindahkan sebagian tapol, seluruhnya laki-laki, ke ruang sidang DPRD Surakarta yang terletak di bagian

---

<sup>21</sup> [http://sejarahsosial.org/kamp\\_Surakarta/peta-lokasiSurakarta.html](http://sejarahsosial.org/kamp_Surakarta/peta-lokasiSurakarta.html). Diunduh pada 10 April 2011. Jam 13.00 WIB

belakang (sisi barat) Balaikota, sedang tapol perempuan ke ruang perkantoran Pemkot. Selang satu bulan, ruangan di gedung DPRD pun tidak sanggup lagi menampung tahanan-tahanan baru. Sementara itu, penguasa militer menganggap fungsi-fungsi pemerintahan harus segera dipulihkan. Oleh karena itu, penguasa militer memindahkan para tapol di gedung DPRD ke gedung milik Kraton Surakarta, Sasono Mulyo, sedang para tapol perempuan tetap dibiarkan di gedung perkantoran Pemkot. Sekitar 1967/1968, di atas tanah kosong di bagian belakang kompleks Balaikota kemudian dibangun gubuk-gubuk untuk menahan para tapol laki-laki golongan C yang sudah mendekati masa pembebasan. Diduga jumlah mereka mencapai ratusan orang. Sesudah Peristiwa 1965 hingga 1980 atau 1990, gedung Balaikota tetap berfungsi sebagai lokasi wajib lapor bagi para eks-tapol.<sup>22</sup>

Sejak 1 Desember 1965 sampai 30 Mei 1967, Sasono Mulyo menjadi kamp penampungan para tapol laki-laki. Penguasa militer menempatkan para tapol di dalam maupun di pendopo bangunan induk. Penguasa militer membangun sekat-sekat di ruangan pendopo menggunakan *gedeg* (dinding dari anyaman bambu). Untuk pengamanan, jalur keluar-masuk kamp dipagari kawat berduri. Sejak awal 1967 tapol di Kamp Sasana Mulya dipindahkan secara bergelombang ke tempat-tempat penahanan lain. Seluruh tapol yang ditahan di Kamp Sasono Mulyo adalah laki-laki yang mungkin dipandang penguasa militer sebagai bukan tokoh organisasi 'Kiri'. Pada 9 Maret 1966, berdasarkan catatan tata usaha kamp, jumlah tapol yang ditahan di tempat itu adalah 1.931 orang. Mereka dibagi dalam 33 kelompok.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Kantor Polisi Seksi I Baron-Laweyan menjadi tempat penahanan dan interogasi terutama bagi tapol yang berasal dari wilayah Kecamatan Laweyan-Surakarta. Para tapol ditempatkan di sel yang terletak di bagian selatan bangunan. Seksi I Baron menjadi tempat penahanan sementara sebelum tapol dipindahkan ke kamp lain, seperti Sasana Mulya atau Balaikota Surakarta. Seksi I Baron menjadi tempat penahanan dan interogasi baik untuk tapol perempuan maupun laki-laki.<sup>23</sup>

LP Gladag Surakarta pada periode awal Tragedi 1965 digunakan terutama untuk menahan para tapol yang dipandang oleh penguasa militer sebagai tokoh/pimpinan organisasi/pemerintahan. Di dalam LP Surakarta ruangan-ruangan penahanan mendapat sebutan berbeda-beda dari para tapol. Ada yang disebut sebagai ‘kamar besar’ di mana tapol yang ditahan di situ lebih leluasa karena pada waktu-waktu tertentu pihak penguasa LP memperbolehkan mereka keluar dari sel dan menikmati sinar matahari. Ada pula sel/blok isolasi bagi tapol yang dianggap tokoh penting yang berbahaya. Sel seperti itu dinamakan ‘kandang macan’. Blok/sel ini memiliki pintu masuk rangkap tiga. Halaman atau teritis deretan sel-sel dipagari jeruji besi setinggi kurang lebih 4 meter. Di atas setiap jeruji dililitkan kawat berduri. Para tapol yang ditahan di ‘kandang macan’ sama sekali tidak boleh keluar dari selnya.

Namun setelah pengosongan kamp-kamp penahanan lain di Kota Surakarta sejak 1967-1968, para tapol laki-laki yang masih berada di Sasana Mulya dan markas CPM Surakarta secara bergelombang dipindahkan seluruhnya

---

<sup>23</sup> *Ibid*

ke LP Surakarta. Pada 1968 LP Surakarta masih penuh sesak dengan tapol sehingga ruangan yang berkapasitas 30 orang diisi dengan 60 orang.

Pesanggrahan Karangpandan di Karanganyar milik Pura Mangkunegaran juga menjadi tempat penahanan sementara seperti halnya Dalem Sasono Mulyo. Tempat ini terletak di sebuah kawasan yang agak tinggi, di arah selatan dari terminal bis Karangpandan sekarang. Pesanggrahan Karangpandan berbeda dengan tempat penahanan lainnya, karena lebih manusiawi serta warga disekitarnya tidak terlalu menganggap bahwa PKI adalah orang-orang yang begitu kejam sesuai yang digambarkan media.

Di luar stigma yang ditempelkan oleh media sekaligus pemerintah terhadap Lekra, Lekra Surakarta memiliki segudang kegiatan kebudayaan yang masih bisa dijadikan contoh dalam mendorong terciptanya budaya nasional berlandaskan budaya lokal. Hal ini disebabkan karena Lekra Surakarta memberi ruang untuk para seniman agar dapat berkarya dengan maksimal serta mendorong para seniman untuk berkarya demi kualitas diri mereka sendiri. Termasuk pula di dalamnya konsep regenerasi warisan budaya yang diwujudkan Lekra Surakarta dengan pelatihan tari gratis, pelatihan seni lukis Lekra, pertunjukan wayang inovatif seperti yang dilakukan Dharma Budaya Surakarta (pernah menimbulkan pro kontra karena wayang berbahasa Indonesia) dan beberapa aktivitas budaya lainnya.<sup>24</sup>

Lekra yang diibaratkan baru saja terlahir itu kemudian dimundurkan dari panggung kebudayaan Indonesia. Lekra menampung semua kesenian yang

---

<sup>24</sup> *Harian Rakjat*, 26 Mei 1964

berorientasi ke rakyat, mulai ludruk, seni tulis, keroncong, jaran keping, seni lukis, wayang kulit. Seni dibuat sedemikian rupa agar bisa dinikmati rakyat kecil, tidak mengawang-awang di langit. Perkembangan selama lima belas tahun (1950-1965), baik yang di pusat maupun yang di daerah nyaris semuanya mati tidak berbekas. Baik secara fisik terlebih secara organisasi, tanpa sempat menyerahkan tongkat estafet pada para penerus. Ini menyebabkan tujuan untuk mengembalikan budaya kembali ke rakyat menjadi terputus dan segala sesuatu hal mengenai Lekra semakin digelapkan.

## BAB V

### KESIMPULAN

Pasca pendirian Lekra pada tanggal 17 Agustus 1950, Lekra mulai mengembangkan sayapnya dengan mulai merekrut banyak anggota dan tercatat bahwa pada tahun 1954 Lekra telah mempunyai banyak cabang di berbagai daerah, salah satunya di Surakarta.

Surakarta sendiri dikenal sebagai kota budaya, maka tidak mengherankan apabila Lekra ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan para seniman pada khususnya. Pada perkembangannya Lekra Surakarta banyak berperan aktif dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat kebudayaan ataupun politik. Secara organisasi maupun pribadi anggotanya, Lekra seringkali mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak dengan dasar untuk mengembangkan seni budaya Indonesia yang revolusioner.

Lekra pernah bekerjasama dengan PKI dan menggelar kerjasama dengan lembaga-lembaga seni budaya yang lain seperti Lesbumi (Lembaga seni budaya milik NU), LKN (Lembaga seni budaya milik PNI), Okra (Organisasi Kesenian Rakyat) dan lain-lain. Bahkan Lekra pernah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi militer seperti kodim di Surakarta dan Salatiga dalam menggelar pertunjukan ketoprak. Lekra Surakarta juga pernah menjalin kerjasama dengan SOBSI dalam berbagai kegiatan lomba-lomba. Selain itu Lekra juga dipercaya sebagai juri dalam berbagai lomba kesenian. Hal ini menandakan bahwa peran Lekra cukup aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

*commit to user*

Lekra Surakarta memiliki peran yang cukup banyak dalam memajukan kegiatan kebudayaan di Surakarta. Banyak kegiatan seni dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Lekra, seperti tari, musik, drama dan *drum band*. Pelatihan ini ditujukan untuk masyarakat umum tidak terbatas pada anggota Lekra saja.

Peran Lekra dalam dunia seni tari ditandai dengan diadakannya Konfernas ke-I Lembaga Tari Indonesia (LEKRA) yang dilaksanakan tanggal 31 Maret. 1964 di Sriwedari, dalam seni Ketoprak ditandai dengan kerjasama dengan Bakoksi (Badan Kontak Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia), Lekra mendukung terselenggaranya Festival dan Kongres Ketoprak I di Jogjakarta pada 1957 dan Festival Kongres Ketoprak II dilangsungkan di Gedung Kesenian Sriwedari pada 1964.

Dalam seni musik, Lekra sendiri pernah mendukung Gesang dan melakukan protes ketika lagu ciptaan Gesang dengan judul “sapu tangan” diserobot oleh Malaysia. Secara tidak langsung Lekra juga memiliki andil dalam terbentuknya organisasi musik bernama HOMI (Himpunan Organisasi Musik Indonesia). Lekra sendiri juga mendukung tentang pemboikotan film dan musik dari luar (Amerika), di berbagai daerah termasuk Surakarta,

Dalam dunia wayang dan pedalangan pun Lekra memberikan kebebasan berekspresi kepada anggotanya. Setiap dalang, anggota Lekra atau bukan, berhak membuat fragmen lakon yang hendak dipergelarkan, begitu juga berhak menciptakan lakon gubahan sendiri; mempergelarkan fragmen pakem yang sudah lazim, atau lakon yang digubah oleh dalang lain.

Kedekatan Lekra dengan PKI membuat adanya persepsi bahwa Lekra merupakan bagian dari PKI. Setelah peristiwa G 30 S, anggota Lekra baik yang aktif dalam kegiatan seni dan organisasi atau anggota yang aktif dalam kegiatan seni saja hampir secara keseluruhan mengalami proses penangkapan, pembuangan sampai pembunuhan, dan yang lain menjalani kehidupan dengan predikat komunis serta mendapatkan Kartu Tanda Penduduk plus cap ET (Eks-Tahanan Politik). Hal ini membuat Lekra Surakarta mengalami kemunduran bahkan kehancuran tanpa adanya kesempatan regenerasi di ranah kebudayaan.

Terlepas dari kesemuanya itu Lekra Surakarta memiliki kegiatan yang sangat berperan dalam kemajuan seni di Surakarta dengan memberikan ruang untuk para seniman agar dapat berkarya dengan maksimal serta mendorong para seniman untuk berkarya demi kualitas diri mereka sendiri dan masyarakat umum yang tertarik dan ingin belajar mengenai kesenian.